

**LAPORAN PENELITIAN  
HIBAH PENELITIAN TIM PASCASARJANA-HPTP  
(HIBAH PASCA) – TAHUN KE III**



**MODEL EVALUASI PENJAMINAN MUTU SEKOLAH**

Oleh:

Peneliti Utama:

Prof. Soenarto, Ph.D.

Peneliti Anggota:

Dr. Badrun Kartowagiran

Dr. Amat Jaedun

Dibiayai Oleh DIPA UNY, dengan Surat Perjanjian Penugasan  
Pelaksanaan Penelitian Hibah Tim Pascasarjana Nomor:  
449a/HPS-Multitahun/UN34.21/2013, Tanggal 13 Mei 2013

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
2013**

## HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR

1. Judul Penelitian : Model Evaluasi Penjaminan Mutu Sekolah
2. Ketua Peneliti:
- a. N a m a : Prof. Soenarto, Ph. D.
  - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
  - c. N I P : 19480804 197412 1 001
  - d. Jabatan Fungsional : Guru Besar
  - e. Jabatan Struktural : Ketua Program Studi PTK, Pascasarjana UNY
  - f. Bidang Keahlian : Evaluasi Pendidikan
  - g. Program Studi/Jurusan : Pascasarjana UNY
3. Daftar Anggota Peneliti dan Mahasiswa:

	<b>N A M A</b>	<b>BIDANG KEAHLIAN</b>	<b>FAKULTAS/ JURUSAN</b>	<b>PERGURUAN TINGGI</b>
1	Prof. Dr. Badrun Kartowagiran	Psikometri	Pascasarjana/ PEP	UNY
2	Dr. Amat Jaedun	Evaluasi Pendidikan	Pascasarjana/PEP	UNY
3	Muhammad Nasir Malik, M.T.	Pend. Teknologi Kejuruan	Teknik/Tek Elektro	Univ. Negeri Makasar
4	Slamet Wijono, M.Pd.	Penel & Evaluasi Pend	Guru SMA	--
5	Wartoni, S.Pd.	Penel & Evaluasi Pend	Guru	--
6	Budi Santoso,S.Pd.	Pend. Teknologi Kejuruan	Guru SMK	--

4. Pendanaan dan jangka waktu penelitian
- a. Jangka waktu penelitian yang diusulkan : 3 tahun
  - b. Jangka waktu penelitian yg sudah dijalani : 3 tahun
  - c. Biaya yang diusulkan tahun III : Rp 90.000.000,-
  - d. Biaya yang disetujui tahun ke-3 : Rp 90.000.000,-

Mengetahui,  
Direktur Program Pascasarjana UNY,

Yogyakarta, 29 November 2013  
Peneliti Utama,

Prof. Dr. Zuhdan Kun Prasetyo, M.Ed. D.  
NIP. 19550415 198502 1 001

Prof. Soenarto, Ph. D.  
NIP. 19480804 197412 1 001

Menyetujui,  
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat

Prof. Dr. Anik Ghufon  
NIP. 19621111 198803 1 001

## RINGKASAN DAN SUMMARY

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan model evaluasi penjaminan mutu sekolah yang valid dan implementatif, yang terdiri dari: (1) model dan komponen model, (2) prosedur atau mekanisme evaluasi penjaminan mutu sekolah, (3) panduan dalam melakukan evaluasi penjaminan mutu sekolah, dan (4) instrumen yang valid untuk digunakan dalam evaluasi penjaminan mutu sekolah.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian riset dan pengembangan (R & D), yang dilakukan selama tiga (3) tahun. Penelitian tahun pertama yang sudah dilaksanakan pada tahun 2011, adalah untuk mengkaji model evaluasi penjaminan mutu sekolah yang sudah ada (*existing model*) dan hasil penelitian relevan, mengembangkan draf model dan prosedur atau mekanisme evaluasi penjaminan mutu sekolah, menyelenggarakan FGD untuk melakukan validasi terhadap draf model serta prosedur atau mekanisme, dan melakukan revisi draf model serta prosedur evaluasi penjaminan mutu sekolah. Penelitian tahun kedua yang telah dilaksanakan pada tahun 2012, adalah untuk mengembangkan panduan penggunaan model dan instrumen evaluasi penjaminan mutu sekolah, menyelenggarakan FGD untuk membahas draf panduan dan instrumen, dan merevisi draf panduan serta instrumen evaluasi penjaminan mutu sekolah. Pada penelitian tahun ketiga, dilakukan diseminasi model melalui uji pengguna, yang mencakup prosedur dan panduan pelaksanaan penjaminan mutu, serta penerapan instrumen evaluasi penjaminan mutu sekolah guna memetakan (mengevaluasi) pelaksanaan penjaminan mutu yang dilakukan pada sekolah sasaran.

Pada penelitian tahun pertama, peserta FGD adalah 10 pakar dari perguruan tinggi, LPMP, dan P4-TK, serta asosiasi profesi, yaitu Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia (HEPI), Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI), dan ADGVI. Pada FGD ini materi yang didiskusikan adalah draf dan komponen model, serta prosedur atau mekanisme evaluasi penjaminan mutu sekolah. Pada penelitian tahun kedua, peserta FGD adalah 9 pakar dari perguruan tinggi, LPMP, dan P4-TK, serta 9 pakar dari asosiasi profesi (HEPI, ADGVI, dan PGRI), pengawas (SMP, SMA, dan SMK) sebanyak 3 orang, dan Wakasek Urusan Penjaminan Mutu (Wakasek UPM), sebanyak 6 orang.

Adapun materi yang didiskusikan adalah panduan penggunaan model dan instrumen evaluasi penjaminan mutu sekolah. Sementara itu, pada penelitian tahun ketiga, model didesiminasikan dengan melalui uji pengguna. Uji pengguna tersebut dilakukan melalui FGD dengan mengundang responden: Wakasek Urusan Penjaminan Mutu dari 10 SMA, Wakasek UPM dari 10 SMK di D.I. Yogyakarta. Selain itu, pada penelitian tahun ketiga ini juga dilakukan penerapan instrumen untuk memetakan (mengevaluasi) pelaksanaan penjaminan mutu yang dilakukan di sekolah sasaran.

Hasil penelitian tahun pertama, menunjukkan sebagai berikut.

1. Hasil penelitian tema payung tahun pertama menunjukkan bahwa: (1) model evaluasi penjaminan mutu sekolah yang telah dikembangkan valid untuk dijadikan acuan sebagai model evaluasi penjaminan mutu sekolah, (2) penjaminan mutu sekolah seharusnya dilakukan untuk semua komponen sistem pendidikan, yang meliputi: komponen input peserta didik, input sumber daya guru, dan input sumber daya lainnya, komponen proses, baik proses manajemen sekolah, pembelajaran, maupun pembentukan kultur sekolah, komponen output atau hasil pendidikan, dan komponen outcomes, (3) mekanisme evaluasi penjaminan mutu sekolah yang telah dikembangkan cukup jelas menggambarkan prosedur pelaksanaan evaluasi terhadap program penjaminan mutu sekolah.
2. Pelaksanaan penjaminan mutu input siswa dilakukan melalui pelaksanaan seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB), yang untuk SMA RSBI telah mengacu pada ketentuan yang berlaku, yaitu peraturan menteri Pendidikan Nasional. Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi dari peraturan menteri tersebut masih sangat variatif sesuai kondisi dan kemampuan sekolah masing-masing. Yang lebih memprihatinkan adalah bahwa pelaksanaan program PPDB tersebut belum dilakukan evaluasi mengenai efektivitasnya dalam menjaring calon-calon peserta didik SMA RSBI yang berkualitas.
3. Pelaksanaan penjaminan mutu komponen penilaian pendidikan sebagaimana hasil penelitian Ika Pranita Siregar (2011), menunjukkan bahwa sebagian besar SMA RSBI belum memanfaatkan informasi hasil penilaian (daya serap) untuk

melakukan perbaikan pembelajaran. Hal ini tentu saja belum sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian, bahwa hasil penilaian seharusnya dapat dimanfaatkan yang salah satunya adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran.

4. Pelaksanaan penjaminan mutu output pendidikan di sekolah, salah satunya dapat dilakukan dengan mengevaluasi kualitas soal yang digunakan untuk uji coba Ujian Nasional. Hasil penelitian Hariyani (2011), menunjukkan bahwa kualitas soal buatan guru yang digunakan untuk uji coba UN perlu dievaluasi secara terus-menerus untuk menjamin terpenuhinya kualitas soal yang valid dan reliabel.

Berdasarkan hasil penelitian tahun pertama tersebut, dapat disarankan sebagai berikut.

- a. Pelaksanaan penjaminan mutu yang dilakukan oleh pihak internal sekolah cenderung belum dilaksanakan secara terencana dan efektif. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penjaminan mutu yang dilakukan oleh pihak internal sekolah.
- b. Peran pihak-pihak di luar sekolah sebagai pemberi fasilitasi dalam pelaksanaan penjaminan mutu yang dilakukan oleh sekolah masih sangat kurang dan cenderung kabur. Untuk itu, diperlukan sosialisasi mengenai mekanisme dan peran pihak eksternal sekolah dalam penjaminan mutu sekolah. Upaya ini akan dilakukan dalam penelitian tahun kedua dan ketiga penelitian ini, sehingga pelaksanaan penjaminan mutu serta fasilitasi dan supervisinya dapat berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama.

Hasil penelitian tahun kedua menunjukkan sebagai berikut.

1. Hasil penelitian tema payung tahun kedua menunjukkan bahwa: (1) panduan evaluasi penjaminan mutu sekolah yang telah dikembangkan adalah praktis untuk dijadikan panduan dalam pelaksanaan evaluasi penjaminan mutu sekolah, (2) instrumen evaluasi penjaminan mutu sekolah yang telah di-kembangkan adalah valid dan praktis untuk dijadikan instrumen dalam pelaksanaan evaluasi penjaminan mutu sekolah, (3) pada sekolah-sekolah non RSBI, penjaminan mutu sekolah belum dilakukan secara terprogram, dan belum dilakukan oleh gugus tugas (Pokja) secara khusus, dan (4) penjaminan mutu sekolah yang dilakukan

secara internal oleh pihak sekolah belum dilakukan evaluasi secara baik, sehingga sulit diketahui tingkat keberhasilan maupun kendalanya.

2. Hasil penelitian Nuchron (2012), mengenai pengembangan model evaluasi diri sekolah menunjukkan bahwa: (1) Model Evaluasi Diri SMK Bertaraf Internasional (SMK-BI) yang telah dikembangkan memiliki kepekaan, efektivitas, akurasi, dan presisi terhadap obyek yang diteliti, dan dapat mengungkap data yang dibutuhkan; (2) model ED-SMKBI mempunyai karakteristik yang unggul yakni: komprehensif, dapat mengungkap fakta sesungguhnya apa yang terjadi di sekolah, mudah digunakan, temuan ED-SMKBI dapat digunakan sebagai evaluasi diri sekolah, efektif digunakan sekolah tanpa mengganggu proses pembelajaran yang ada, dan mendukung persiapan akreditasi sekolah dan penjaminan mutu; dan (3) implikasi dari hasil temuan ini adalah bahwa untuk menetapkan kinerja sekolah sangat tergantung pada kualitas instrumen yang digunakan, oleh karena itu instrumen yang digunakan dalam melakukan evaluasi diri dalam rangka penjaminan mutu sekolah harus memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi.
3. Hasil penelitian Wiwin Mistiani (2012), menunjukkan bahwa: (1) kurikulum PAI SMP tahun 2006 telah mampu mendorong siswa untuk mengamalkan ajaran agamanya sesuai dengan agama yang dianutnya, dan (2) kurikulum PAI SMP tahun 2006 efektif dalam membentuk akhlak mulia siswa. Adapun kendala-kendala dalam pengamalan nilai keagamaan siswa dalam kehidupan sehari-hari terutama berkaitan dengan: kurangnya kesadaran dan motivasi siswa di lingkungan keluarga, dan kurangnya dukungan sekolah.
4. Hasil penelitian Selly Rahmawati (2012), menunjukkan bahwa: (1) pendidikan karakter di SMA yang bercirikan Islam telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan pedoman pelaksanaan pendidikan karakter, dan (2) hambatan implementasi pendidikan karakter di SMA bercirikan Islam terutama disebabkan oleh kurangnya pengkondisian lingkungan sekolah, dan kurangnya pengetahuan sekolah dalam melakukan penilaian pendidikan karakter.

Berdasarkan hasil penelitian tahun kedua tersebut, maka dapat disarankan sebagai berikut.

- a. Peran pihak-pihak di luar sekolah sebagai pemberi fasilitas dalam pelaksanaan penjaminan mutu yang dilakukan oleh sekolah juga masih sangat kurang dan cenderung tidak jelas. Untuk itu, sosialisasi mengenai mekanisme dan peran pihak eksternal dalam penjaminan mutu sekolah masih harus dilanjutkan. Selain itu, untuk mendukung kegiatan sosialisasi/desiminasi tersebut juga perlu disiapkan perangkat pendukung yang berupa panduan dan instrumen evaluasi penjaminan mutu sekolah yang jelas dan mudah dipahami oleh para pelaksana penjaminan mutu di sekolah.
- b. Upaya penyiapan perangkat pendukung yang berupa mekanisme dan peran pihak eksternal dalam penjaminan mutu sekolah, telah dihasilkan dari penelitian tahun pertama. Sedangkan penyiapan perangkat panduan dan instrumen evaluasi penjaminan mutu telah dapat dihasilkan dari penelitian tahun kedua. Untuk itu, upaya sosialisasi/desiminasi mengenai mekanisme dan peran pihak eksternal dalam penjaminan mutu sekolah, panduan dan instrumen evaluasi penjaminan mutu sekolah perlu dilakukan dalam penelitian tahun ketiga penelitian ini, sehingga para pelaksana di lapangan dapat memahami mengenai mekanisme pelaksanaan penjaminan mutu, pihak-pihak pemberi fasilitas dan juga supervisi.

Hasil penelitian tahun ketiga menunjukkan sebagai berikut.

- a. Hasil penelitian tema payung tahun ketiga menunjukkan bahwa: (1) model, mekanisme atau prosedur, panduan, dan instrumen evaluasi penjaminan mutu sekolah yang telah dikembangkan valid, praktis, dan mudah dipahami oleh para pelaksana penjaminan mutu di sekolah, sehingga dapat digunakan sebagai perangkat dalam melakukan evaluasi penjaminan mutu sekolah, (2) ruang lingkup penjaminan mutu yang dilakukan di sekolah sasaran, telah mencakup komponen input (baik input peserta didik, kurikulum, pendidik, sarana dan prasarana), komponen proses (mutu manajemen sekolah, proses pembelajaran, dan kultur sekolah), komponen output baik akademik maupun non akademik, dan komponen outcomes, khususnya untuk SMK (yang mencakup: relevansi dengan kebutuhan, masa tunggu lulusan dan karir lulusan), (3) pada sekolah-sekolah eks RSBI (SMA dan SMK Eks RSBI), penjaminan mutu telah dilakukan dengan baik, terencana, dan terukur. Namun demikian, setelah tidak lagi menyangkut status

sebagai RSBI, maka terjadi penurunan intensitas dalam pelaksanaan penjaminan mutu, (4) dalam peningkatan mutu input peserta didik, sekolah juga tidak sepenuhnya mengacu pada standar mutu input untuk sekolah-sekolah RSBI, tetapi harus mengacu pada kebijakan Dinas Pendidikan, dan karena adanya berbagai keterbatasan, (5) pada sebagian besar (>80 %) SMA dan SMK Eks RSBI, penjaminan mutu tidak mengalami perubahan setelah sekolah yang bersangkutan tidak lagi berstatus sebagai RSBI. Setelah tidak lagi menyandang status sebagai RSBI, sekolah-sekolah tersebut tetap melakukan penjaminan mutu sekolah dengan mengacu pada standar ISO, dan (6) peran stakeholders eksternal (seperti: LPMP, P4-TK, dan Dinas Pendidikan) dalam melakukan penjaminan mutu sangat kurang. Demikian pula, sekolah juga belum melibatkan Perguruan Tinggi yang ada di daerah untuk ikut melakukan penjaminan mutu sekolah.

- b. Hasil penelitian Budi Santoso (2013), mengenai Pengembangan model pembelajaran *2in1* dalam meningkatkan prestasi belajar menggambar Autocad, menunjukkan bahwa: (1) model pembelajaran *2in1* yang merupakan adopsi dan modifikasi model Dick and Carry (1996) telah mampu menghasilkan model pembelajaran yang layak; (2) model pembelajaran *2in1* efektif dalam meningkatkan prestasi belajar Autocad siswa; (3) tingkat keefektifan model pembelajaran *2in1* dalam meningkatkan prestasi belajar Autocad siswa dalam kategori sedang, dengan indeks gain score sebesar  $\langle e \rangle = 0,403$ . Demikian pula, hasil uji statistik t menunjukkan bahwa model pembelajaran *2in1* telah mampu meningkatkan prestasi belajar Autocad secara signifikan.
- c. Hasil penelitian Wartoni (2013) menunjukkan bahwa: (1) kondisi (KKG) sebagai wadah dalam meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme guru dikategorikan baik, (2) kondisi sarana dan prasarana KKG dikategorikan baik dan mendukung proses pelaksanaan kegiatan KKG, (3) kondisi organisasi dikategorikan baik dan program telah berjalan dengan baik sesuai dengan tujuannya, (4) peran kelompok kerja guru (KKG) dalam meningkatkan dan mengembangkan profesional guru dikategorikan baik, dan (5) kegiatan KKG terbukti mampu meningkatkan kompetensi guru dan hasil belajar siswa meningkat.



## CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN I

Penelitian Hibah Pascasarjana Tahun I (Tahun 2011) yang berjudul: Model Evaluasi Penjaminan Mutu Sekolah ini melibatkan tiga mahasiswa S3 dan tiga mahasiswa S2, yaitu: seperti tabel berikut.

No	N A M A	PRODI	JUDUL PENELITIAN	PEMBIMBING
1	Muhammad Nasir Malik, M.T. (09702261013)	S3 PTK	Evaluasi Kompetensi Profesional Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	Prof. Soenarto, Ph.D
2	Nuchron, M.Pd. (08702261004)	S3 PTK	Pengembangan Model Evaluasi Diri di SMK-SBI di Daerah Istimewa Yogyakarta	Prof. Soenarto, Ph.D
3	Slamet Wiyono (09701261017)	S3 PEP	Model Penilaian Pembelajaran Matematika SMK RSBI	Dr. Badrun Kartowagiran
4	Ika Pranita S, Apt. (09701251002)	S2 PEP	Analisis Hasil Ujian Nasional Kimia SMA di Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.	Dr. Badrun Kartowagiran
5	Haryani, S.Pd (09701251013)	S2 PEP	Penyetaraan Horisontal Perangkat Tes Ujicoba Ujian Nasional Matematika SMA Program IPA di SMAN Kota Yogyakarta Tahun Pelajaran 2009/2010	Dr. Badrun Kartowagiran
6	Friyatmi, S.Pd (09701251016)	S2 PEP	Karakteristik Instrumen Tes dan Sistem Seleksi Siswa Baru Rintisan SMA Bertaraf Internasional di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Dr. Amat Jaedun

Sampai saat ini, kedua mahasiswa S3 sudah melaksanakan ujian proposal disertasi dan seorang mahasiswa S3 akan segera menyusul ujian proposal disertasinya. Sedangkan tiga mahasiswa S2 di atas sudah lulus semua, dengan masa studi 22 bulan.

## CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN II

Penelitian Hibah Pascasarjana Tahun II (Tahun 2012) yang berjudul: Model Evaluasi Penjaminan Mutu Sekolah ini melibatkan tiga mahasiswa S3 dan tiga mahasiswa S2, yaitu: seperti tabel berikut.

No	N A M A	PRODI	JUDUL PENELITIAN	PEMBIMBING
1	Muhammad Nasir Malik, M.T. (09702261013)	S3 PTK	Evaluasi Kompetensi Profesional Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	Prof. Soenarto, Ph.D
2	Nuchron, M.Pd. (08702261004)	S3 PTK	Pengembangan Model Evaluasi Diri di SMK-SBI di Daerah Istimewa Yogyakarta	Prof. Soenarto, Ph.D
3	Slamet Wiyono (09701261017)	S3 PEP	Model Penilaian Pembelajaran Matematika SMK RSBI	Dr. Badrun Kartowagiran
4	Wiwin Mistiani, S.Pd.I. (10701251004)	S2 PEP	Evaluasi Reflektif Kurikulum Pendidikan Agama Islam SMP Dalam Kehidupan Siswa	Dr. Badrun Kartowagiran
5	Selly Rahmawati, S.Pd. (10701251003)	S2 PEP	Evaluasi Pendidikan Karakter di SMA Berciri Islam	Dr. Badrun Kartowagiran
6	Nurhidayah, S.Pt. (10701251016)	S2 PEP	Pengembangan Tes Kecerdasan Spiritual Bagi Siswa SMA	Dr. Amat Jaedun

Sampai saat ini, satu mahasiswa S3 sudah lulus, dengan masa studi kurang dari 4 tahun, sedangkan dua mahasiswa lainnya sedang melaksanakan pengumpulan data untuk penelitian disertasinya, yang diperkirakan pada tahun ketiga mereka akan lulus. Dua orang mahasiswa S2 sudah lulus, dengan masa studi 23 bulan, sedang satu mahasiswa S2 lainnya saat ini telah selesai pengumpulan data.

### CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN III

Penelitian Hibah Pascasarjana Tahun III (Tahun 2013) yang berjudul: Model Evaluasi Penjaminan Mutu Sekolah ini melibatkan dua mahasiswa S3 dan dua mahasiswa S2, yaitu: seperti tabel berikut.

No	N A M A	PRODI	JUDUL PENELITIAN	PEMBIMBING
1	Muhammad Nasir Malik, M.T. (09702261013)	S3 PTK	Evaluasi Kompetensi Profesional Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	Prof. Soenarto, Ph.D
2	Slamet Wiyono (09701261017)	S3 PEP	Model Penilaian Pembelajaran Matematika SMK RSBI	Prof. Dr. Badrun Kartowagiran
3	Wartoni, S.Pd. (11701251017)	S2 PEP	Evaluasi Kelompok Kerja Guru (KKG) pada program bermutu dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru	Prof. Dr. Badrun Kartowagiran
4	Budi Santoso (11702259016)	S2 PTK Vokasi	Pengembangan Model Pembelajaran Two in One Untuk Meningkatkan Relevansi Lulusan dengan Kebutuhan Dunia Kerja	Dr. Amat Jaedun

Sampai saat ini, satu mahasiswa S3 sudah siap untuk mengikuti Ujian Hasil, sedangkan satu mahasiswa lainnya sedang melaksanakan pengumpulan data untuk penelitian disertasinya. Sementara itu, dua orang mahasiswa S2 yang terlibat dalam penelitian tahun ketiga ini sudah lulus, dengan masa studi 23 bulan.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Tuhan YME, yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penelitian dan laporan ini dapat selesai sesuai target waktu. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan model evaluasi penjaminan mutu sekolah yang valid dan implementatif, yang terdiri dari: (1) model dan prosedur atau mekanisme evaluasi penjaminan mutu sekolah, (2) instrumen yang valid untuk digunakan dalam evaluasi penjaminan mutu sekolah, dan (3) panduan yang praktis dan mudah dipahami oleh pelaksana penjaminan mutu sekolah.

Penelitian pada tahun pertama (tahun 2011) telah mampu mendorong percepatan tiga mahasiswa S3 melaksanakan ujian proposal disertasi, dan tiga mahasiswa S2 program pascasarjana sudah menyelesaikan studinya, dengan masa studi 22 bulan. Penelitian pada tahun kedua (tahun 2012) ini telah mampu mendorong percepatan satu mahasiswa S3 menyelesaikan studinya, mendorong dua mahasiswa S3 lainnya melaksanakan pengumpulan data disertasinya, dan dua mahasiswa S2 program pascasarjana sudah menyelesaikan studinya, dengan masa studi 23 bulan. Pada penelitian tahun ketiga (tahun 2013) ini telah mampu mendorong percepatan satu mahasiswa S3 sehingga siap menempuh ujian hasil, dan mendorong dua mahasiswa S2 program pascasarjana menyelesaikan studinya, dengan masa studi 23 bulan. Penelitian dari 16 mahasiswa tersebut dipayungi oleh penelitian ini, dan penelitian disertasi/tesis dari 16 mahasiswa tersebut merupakan tema anak payung dari penelitian ini.

Pada kesempatan ini, tim peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada Direktur Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yang telah membiayai penelitian ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Direktur Program Pascasarjana UNY yang telah memfasilitasi sejak penyusunan proposal, sampai pada pelaksanaan penelitian.

Peneliti sudah berusaha keras agar penelitian ini berkualitas, namun kenyataannya mungkin masih ada kekurangannya. Untuk itu, masukan dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan penelitian ini.

Yogyakarta, November 2013  
Tim Peneliti

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
RINGKASAN DAN <i>SUMMARY</i> .....	iii
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN I .....	ix
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN II .....	x
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN III .....	xi
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
 BAB I. PENDAHULUAN .....	 1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan Masalah .....	2
C. Roadmap Penelitian .....	2
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....	 6
A. Pengertian Mutu Sekolah .....	6
B. Penjaminan Mutu sekolah .....	10
C. Akreditasi Sekolah .....	18
D. Hasil Penelitian Tahun Pertama .....	24
E. Hasil Penelitian Tahun Kedua .....	37
F. Kerangka Berpikir .....	47
G. Pertanyaan Penelitian .....	49
 BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN TAHUN KE-II .....	 50
A. Tujuan Penelitian .....	50
B. Manfaat Penelitian .....	50

BAB IV. METODE PENELITIAN .....	52
A. Jenis Penelitian .....	52
B. Prosedur Penelitian .....	52
C. Subyek Penelitian .....	52
D. Metode Pengumpulan Data .....	54
E. Teknik Analisis Data .....	54
 BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	 55
A. Hasil Penelitian Tema Payung Tahun I .....	55
B. Hasil Penelitian Tema Payung Tahun II .....	64
C. Hasil Penelitian Tema Payung Tahun III .....	74
D. Pembahasan .....	76
 BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN .....	 80
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran-saran .....	81
C. Hasil Penelitian yang Dicapai Tahun I .....	82
D. Hasil Penelitian yang Dicapai Tahun II .....	83
E. Hasil Penelitian yang Dicapai Tahun III .....	84
 DAFTAR PUSTAKA .....	 87
 LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	 89

## DAFTAR TABEL

### Halaman

Tabel 1. Rancangan Prosedur Penelitian selama 3 tahun.....	40
--	----

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Konsep Sistem Penjaminan Mutu Akademik .....	20
Gambar 2. Model Evaluasi Penjaminan Mutu Sekolah (Model-1) .....	28
Gambar 3. Mekanisme Evaluasi Penjaminan Mutu Sekolah .....	29



## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Panduan Evaluasi Penjaminan Mutu Sekolah
- Lampiran 2. Instrumen Evaluasi Penjaminan Mutu Sekolah
- Lampiran 3. Abstrak Tesis Judul Penelitian Anak Payung Tahun III
- Lampiran 4. Berita Acara Seminar Proposal Penelitian
- Lampiran 5. Berita Acara Seminar Hasil Penelitian

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam era global seperti saat ini, pendidikan yang bermutu merupakan suatu keharusan. Oleh karena itu, upaya peningkatan mutu pendidikan merupakan hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Sehubungan dengan penjaminan mutu, pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan perlu dilakukan dalam tiga program terintegrasi yaitu evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Ketiga program tersebut merupakan bentuk penjaminan mutu pendidikan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat agar dapat memperoleh layanan dan hasil pendidikan yang sesuai dengan yang dijanjikan oleh penyelenggara pendidikan. Selain itu, evaluasi dalam rangka penjaminan mutu pendidikan diatur dalam pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yakni setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan yang dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

Tujuan akhir dari penjaminan mutu pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) yaitu tingginya kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa. Penjaminan mutu pendidikan oleh satuan atau program pendidikan ditujukan untuk memenuhi tiga tingkatan acuan mutu, yaitu: (a) Standar Pelayanan Minimal (SPM); (b) Standar Nasional Pendidikan (SNP); dan (c) Standar mutu di atas Standar Nasional Pendidikan (Standar di atas SNP). Dalam hal ini, Standar Nasional Pendidikan ditetapkan sebagai standarisasi pendidikan sebagai upaya penyamaan arah pendidikan secara nasional dan bertujuan agar tidak terjadi disparitas mutu pendidikan antara daerah yang satu dengan daerah lain.

Betapa pentingnya penjaminan mutu bagi sekolah atau satuan pendidikan, dan sudah banyak sekolah yang mencoba melakukan penjaminan mutu. Namun sayangnya, sampai saat ini belum ada model evaluasi penjaminan mutu sekolah. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu model evaluasi penjaminan mutu sekolah, yang valid, implementatif, dan mudah dipahami serta diacu oleh para pelaksana di sekolah.

## **B. Pembatasan Masalah**

Ruang lingkup penjaminan mutu sekolah, meliputi penjaminan mutu terhadap komponen-komponen sistem pendidikan, yaitu: (1) input, baik input peserta didik, input guru, tenaga kependidikan maupun sumber daya yang lain, (2) proses, baik proses manajemen sekolah maupun proses pembelajaran dan penilaian, serta pembentukan kultur sekolah, (3) produk atau hasil, terutama penjaminan terhadap kualitas *output* dan *outcomes* yang dihasilkan oleh sekolah, dan (4) penjaminan mutu sekolah sebagai suatu entitas sistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, model evaluasi penjaminan mutu sekolah itu meliputi evaluasi penjaminan mutu pada komponen input, proses, dan produk serta outcomes.

## **C. Road map Penelitian**

Judul penelitian payung ini adalah: "Model Evaluasi Penjaminan Mutu Sekolah". Pada penelitian tahun pertama, telah melibatkan 3 mahasiswa S3 dan 3 mahasiswa S2 Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta. Adapun judul tiga disertasi yang menjadi penelitian anak payung pada penelitian tahun pertama adalah: (1) Model Evaluasi Diri SMK Bertaraf Internasional, (2) Model penilaian pembelajaran Matematik di SMK RSBI, dan (3) Model Evaluasi Kinerja Profesional Guru SMK. Sedangkan tiga judul tesis yang menjadi anak payung pada penelitian tahun pertama adalah: (1) Karakteristik Instrumen Tes dan Sistem Seleksi Siswa Baru Rintisan SMA Bertaraf Internasional di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, (2) Analisis Hasil Ujian Nasional Kimia Rintisan SMA Bertaraf Internasional di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan (3) Penyetaraan Horisontal Perangkat Tes Ujicoba Ujian Nasional Matematika SMA Program IPA di SMAN Kota Yogyakarta.

Pada penelitian tahun kedua, judul tiga disertasi yang menjadi penelitian anak payung adalah tetap sama dengan judul disertasi pada penelitian tahun pertama, karena ketiga mahasiswa S-3 yang terlibat dalam penelitian ini pada tahun pertama belum lulus. Sedangkan tiga judul tesis yang menjadi anak payung pada penelitian tahun kedua adalah: (1) Evaluasi Reflektif Kurikulum Pendidikan Agama Islam SMP Dalam Kehidupan Siswa, (2) Evaluasi Pendidikan Karakter di SMA Berciri Islam, dan (3) Pengembangan Tes Kecerdasan Spiritual Bagi Siswa SMA. Pada penelitian tahun kedua, salah satu mahasiswa S-3 yang terlibat dalam penelitian ini telah berhasil lulus dengan masa studi kurang dari 4 tahun.

Pada penelitian tahun ketiga, judul dua disertasi yang menjadi penelitian anak payung pada penelitian tahun ketiga adalah: (1) Model penilaian pembelajaran Matematik di SMK RSBI, dan (2) Model Evaluasi Kinerja Profesional Guru SMK. Sedangkan dua judul tesis yang menjadi anak payung pada penelitian tahun ketiga adalah: (1) Evaluasi Kelompok Kerja Guru (KKG) pada program bermutu, dan (2) Pengembangan Model Pembelajaran *Two in One* Untuk Meningkatkan Relevansi Lulusan dengan Kebutuhan Dunia Kerja.

Kaitan antara penelitian payung dan penelitian anak payung dapat dijelaskan sebagai berikut.

Evaluasi pendidikan dapat dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal, dan ruang lingkup penjaminan mutu sekolah akan mencakup komponen input, proses, produk atau output, dan outcomes. Evaluasi terhadap pelaksanaan penjaminan mutu input siswa dapat dilakukan oleh pihak eksternal sekolah dalam bentuk evaluasi terhadap sistem seleksi penerimaan peserta didik baru. Evaluasi terhadap pelaksanaan penjaminan mutu input guru dapat dilakukan melalui penilaian kinerja guru, dan pengembangan keprofesionalan guru secara berkelanjutan, yang salah satunya dilakukan melalui Evaluasi Keefektifan Kelompok Kerja Guru (KKG) pada program bermutu.

Penilaian terhadap pelaksanaan penjaminan mutu proses dapat dilakukan melalui monitoring dan evaluasi terhadap proses manajemen sekolah, proses pembelajaran dan penilaian pembelajaran, dan pengembangan model pembelajaran yang inovatif untuk meningkatkan keefektifan pembelajaran, serta pembentukan

kultur sekolah. Evaluasi terhadap penjaminan mutu output dilakukan melalui evaluasi terhadap perangkat tes uji coba ujian nasional SMA, dan evaluasi terhadap hasil UN di SMA. Sementara itu, evaluasi terhadap penjaminan mutu *outcomes*, yang terutama dilakukan terhadap lulusan SMK, dapat dilakukan melalui evaluasi terhadap pelaksanaan studi penelusuran lulusan oleh sekolah.

Dalam penelitian ini, evaluasi terhadap pelaksanaan penjaminan mutu sekolah dilakukan oleh pihak eksternal sekolah (tim peneliti) terhadap kinerja sekolah dalam melaksanakan penjaminan mutu, baik penjaminan mutu sekolah sebagai suatu entitas maupun kinerja sekolah dalam penjaminan mutu pada masing-masing komponen sistem persekolahan, yaitu:

- a. Evaluasi terhadap pelaksanaan penjaminan mutu sekolah sebagai suatu entitas dilakukan melalui pengembangan model evaluasi diri SMK Bertaraf Internasional.
- b. Evaluasi terhadap pelaksanaan penjaminan mutu input siswa dilakukan melalui evaluasi terhadap sistem seleksi penerimaan peserta didik baru di SMA Bertaraf Internasional.
- c. Evaluasi terhadap pelaksanaan penjaminan mutu input guru dilakukan melalui evaluasi terhadap pelaksanaan penilaian kinerja profesional guru SMK, dan Evaluasi Keefektifan Kelompok Kerja Guru di tingkat Sekolah Dasar (KKG) pada program bermutu.
- d. Evaluasi terhadap penjaminan mutu proses pembelajaran dilakukan melalui: (1) evaluasi proses pembelajaran dan penilaian, (2) evaluasi terhadap proses pendidikan karakter di sekolah, dan (3) pengembangan model pembelajaran yang inovatif untuk meningkatkan keefektifan pembelajaran.
- e. Evaluasi terhadap pelaksanaan penjaminan mutu *output* atau hasil pendidikan di sekolah dilakukan melalui evaluasi mengenai kualitas (karakteristik) soal uji coba Unas dan kajian mengenai pemanfaatan hasil Unas untuk perbaikan pembelajaran.
- f. Evaluasi terhadap pelaksanaan penjaminan mutu *outcomes* dapat dilihat dari pelaksanaan penjaminan mutu *outcomes* yang dilakukan dalam bentuk kajian terhadap relevansi mutu lulusan sekolah dengan kebutuhan. Selain itu, evaluasi

penjaminan mutu terhadap outcomes juga dilakukan dalam bentuk studi kajian reflektif kurikulum Pendidikan Agama Islam yang mempunyai misi dalam pengembangan akhlak mulia dalam kehidupan siswa sehari-hari.

Dalam hal ini, informasi yang diperoleh melalui penelitian anak payung merupakan bagian dari hasil penelitian payung. Hasil penelitian anak payung berperan melakukan kajian terhadap penjaminan mutu pada masing-masing komponen model, yaitu: komponen input, proses, output atau produk, dan komponen dampak (outcomes).

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Mutu Sekolah**

Astin sebagaimana dikutip oleh Suyata (1998: 14), membedakan dua tinjauan tentang mutu sekolah. Pertama, adalah tinjauan secara tradisional atau pandangan elitisme, yang melihat mutu sekolah berdasarkan kepemilikan sumber-sumber pendidikan dan reputasi, dan keduanya saling berkaitan. Kedua, adalah tinjauan pengembangan kemampuan dasar atau pandangan *developmental*, yang sifatnya dinamik.

Sekolah yang bermutu menurut pandangan tradisional adalah sekolah yang kaya akan sumber-sumber pendidikan dan memiliki peringkat atas serta populer karena memiliki posisi akademik yang tinggi. Sedangkan pandangan dinamik, melihat sekolah yang bermutu sebagai sekolah yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi dasar peserta didik dan para tenaga kependidikan semaksimal mungkin, sebagaimana nampak pada keberhasilan sekolah dalam memberikan nilai tambah, baik yang berupa pengetahuan maupun hal-hal yang bersifat personal.

Menurut Suyata (1998: 15), pandangan tradisional lebih melihat pentingnya faktor-faktor individual dalam peningkatan mutu pendidikan, seperti kemampuan perseorangan dan motivasinya. Berdasarkan pandangan ini maka muncullah kemudian penciptaan kelas-kelas unggulan. Pandangan ini berkeyakinan bahwa dengan menciptakan individu-individu yang unggul dan kelas-kelas unggulan sebagai pusat keunggulan (*center of excellence*), maka diharapkan akan terjadi efek pengimbasan pada individu-individu atau sekolah-sekolah yang lain di sekitarnya.

Sementara itu, pandangan *developmental* menekankan pentingnya perbaikan secara keseluruhan melalui pendekatan perbaikan struktural. Pandangan ini berkeyakinan bahwa peningkatan mutu pendidikan harus dilakukan secara keseluruhan (tidak bersifat parsial), disadari, dirancang dan dilakukan oleh sekolah yang bersangkutan. Dalam hal ini, para pakar semakin menyadari bahwa peningkatan mutu pendidikan hanya akan terjadi bilamana terjadi perubahan di

tingkat sekolah dan ruang kelas, yang bermuara pada performan siswa dengan dukungan birokrasi dan masyarakat secara luas.

Pandangan *developmental* akan memberikan peluang bagi mayoritas untuk berkembang secara wajar dan natural sesuai kondisi mereka. Dalam hal ini, sekolah yang bermutu tidak sekedar dinilai dari hasil akhir yang diproses, melainkan berdasarkan hasil akhir relatif sesuai kondisi yang dimiliki dan tersedia di sekolah. Oleh karena itu, pandangan sekolah yang bermutu secara *developmental* menekankan pentingnya sekolah mengenali karakteristik awal dari input siswa dan berdasarkan pengenalan karakteristik tersebut program-program perlakuan terhadap siswa disusun.

Di Amerika Serikat, sebagian besar program peningkatan mutu sekolah mendasarkan pada konsep tentang sekolah efektif. Hal ini dapat ditunjukkan oleh diimplementasikannya hasil-hasil riset tentang sekolah efektif pada berbagai program peningkatan mutu sekolah di hampir seluruh negara bagian mulai akhir tahun 70-an sampai dengan awal tahun 80-an. Program-program tersebut antara lain: *the California State Department School Effectiveness Study* (1977), *the Development of the National Council for School Effectiveness* (1987), *the Santa Clara School Effectiveness Program* (1984), *the Michigan State Board Standards of Quality Program* (1985), dan *the National Education Association Program* (1986).

Pengertian efektif dapat dimaknai bermacam-macam sesuai sudut pandang disiplin ilmu yang digunakan. Dalam teori ekonomi, keefektifan dan efisiensi pada umumnya dikaitkan dengan proses produksi. Dalam hal ini, keefektifan diukur dengan seberapa besar *output* yang diharapkan dapat dicapai berdasarkan *input* yang ada, sedangkan efisiensi akan dapat dicapai apabila dapat digunakan *input* yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan *output* yang maksimum.

Menurut perspektif teori organisme, organisasi (sekolah) dianalogikan dengan sistem biologis dalam makhluk hidup, yang harus dapat beradaptasi dengan lingkungannya agar tetap dapat hidup. Untuk itu, dalam perspektif ini, organisasi sekolah dikatakan efektif apabila selalu mampu beradaptasi dan berinteraksi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya sehingga tetap dapat hidup. Menurut Garmston and Wellman (Tola dan Furqon, 2007: 5), sekolah yang bermutu adalah sekolah yang mampu mewujudkan apa yang disebut sebagai "*self-*



*renewing schools*" atau *"adaptive schools"*. Sementara itu, menurut O'Neill (Tola dan Furqon, 2007: 5) sekolah yang efektif adalah sekolah yang mampu mewujudkan *"learning organization"*, yaitu suatu kondisi di mana kelembagaan sekolah sebagai suatu entitas akan mampu menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapinya dan menunjukkan kapabilitasnya dalam berinovasi.

Dalam pendekatan *human relation*, keefektifan diukur berdasarkan tingkat keterlibatan dari individu-individu dalam organisasi tersebut yang disebabkan oleh terpenuhinya kepuasan. Sementara itu, dari sudut pandang teori politik organisasi, suatu organisasi dikatakan efektif manakala organisasi tersebut bersifat responsif terhadap berbagai kelompok kepentingan (*stake-holders*) eksternal. Untuk itu, organisasi yang efektif harus mampu membangun inter-dependensi diantara kelompok kepentingan tersebut karena adanya pembagian kewenangan (*power*) yang jelas.

Berdasarkan beberapa pengertian tentang sekolah efektif di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa kriteria suatu organisasi (sekolah) yang efektif, yaitu: (1) memiliki karakteristik atau kualitas *output* yang tinggi; (2) mampu beradaptasi dan memenuhi kebutuhan lingkungannya; (3) menunjukkan adanya keterlibatan yang tinggi dari semua komponen sekolah, sebagai akibat terpenuhinya kepuasan; dan (4) responsif terhadap berbagai kelompok kepentingan (*stake-holders*) dengan membangun inter-dependensi dan pembagian kewenangan yang jelas diantara kelompok-kelompok kepentingan tersebut.

Townsend (1994: 36) menyatakan bahwa keefektifan sekolah merupakan konsep yang belum memperoleh kesepakatan yang luas. Sekolah yang efektif sering didefinisikan sebagai sekolah yang dapat memenuhi kriteria ideal dari suatu sekolah. Namun, definisi lain menyatakan bahwa sekolah yang efektif adalah sekolah yang memiliki kepemimpinan yang kuat, mampu mewujudkan hubungan sekolah dengan orangtua siswa yang harmonis, melakukan pengembangan staf secara efektif, dan mampu mewujudkan iklim sekolah yang kondusif untuk pembelajaran.

Scheerens (1992: 3), menyatakan bahwa suatu sekolah disebut "efektif" apabila terdapat kesamaan atau kesesuaian antara tujuan dan pencapaiannya. Namun demikian, keefektifan bukan merupakan suatu kondisi yang sifatnya dikhotomis. Dalam arti, suatu sekolah mungkin hanya "efektif sebagian", yang berarti

bahwa sekolah tersebut hanya efektif dalam mencapai tujuan pada bidang tertentu saja (aspek tertentu), tetapi kurang efektif dalam mencapai target-target pada bidang yang lain. Sebagai misal, suatu sekolah yang efektif dalam pengembangan prestasi akademik (yang diukur dari hasil belajar siswa), mungkin kurang efektif dalam pencapaian tujuan dalam aspek sosial (yang diukur dari perasaan memiliki dan rasa suka siswa terhadap sekolah). Selain itu, aspek lain yang perlu dipertimbangkan dalam mendefinisikan sekolah efektif adalah bahwa sekolah tidak sama keefektifannya pada semua kelompok siswa. Banyak hasil penelitian menunjukkan bahwa suatu sekolah seringkali hanya efektif untuk kelompok siswa tertentu, misal: lebih efektif untuk siswa laki-laki dan kurang efektif untuk siswa perempuan, efektif untuk kelompok etnis tertentu atau untuk siswa dengan kemampuan akademik tertentu.

Dalam hal yang senada, Riddell and Brown (1991: 23) menyatakan bahwa sekolah tidak sama efektifnya bagi siswa yang berbeda latar belakang dan kemampuannya. Hasil penelitian Cuttance (Riddell & Brown, 1991: 23) menyatakan bahwa pengaruh sekolah bagi siswa yang berasal dari latar belakang sosial ekonomi rendah dan lingkungan keluarga yang kurang beruntung adalah lebih tinggi dibanding siswa yang berasal dari latar belakang keluarga yang mampu.

Sementara itu, Preedy (1993: 6) mengidentifikasi tiga konsep tentang keefektifan sekolah, yakni: (1) keefektifan sekolah, diukur berdasarkan hasil (*outcomes*) pendidikan, baik dalam bidang akademik maupun perkembangan dalam aspek personal dan sosial siswa; (2) keefektifan sekolah juga dapat dinilai berdasarkan kualitas proses pendidikan di sekolah yang bersangkutan, seperti: kultur atau etos, dan tingkat kepuasan baik yang dirasakan oleh staf, guru maupun siswa terhadap sekolah; (3) keefektifan sekolah juga dapat dimaknai sebagai kapasitas atau kemampuan sekolah untuk menyediakan *input* yang dibutuhkan untuk berlangsungnya suatu proses pendidikan yang berkualitas, seperti: kemampuan merekrut calon siswa yang berkualitas, ketersediaan dana dan sarana serta prasarana pendidikan yang memadai dan kepemilikan staf guru yang profesional.

Berdasarkan uraian tentang pengertian sekolah yang bermutu di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep atau pengertian sekolah yang bermutu pada dasarnya memang cukup variatif sesuai sudut pandang dan orientasi dari pihak-pihak yang ber-kepentingan. Namun demikian, dari beberapa pengertian tersebut dapat

dinyatakan bahwa batasan atau konsep yang diajukan oleh Preedy (1993) merupakan konsep yang cukup komprehensif, yang mencakup semua komponen dari sistem pendidikan, yang meliputi: (1) komponen input; (2) komponen proses; dan (3) komponen output atau hasil pendidikan.

## **B. Penjaminan Mutu Sekolah**

Upaya peningkatan mutu pendidikan tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan manajemen mutu pendidikan. Dalam manajemen mutu, semua fungsi manajemen yang dijalankan oleh para manajer pendidikan di sekolah (kepala sekolah) diarahkan untuk dapat memberikan kepuasan kepada para pelanggannya (*customer*), terutama kepada pelanggan eksternal, seperti: siswa, orangtua atau masyarakat pemakai lulusan. Dalam upaya memberikan kepuasan kepada pelanggan tersebut diperlukan suatu patokan atau standar tertentu sebagai kriteria, dan layanan pendidikan yang diberikan seharusnya sesuai atau jika mungkin dapat melampaui kriteria minimal tersebut. Dengan demikian, semua fungsi manajemen pendidikan diarahkan agar semua layanan pendidikan yang diberikan tersebut paling tidak memenuhi atau jika memungkinkan dapat melebihi harapan pelanggan atau *customer* yang tercermin dari kriteria minimal tersebut.

Dalam perspektif manajemen mutu, pengendalian mutu suatu produk atau layanan perlu dilakukan karena mutu dari sebagian produk yang dihasilkan atau layanan yang diberikan sangat mungkin menghadapi resiko tidak sesuai (lebih rendah) dari standar minimal yang dipersyaratkan. Dalam bidang pendidikan, logika ini pun juga dapat berlaku, di mana dari sebagian lulusan (output) yang dihasilkan atau layanan yang diberikan oleh suatu institusi pendidikan, kualitasnya mungkin lebih rendah dari standar minimal yang telah dipersyaratkan. Oleh karena itu, dalam manajemen mutu pendidikan pun diperlukan suatu upaya pengelolaan mutu dalam bentuk jaminan mutu (*quality assurance*), yang akan memberikan jaminan kepada pelanggan bahwa semua aspek yang terkait dengan layanan pendidikan pendidikan yang diberikan oleh lembaga pendidikan tersebut dapat mencapai standar mutu tertentu, sehingga output yang dihasilkan oleh lembaga atau satuan pendidikan tersebut sesuai dengan yang dijanjikan. Konsep yang terkait dengan manajemen mutu ini dikenal dengan Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*).

## 1. Ruang Lingkup Penjaminan Mutu

Dalam manajemen mutu pendidikan, pihak pengelola di sekolah seharusnya dapat menjamin terpenuhinya kepuasan masyarakat pengguna (pelanggan), yaitu dengan menjamin bahwa layanan pendidikan yang diberikan di sekolah atau institusi pendidikan tersebut adalah dapat memenuhi atau mungkin melebihi kebutuhan pelanggan, sehingga dapat dijamin bahwa output pendidikan yang akan dihasilkan dapat memenuhi atau bahkan melebihi harapan pelanggan. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, dibutuhkan empat pilar utama manajemen mutu terpadu (Arcaro, 1995), yaitu: (1) kepuasan pelanggan (*customer focus*); (2) keterlibatan/partisipasi semua pihak (*total involvement*); (3) adanya komitmen yang tinggi dari semua pihak yang terlibat; dan (4) adanya upaya peningkatan secara terus-menerus (*continuous improvement*).

Dalam penjaminan mutu pendidikan ada beberapa pendekatan yang telah berkembang, satu diantaranya adalah pendekatan menurut "*The International Standards Organization (ISO)*" dan pendekatan penjaminan mutu yang ditekankan pada mutu dalam proses penyelenggaraan pendidikan, yang mencakup komponen-komponen: siswa, kurikulum, proses belajar mengajar, evaluasi dan sebagainya.

Sementara itu, Tom Vroeijenstijn (2002) mendefinisikan penjaminan mutu (QA) dengan "*Continuous attention to reality for improvement and enhancement*" dengan tiga pertanyaan dasar :

- *Are we doing the right things?*
- *In the right way?*
- *And achieve the right goals?*

Dengan mengacu pada pendapat di atas, maka penjaminan mutu pendidikan adalah program untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi dan koreksi sebagai tindakan penyempurnaan, atau peningkatan mutu yang dilakukan secara kontinyu dan sistematis terhadap semua aspek pendidikan (sarana/prasarana, pengelolaan, kepemimpinan, maupun proses pembelajaran dan hasil) dalam rangka pencapaian standar yang telah ditetapkan.

Beberapa praktik penjaminan mutu dalam bidang pendidikan yang dapat dijadikan acuan dalam upaya penjaminan mutu pendidikan di negara kita antara lain

praktik pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di Australia, Amerika, Jerman dan di Hongkong.

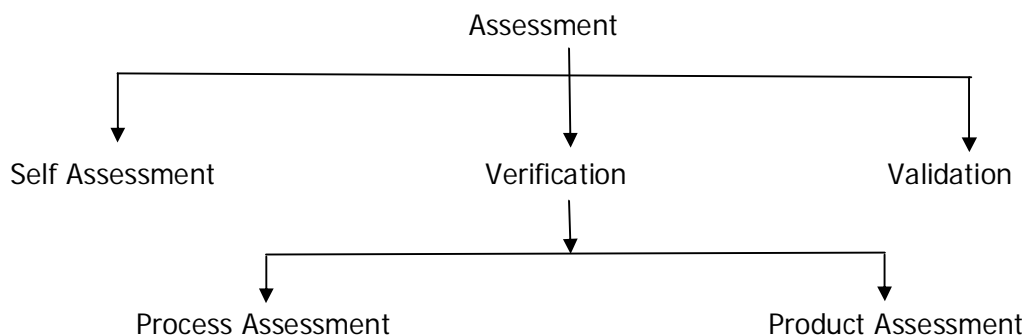
Di negara bagian New South Wales, Australia misalnya, program penjaminan mutu pendidikan ini dilaksanakan melalui *Directorate of Quality Assurance, Department of School Education NSW*, yang diarahkan pada penjaminan mutu untuk tiga komponen sistemik pendidikan, yaitu:

- a. Komponen belajar mengajar, yang meliputi: lingkungan belajar, proses belajar siswa, proses pembelajaran, perencanaan dan penerapan rencana pembelajaran, penugasan dan pelaporan serta penilaian dan refleksi.
- b. Kepemimpinan dan budaya sekolah, yang meliputi kepemimpinan kontekstual, kepemimpinan untuk perubahan, kepemimpinan inklusif, kepemimpinan untuk belajar, konteks budaya sekolah dalam rangka mengembangkan rasa memiliki, budaya belajar dan budaya peningkatan.
- c. Pengembangan manajemen sekolah, meliputi: tujuan sekolah, penerapan prioritas, perencanaan, manajemen peningkatan, dan manajemen perubahan.

Selain itu, pemerintah Australia, melalui departemen pendidikannya secara terus-menerus mengembangkan kriteria penilaian penjaminan mutu. Dalam hal ini, ada tiga kategori penilaian penjaminan mutu pendidikan, yaitu: *(1) performance against administrative requirement; (b) performance against the business requirements; and (c) performance against what could be described as service requirement* (Australian Government, Department of Education, 2003).

Di Amerika Serikat, isu-isu mengenai penjaminan mutu pendidikan terus berkembang. Sebagai missal, penjaminan mutu guru dapat diukur berdasarkan kriteria: *(1) judging basic skills*, *(2) knowledge*, dan *(3) performance*. *Judging basic skills*, menyangkut kualitas dan konfirmasi mengenai keterampilan dasar guru, *knowledge* menyangkut pengetahuan umum dan kemampuan isi materi, sedangkan *performance* berkaitan dengan penampilan guru dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, seorang guru yang baik adalah mereka yang memiliki keterampilan dasar sebagai guru, menguasai materi yang akan diajarkan dengan baik, dan mampu menyampaikan isi materi dalam proses pembelajaran dengan baik dan memikat (Frazier, 2002).

Demikian pula di Jerman, penilaian penjaminan mutu pendidikan juga sudah berkembang dengan baik. Mekanisme penilaian penjaminan mutu dimulai dari evaluasi diri oleh internal sekolah. Selanjutnya, terhadap hasil evaluasi diri tersebut dilakukan validasi. Setelah itu, dilakukan verifikasi yang meliputi penilaian terhadap aspek-aspek proses dan penilaian terhadap hasil. Mekanisme penilaian penjaminan mutu tersebut dapat digambarkan dalam bentuk QA 'V-Model'



Sementara itu, di Hongkong pelaksanaan penjaminan mutu sekolah, yang dikenal dengan nama Kerangka Kerja Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (*School Education Quality Assurance Framework*), mencakup dua kegiatan utama, yaitu penilaian yang dilakukan melalui evaluasi diri sekolah (*School Self-Evaluation*) dan pengawasan atau inspeksi terhadap pelaksanaan penjaminan mutu (*QA Inspection*). Dalam rangka pelaksanaan evaluasi diri dan inspeksi penjaminan mutu tersebut telah dikembangkan indikator-indikator kinerja yang mengacu pada tujuan sekolah. Adapun indikator-indikator kinerja yang dijadikan acuan dalam penilaian yang dilakukan dalam proses penjaminan mutu tersebut meliputi empat ranah sebagai berikut:

- a. Manajemen dan organisasi, yang meliputi aspek-aspek kepemimpinan, perencanaan dan administrasi, pengelolaan staf, pengelolaan dana, sumber daya dan pemeliharaannya, serta evaluasi diri.
- b. Pembelajaran yang meliputi: aspek-aspek kurikulum, pembelajaran, proses belajar siswa dan penilaian.
- c. Dukungan terhadap siswa dan pengembangan etos sekolah, yang meliputi aspek-aspek bimbingan, pengembangan pribadi dan sosial siswa, dukungan

bagi siswa yang memiliki kebutuhan khusus, hubungan dengan orangtua dan masyarakat, serta iklim sekolah.

- d. Prestasi belajar, yang meliputi: aspek-aspek kinerja akademik dan non akademik.

Di Indonesia, istilah penjaminan mutu dalam bidang pendidikan belum banyak dikenal. Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam rangka proses penjaminan mutu adalah melalui pelaksanaan akreditasi, baik akreditasi sekolah maupun akreditasi perguruan tinggi serta penilaian kinerja sekolah (yang telah diterapkan bagi sekolah-sekolah yang menerima block grant peningkatan mutu, baik melalui proyek Sekolah Standar Nasional (SSN), sekolah kategori mandiri, maupun sekolah-sekolah sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional atau RSBI).

Pelaksanaan akreditasi sekolah dan akreditasi perguruan tinggi pada awalnya dilakukan pada lembaga-lembaga pendidikan swasta (baik sekolah-sekolah swasta maupun perguruan tinggi swasta), yang dimaksudkan untuk memperoleh pengakuan status (Disamakan, Diakui atau Terdaftar) bagi institusi-institusi pendidikan tersebut. Namun demikian, pada perkembangan selanjutnya, pelaksanaan akreditasi tersebut telah diberlakukan baik pada institusi-institusi pendidikan swasta maupun negeri (baik di jenjang sekolah maupun perguruan tinggi), dengan perubahan status akreditasi yaitu A, B, C atau Tidak Terakreditasi.

Penilaian kinerja sekolah pada jenjang pendidikan menengah dilakukan dalam rangka untuk pembinaan sekolah. Pelaksanaan penilaian kinerja sekolah tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, pasal 19, Bab IX, yang menyatakan bahwa "Penilaian sekolah menengah dilaksanakan secara bertahap, berkesinambungan, dan bersifat terbuka, untuk memperoleh keterangan mengenai kegiatan dan kemajuan belajar siswa, pelaksanaan kurikulum, guru dan tenaga kependidikan lainnya, dan sekolah sebagai suatu keseluruhan dalam rangka pembinaan, pengembangan dan penentuan akreditasi sekolah menengah yang bersangkutan."

Sebagai misal, penilaian kinerja sekolah menengah kejuruan (SMK) yang pernah dilakukan pada tahun 1990-an didasarkan pada sembilan indikator keberhasilan SMK, yang meliputi: (1) ketercapaian tujuan sekolah; (2) organisasi dan manajemen sekolah, (3) kegiatan pembelajaran, (4) pendidik dan tenaga kependidik-

an, (5) kesiswaan, (6) fasilitas, (7) lingkungan sekolah, (8) hubungan kerjasama sekolah dengan industri, dan (9) kegiatan Unit Produksi di sekolah.

Sementara itu, penilaian kinerja sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah sebagai penerima *block grant* peningkatan mutu melalui proyek SSN, sekolah kategori mandiri maupun RSBI, dilakukan untuk menilai pemenuhan terhadap indikator kinerja kunci yang telah ditetapkan, baik Indikator Kinerja Kunci Minimal (IKKM) maupun Indikator Kinerja Kunci Tambahan (IKKT), terutama untuk sekolah-sekolah penerima block grant RSBI.

## **2. Mekanisme Penjaminan Mutu**

Dalam perspektif manajemen mutu, upaya penjaminan mutu suatu lembaga atau satuan pendidikan tertentu terutama harus dilakukan oleh pihak internal sekolah yang bersangkutan sebagai bagian dari proses manajemen mutu. Namun demikian, upaya pengawasan atau pengendalian terhadap pelaksanaan penjaminan mutu yang dilakukan oleh pihak internal sekolah tersebut dapat dilakukan juga oleh pihak eksternal sekolah. Salah satu mekanisme yang dapat ditempuh dalam rangka penjaminan mutu sekolah atau satuan pendidikan yang dilakukan oleh pihak eksternal sekolah adalah melalui akreditasi sekolah, yang selama ini dilakukan Badan Akreditasi Sekolah (BAS).

Pada prinsipnya, upaya manajemen mutu dalam rangka penjaminan mutu tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan proses akreditasi suatu sekolah atau satuan pendidikan tertentu. Penjaminan mutu (*Quality Assurance*) adalah upaya pengelolaan mutu yang dilakukan oleh pihak internal sekolah, dalam rangka untuk memberikan jaminan bahwa semua aspek yang terkait dengan layanan pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga atau satuan pendidikan tertentu dapat mencapai suatu standar mutu tertentu. Sementara itu, akreditasi sekolah atau satuan pendidikan merupakan upaya untuk memberikan pengakuan terhadap suatu institusi pendidikan (satuan pendidikan) oleh suatu lembaga (BAS) yang bersifat eksternal yang menyatakan bahwa lembaga pendidikan tersebut dapat memberikan layanan pendidikan dengan standar kualitas tertentu sesuai dengan status akreditasi yang disandangnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penjaminan mutu sekolah tersebut dilakukan oleh pihak internal sekolah, sebagai bagian dari manajemen mutu sekolah, sedangkan pengawasan atau evaluasi terhadap



pelaksanaan penjaminan mutu, yang salah satunya dilakukan dalam bentuk akreditasi, dapat dilakukan oleh pihak eksternal sekolah.

Sementara itu, Tom Vroeijenstijn (2002), menyatakan bahwa sistem penjaminan mutu mencakup penjaminan mutu internal dan penjaminan mutu eksternal. Penjaminan mutu internal dilakukan oleh pihak internal sekolah, yang merupakan tanggung jawab kepala sekolah beserta staf yang berwenang, yang terdiri dari pemantauan berkelanjutan, evaluasi oleh semua warga sekolah, evaluasi oleh lulusan maupun pengguna lulusan. Sedangkan penjaminan mutu eksternal umumnya dilakukan oleh pihak eksternal sekolah, berupa penilaian kinerja sekolah sebagai suatu entitas melalui akreditasi sekolah, penilaian prestasi akademik oleh pihak pemerintah, dalam bentuk Ujian Nasional, dan penilaian terhadap kinerja sekolah penerima *block grant* peningkatan mutu, ataupun penilaian oleh pihak-pihak eksternal sekolah lainnya.

## **1) Penjaminan Mutu Internal**

### **a) Pemantauan Berkelanjutan**

Pemantauan berkelanjutan terhadap pelaksanaan kegiatan akademik menjadi tanggungjawab pimpinan sekolah secara keseluruhan, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Wakil Kepala Sekolah atau staf yang ditunjuk. Dengan adanya pemantauan berkelanjutan ini, maka setiap saat dapat dilakukan pengecekan apakah pelaksanaan kegiatan akademik atau program sekolah sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga tindakan perbaikan dapat segera direncanakan dan dilaksanakan.

### **b) Evaluasi oleh Warga Sekolah, Lulusan dan Pengguna Lulusan**

Dalam sistem penjaminan mutu internal, semua warga sekolah, termasuk siswa, juga dapat dilibatkan dalam pemantauan berkelanjutan terhadap kegiatan akademik. Pemantauan dan evaluasi oleh guru dan tenaga kependidikan dapat dijamin melalui rapat kerja rutin, sedangkan evaluasi oleh siswa dapat berupa umpan balik yang dapat dijamin melalui pengisian kuesioner untuk menilai kinerja pembelajaran yang dilakukan oleh guru maupun kondisi iklim akademik di sekolah.

Evaluasi dari lulusan dan pengguna lulusan juga dapat dilakukan melalui kuesioner yang dikirimkan secara berkala kepada lulusan/alumni dan pengguna

lulusan. Mekanisme untuk memperoleh informasi dari lulusan dan penggunaan lulusan ini disebut sebagai studi penelusuran lulusan (*tracer study*).

### **c) Evaluasi Diri**

Kemampuan melakukan evaluasi diri merupakan indikator kematangan dari suatu institusi sekolah. Evaluasi diri merupakan suatu kegiatan yang sangat penting sehingga dianggap sebagai salah satu kegiatan utama dalam sektor sekolah seperti dikemukakan dalam Undang-Undang No. 25/2000 tentang Program Pembangunan Nasional.

Evaluasi diri oleh sekolah bukan hanya suatu proses yang harus dilakukan pada saat-saat khusus, misalnya dalam rangka menghadapi akreditasi ataupun untuk mengajukan proposal untuk memperoleh hibah tertentu. Seyogyanya, kegiatan evaluasi diri menjadi suatu kegiatan yang dilaksanakan secara rutin dalam rangka melakukan penjaminan mutu internal.

### **d) Audit Akademik Internal**

Audit akademik internal meliputi kegiatan pengumpulan informasi secara sistematis dan verifikasi untuk menilai apakah keseluruhan kegiatan akademik berjalan sebagaimana mestinya untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Untuk melakukan audit akademik internal tersebut, kepala sekolah dapat membentuk tim khusus sebagai tim audit.

## **2) Penjaminan Mutu Eksternal**

Penjaminan mutu eksternal diperlukan untuk meyakinkan komparabilitas dari berbagai sekolah, baik secara lokal maupun nasional. Selain itu penjaminan mutu secara eksternal tersebut juga dilakukan untuk meningkatkan "keyakinan" bahwa lulusan yang dihasilkan oleh suatu institusi sekolah telah memenuhi standar atau baku mutu tertentu.

### **a) Mutu Sekolah secara Kolektif**

Penjaminan mutu eksternal terhadap kinerja sekolah sebagai entitas dilakukan melalui penilaian kinerja sekolah sebagai suatu entitas melalui akreditasi sekolah,

yang dilakukan oleh badan yang memiliki otoritas, yaitu Badan Akreditasi Sekolah (BAS).

#### **b) Penguji Eksternal (*External Examiner*)**

Penjaminan mutu eksternal juga dapat dilakukan melalui penilaian prestasi akademik oleh pihak pemerintah, yaitu dalam bentuk Ujian Nasional, dan penilaian terhadap kinerja sekolah penerima *block grant* peningkatan mutu oleh tim Monev, ataupun penilaian oleh pihak-pihak eksternal sekolah lainnya. Selain itu, tim asesor yang melakukan akreditasi sekolah juga dapat dikategorikan sebagai penguji eksternal.

#### **c) Tim Kaji Ulang Eksternal (*External Reviewer*)**

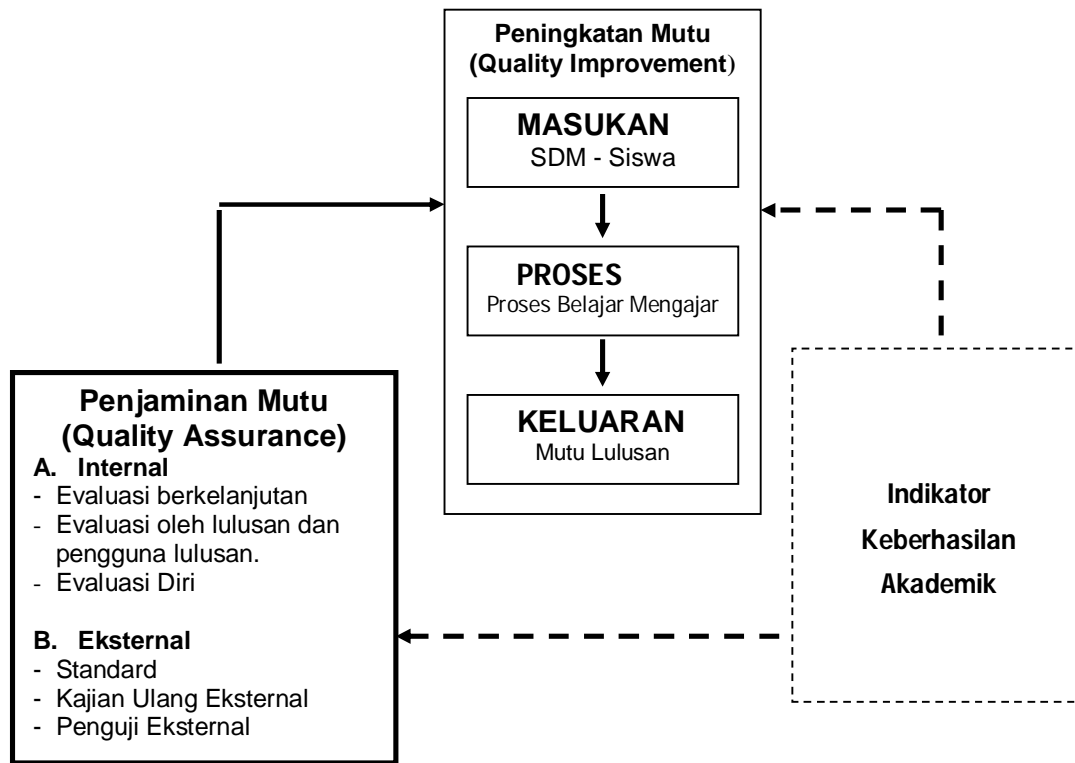
Tim Kaji Ulang Eksternal (TKUE) memiliki rincian tugas sebagai berikut:

- (1) Membaca dan menganalisis laporan evaluasi diri yang disiapkan oleh sekolah serta dokumentasi lain yang diberikan sebelum visitasi.
- (2) Mengunjungi sekolah untuk mengumpulkan dan memverifikasi bukti.
- (3) Melakukan penilaian terhadap pencapaian standard akademik serta mutu belajar mengajar.
- (4) Menyusun laporan hasil verifikasi, sebagai basis data dalam pembuatan keputusan.

### **C. Akreditasi Sekolah**

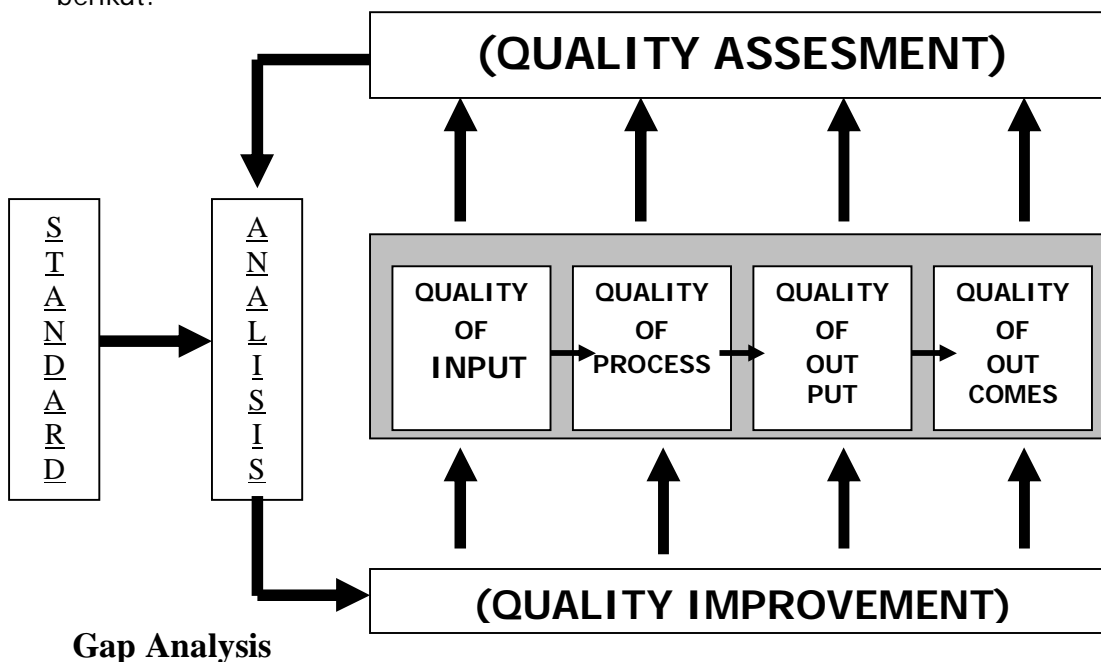
#### **1. Pengertian Akreditasi Sekolah**

Akreditasi sekolah merupakan suatu proses yang memperlihatkan pengakuan masyarakat terhadap suatu institusi pendidikan (sekolah) yang memenuhi standar tertentu (Lowrie and Roy, 2000). Di dalam proses akreditasi, suatu institusi sekolah dievaluasi dalam kaitannya dengan dasar filosofi dan tujuannya, pelayanan yang diberikannya, serta totalitas identitasnya sebagai suatu institusi pendidikan. Standar yang diacu untuk proses akreditasi haruslah merupakan nilai atau ukuran yang mampu mendorong dan memberikan arahan bagi pertumbuhan pendidikan, dan memberikan acuan untuk evaluasi diri secara berkelanjutan, serta menyediakan perangsang bagi sekolah untuk berjuang mencapai prestasi yang lebih baik.



**Gambar 1. Konsep Sistem Penjaminan Mutu Akademik**

Sementara itu, proses penjaminan mutu akademik dapat digambarkan sebagai berikut:



Akreditasi sekolah juga dapat dikatakan sebagai janji sekolah untuk menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas. Akreditasi sekolah juga memberikan keyakinan kepada siswa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya bahwa dengan basis pembiayaan tertentu, sekolah akan melaksanakan berbagai program dengan instruktur (pendidik) yang berkualitas, fasilitas dan peralatan yang memadai, kebijakan sistem rekrutmen siswa yang akuntabel dan melaksanakan semua program yang telah direncanakannya secara sungguh-sungguh.

Akreditasi pada dasarnya merupakan suatu konsep yang mengarah pada regulasi diri (*self regulation*), yang dilakukan tanpa intervensi dalam rangka pengenalan atau evaluasi diri, serta peningkatan kualitas pelayanannya secara berkelanjutan. Oleh karena itu, akreditasi sekaligus memiliki makna baik sebagai proses maupun produk. Sebagai suatu proses, akreditasi merupakan suatu bentuk pengamatan lapangan dengan mendasarkan pada suatu perangkat criteria dan prosedur tertentu dalam rangka mendorong kepada standar kualitas layanan pendidikan yang lebih baik. Sementara itu, sebagai hasil, akreditasi merupakan suatu bentuk pengakuan yang diwujudkan dalam bentuk sertifikasi atau status formal yang diakui oleh sebuah institusi atau badan akreditasi terhadap suatu sekolah yang telah memenuhi standar kualitas yang lebih baik daripada sekedar memenuhi kebutuhan (standar) minimal atau SPM yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

## **2. Tujuan dan Manfaat Akreditasi Sekolah**

Akreditasi sekolah dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan sekolah dalam rangka mencapai keunggulan yang lebih baik, relevan dan lebih efektif. Dengan demikian, akreditasi akan memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa sekolah sedang melaksanakan program dengan kualitas yang dapat diterima oleh masyarakat, dan menggunakan dana yang ada dengan semestinya.

Dalam Kepmendiknas Nomor 087/U/2002, dinyatakan bahwa pelaksanaan Akreditasi Sekolah memiliki tujuan:

- 1) Memperoleh gambaran mengenai kinerja sekolah.

- 2) Alat pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan.
- 3) Menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan.

Berkaitan dengan tujuan akreditasi tersebut, maka akreditasi suatu sekolah juga memiliki manfaat dalam rangka:

- a) Menyatakan bahwa suatu sekolah, termasuk programnya, telah memenuhi standar yang telah ditetapkan.
- b) Membantu sekolah untuk melakukan kajian dan evaluasi diri serta menentukan kebijakannya sendiri sesuai kondisi dan kebutuhannya.
- c) Membimbing calon siswa, orangtua dan masyarakat dalam mengidentifikasi sekolah yang berkualitas, yang dapat memenuhi kebutuhan individu terhadap pendidikan, termasuk mengidentifikasi sekolah-sekolah yang memiliki keunggulan atau prestasi dalam bidang tertentu yang diakui masyarakat.
- d) Melindungi sekolah dari tekanan, baik yang bersifat internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi keberlangsungan programnya.
- e) Membantu untuk perbaikan diri dan merangsang sekolah yang memiliki program yang masih lemah guna mencapai standar yang lebih tinggi.
- f) Membantu mengidentifikasi sekolah dan programnya dalam rangka pemberian bantuan dana dan investasi, baik yang berasal dari pemerintah maupun non pemerintah.

### **3. Prinsip Dasar Akreditasi Sekolah**

Akreditasi sebagai suatu sistem yang diharapkan dapat menjamin akuntabilitas publik, haruslah dilandaskan pada prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

- 1) Akreditasi harus bersifat otonom dan independen dari pengaruh yang tidak semestinya, baik dari perseorangan, organisasi maupun kelompok. Oleh karena itu, otoritas badan akreditasi harus memiliki otonomi dan akuntabilitas terhadap kualitas pendidikan.
- 2) Akreditasi haruslah terbuka terhadap akuntabilitas publik.
- 3) Akreditasi haruslah dilandaskan pada tujuan dan sasaran yang didefinisikan secara jelas.

- 4) Akreditasi harus mengakui tentang keberagaman sekolah dan programnya.
- 5) Akreditasi harus menggunakan dana secara efektif dan sepadan dengan hasil yang akan dicapai. Hubungan dan tanggung jawab sekolah dan badan akreditasi harus dirumuskan secara jelas dan jika dimungkinkan bersifat koordinatif.
- 6) Akreditasi harus menyediakan saran-saran, konsultasi dan arahan yang adil dan jujur. Akreditasi harus dapat memberikan keyakinan mengenai kualitas dan akuntabilitas pendidikan kepada public tanpa maksud negatif, dan semata-mata hanya ditujukan untuk kepentingan sekolah maupun programnya.
- 7) Akreditasi harus didasarkan pada standar yang dapat diterima oleh semua pihak.
- 8) Akreditasi harus menyediakan adanya kajian ulang secara berkala, terbuka terhadap kritik-kritik, dan peninjauan kembali kriteria, mekanisme dan prosedur-prosedurnya.

#### **4. Ruang Lingkup Akreditasi**

Untuk keperluan akreditasi sekolah diperlukan suatu standar tertentu yang dapat dicermati dan dipahami oleh sekolah dalam rangka membantu kelancaran proses akreditasi. Oleh karena itu, badan akreditasi harus menginformasikan kepada sekolah mengenai standar atau ruang lingkup yang akan akreditasi. Hal ini sekaligus juga dapat dijadikan acuan bagi sekolah dalam upaya peningkatan diri.

Pada hakikatnya, inti dari kegiatan di sekolah adalah kegiatan atau proses belajar-mengajar (dan lebih khusus lagi adalah proses belajar yang dialami oleh siswa). Untuk itu, standar atau ruang lingkup akreditasi sekolah minimal harus difokuskan pada proses belajar-mengajar (khususnya proses belajar yang dialami oleh siswa). Sementara itu, sebagai informasi tambahan di dalam proses akreditasi dimungkinkan untuk mengakreditasi sasaran atau ruang lingkup yang merupakan factor-faktor pendukung kegiatan proses belajar-mengajar, baik yang bersifat administrative maupun totalitas sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan. Dengan demikian, ruang lingkup kegiatan akreditasi sekolah akan meliputi:

1) **Proses Belajar Mengajar**, yang mencakup:

a) Visi dan Harapan terhadap Pembelajaran Siswa

Pernyataan mengenai visi sekolah menjelaskan esensi mengenai apa yang ingin dicapai oleh sekolah sebagai suatu komunitas pembelajaran. Sedangkan harapan terhadap belajar siswa merupakan tujuan dasar yang dilandaskan dan diambil dari pernyataan mengenai visi sekolah. Oleh karena itu, setiap komponen dari komunitas sekolah harus memfokuskan diri kepada pemberdayaan siswa dalam rangka mencapai harapan sekolah.

b) Kurikulum, yang mencakup rangkaian mata pelajaran, beragam kegiatan ko-kurikuler dan berbagai pengalaman belajar lainnya sebagaimana yang ditetapkan dalam program pembelajaran, yang merupakan perencanaan formal sekolah dalam rangka memenuhi visi, misi dan harapan terhadap pembelajaran siswa.

c) Proses Pembelajaran

Kualitas pembelajaran di suatu sekolah merupakan factor utama yang mempengaruhi kualitas belajar siswa, dan menghubungkan antara kurikulum, harapan belajar, dan prestasi hasil belajar siswa. Untuk itu, kegiatan pembelajaran harus didasarkan pada visi dan misi sekolah serta harapan terhadap pembelajaran siswa, dengan didukung penerapan berbagai konsep pembelajaran yang terbaik, yang ditingkatkan secara berkelanjutan sesuai kebutuhan siswa.

d) Penilaian Hasil Belajar Siswa

Penilaian hasil belajar merupakan kegiatan yang terintegrasi dengan proses pembelajaran. Tujuan penilaian adalah untuk menjelaskan kepada siswa mengenai kemajuan belajarnya, dan bagi guru berkaitan dengan efektivitas pengelolaan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukannya. Hasil penilaian ini juga dapat dimanfaatkan untuk mengkomunikasikan perkembangan dan pencapaian kompetensi siswa kepada orangtua, pejabat sekolah dan publik. Hasil penilaian pembelajaran harus dijadikan acuan untuk pengembangan strategi penyempurnaan kurikulum dan kegiatan pembelajaran secara berkesinambungan.



## **2) Komponen (Sasaran) Pendukung**

- a) Kepemimpinan dan organisasi, menggambarkan suatu keadaan mengenai bagaimana sekolah melaksanakan kepemimpinannya, mengorganisasikan dirinya, membuat keputusan dan melayani anggotanya secara sungguh-sungguh. Selain itu, administrasi sekolah harus jelas dan merefleksikan mengenai pertanggung-jawaban terhadap keputusan dan praktik yang telah mereka lakukan.
- b) Sumber Daya Sekolah, berupa segala sumber daya baik personal (guru dan tenaga kependidikan) maupun sarana dan prasarana pendukung dalam memberikan layanan kepada siswa, baik yang berupa perangkat lunak (pedoman dan berbagai layanan pendukung) maupun perangkat keras (berupa sarana dan prasarana).
- c) Sumber Daya Masyarakat, mencakup dukungan masyarakat dan partisipasi orangtua dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Selain itu, sebagai sumber daya masyarakat termasuk diantaranya mengenai dukungan lingkungan sekolah yang kondusif untuk kegiatan pembelajaran.

Secara garis besar, komponen sekolah yang dinilai dalam akreditasi sekolah menurut Kepmendiknas Nomor 087 Tahun 2002, tentang Akreditasi Sekolah meliputi: (1) kurikulum/proses belajar mengajar, (2) administrasi/manajemen sekolah, (3) organisasi/kelembagaan sekolah, (4) sarana dan prasarana, (5) ketenagaan, (6) pembiayaan, (7) peserta didik/siswa, (8) peran serta masyarakat, dan (9) lingkungan/kultur sekolah.

### **D. Hasil Penelitian Tahun Pertama**

Penelitian hibah Pascasarjana (penelitian payung) ini dilakukan selama tiga tahun. Kegiatan yang dilakukan pada tahun pertama, adalah mengkaji teori, hasil penelitian yang relevan, dan hasil penelitian mahasiswa yang terlibat dalam penelitian ini (penelitian anak payung). Hasil kajian digunakan untuk menyusun draf model penjaminan mutu sekolah yang mencakup struktur dan komponen penjaminan mutu, dan prosedur atau mekanisme penjaminan mutu sekolah.

## 1. Komponen dan Model Evaluasi Penjaminan Mutu

Dalam perspektif manajemen mutu, upaya penjaminan mutu suatu lembaga atau satuan pendidikan terutama harus dilakukan oleh pihak internal sekolah yang bersangkutan sebagai bagian dari proses manajemen mutu. Namun demikian, upaya pengawasan atau pengendalian terhadap pelaksanaan penjaminan mutu yang dilakukan oleh pihak internal sekolah tersebut dapat dilakukan juga oleh pihak eksternal sekolah. Salah satu mekanisme yang dapat ditempuh dalam rangka penjaminan mutu sekolah atau satuan pendidikan yang dilakukan oleh pihak eksternal sekolah adalah melalui akreditasi sekolah, yang selama ini dilakukan Badan Akreditasi Sekolah (BAS), dan melalui penguji eksternal, seperti: Ujian Nasional oleh pemerintah, maupun Uji Kompetensi bagi siswa SMK.

Pada prinsipnya, upaya manajemen mutu dalam rangka penjaminan mutu tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan proses akreditasi suatu sekolah atau satuan pendidikan tertentu. Penjaminan mutu (*Quality Assurance*) adalah upaya pengelolaan mutu yang dilakukan oleh pihak internal sekolah, dalam rangka untuk memberikan jaminan bahwa semua aspek yang terkait dengan layanan pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga atau satuan pendidikan tertentu dapat mencapai suatu standar mutu tertentu. Sementara itu, akreditasi sekolah atau satuan pendidikan merupakan upaya untuk memberikan pengakuan terhadap suatu institusi pendidikan (satuan pendidikan) oleh suatu lembaga (BAS) yang bersifat eksternal yang menyatakan bahwa lembaga pendidikan tersebut dapat memberikan layanan pendidikan dengan standar kualitas tertentu sesuai dengan status akreditasi yang disandangnya. Demikian pula, pengakuan pihak eksternal terhadap upaya penjaminan mutu yang dilakukan oleh pihak internal sekolah juga dapat ditempuh melalui pelibatan penguji eksternal, seperti: UN dan uji kompetensi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penjaminan mutu sekolah tersebut terutama harus dilakukan oleh pihak internal sekolah, sebagai bagian dari manajemen mutu sekolah, sedangkan pengawasan atau evaluasi terhadap pelaksanaan penjaminan mutu, dapat dilakukan oleh pihak eksternal sekolah dalam bentuk akreditasi sekolah, dan pengujian secara eksternal.

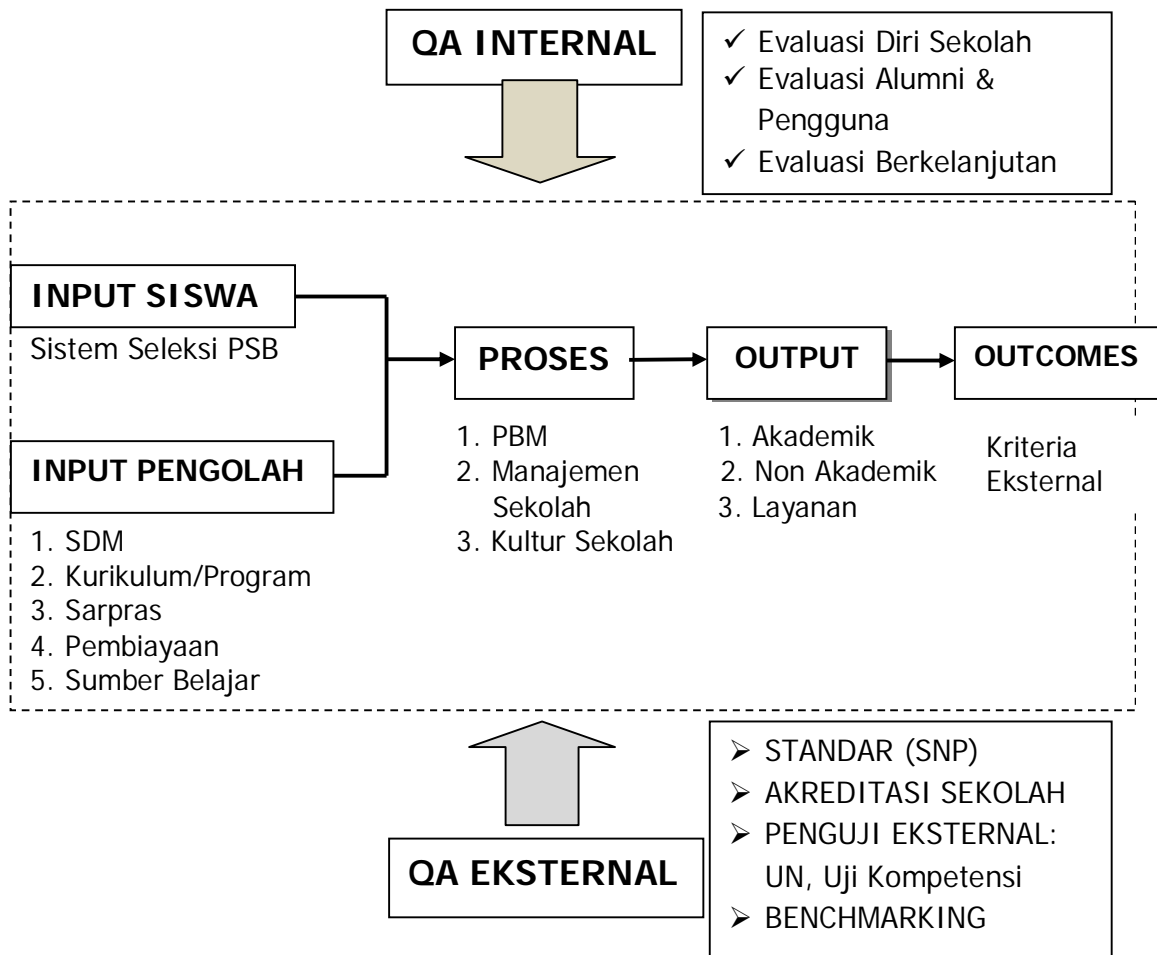
Sementara itu, Tom Vroeijenstijn (2002), menyatakan bahwa sistem penjaminan mutu mencakup penjaminan mutu internal dan penjaminan mutu

eksternal. Penjaminan mutu internal dilakukan oleh pihak internal sekolah, yang merupakan tanggung jawab kepala sekolah beserta staf yang berwenang, yang terdiri dari pemantauan berkelanjutan, evaluasi diri oleh semua warga sekolah, evaluasi oleh lulusan maupun pengguna lulusan. Sedangkan penjaminan mutu eksternal umumnya dilakukan oleh pihak eksternal sekolah, berupa penilaian kinerja sekolah sebagai suatu entitas melalui akreditasi sekolah, penilaian prestasi akademik oleh pihak pemerintah, dalam bentuk Ujian Nasional, penilaian kompetensi lulusan SMK melalui uji kompetensi, dan penilaian terhadap kinerja sekolah penerima *block grant* peningkatan mutu, ataupun penilaian oleh pihak-pihak eksternal sekolah lainnya.

Gambar 2 di halaman berikut menunjukkan bahwa penjaminan mutu dilakukan oleh pihak internal sekolah mencakup penjaminan mutu komponen input pendidikan, baik input siswa maupun input instrumental (input pengolah), penjaminan mutu komponen proses (manajemen sekolah, proses pembelajaran, dan pembentukan kultur sekolah sebagai bagian dari program peningkatan mutu sekolah), penjaminan mutu komponen output atau hasil pendidikan, baik yang terkait dengan output dalam aspek akademik maupun non-akademik, dan penjaminan mutu terhadap komponen outcomes pendidikan (terutama untuk SMK), seperti: daya serap lulusan oleh lapangan kerja, masa tunggu untuk memperoleh pekerjaan, serta kriteria eksternal lainnya.

Pada penelitian tahun I yang telah dilaksanakan pada tahun 2011, struktur model dan komponen penjaminan mutu sekolah, mencakup komponen: input siswa (yaitu sistem seleksi penerimaan peserta didik baru di SMA RSBI yang penelitiannya dilakukan oleh mahasiswa S2 PEP yang terlibat dalam penelitian ini), input guru (penilaian terhadap kinerja guru yang penelitiannya dilakukan oleh mahasiswa S3 PTK yang terlibat dalam penelitian ini), input program (yaitu melalui model evaluasi diri sekolah yang penelitiannya dilakukan oleh mahasiswa S3 PTK yang terlibat dalam penelitian hibah ini), komponen proses (yaitu melalui evaluasi serta pemanfaatan daya serap materi untuk perbaikan pembelajaran yang penelitiannya dilakukan oleh mahasiswa S2 PEP yang terlibat dalam penelitian ini), dan komponen *output* (evaluasi terhadap hasil Ujian Nasional dan evaluasi kualitas soal yang digunakan

untuk penilaian hasil belajar yang penelitiannya dilakukan oleh mahasiswa S2 PEP yang terlibat dalam penelitian ini).

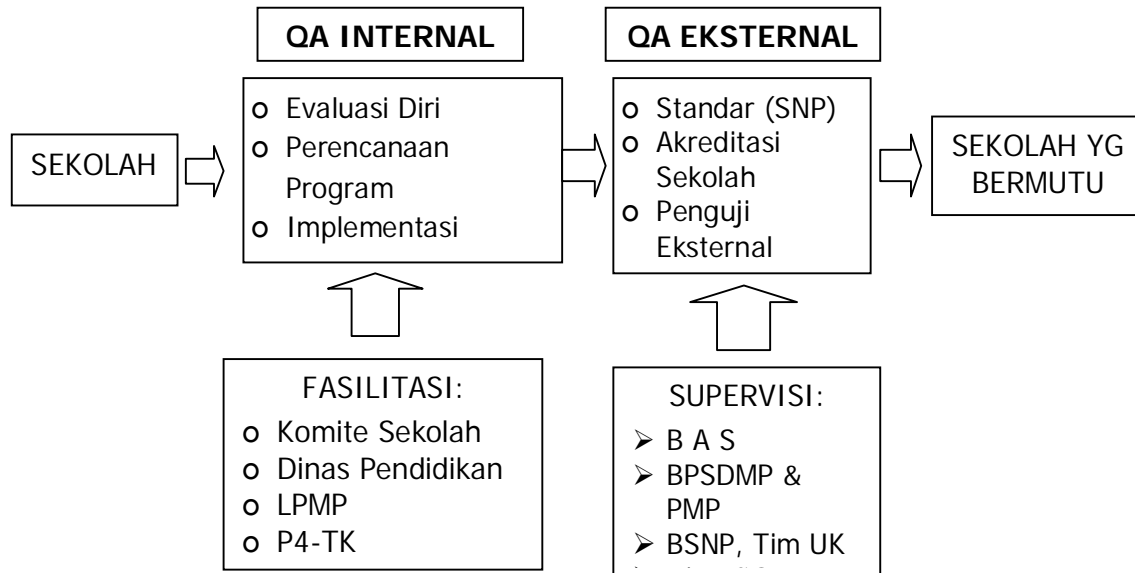


**Gambar 2. Model Evaluasi Penjaminan Mutu Sekolah (Model-1)**

## 2. Prosedur/Mekanisme Penjaminan Mutu

Selain struktur model dan komponen evaluasi penjaminan mutu, maka berdasarkan kajian teori, kajian hasil penelitian yang relevan dan kajian terhadap hasil penelitian mahasiswa yang terlibat, telah dikembangkan prosedur atau mekanisme penjaminan mutu. Mekanisme atau prosedur penjaminan mutu yang dikembangkan ini melibatkan institusi-institusi di luar sekolah yang memiliki Tupoksi maupun kewenangan untuk melakukan penjaminan mutu sekolah, yaitu: LPMP,

Dinas Pendidikan, P4-TK dan Komite Sekolah sebagai mitra sekolah. Secara visual mekanisme penjaminan mutu sekolah diilustrasikan pada Gambar 3 berikut.



Gambar 3. Mekanisme Evaluasi Penjaminan Mutu Sekolah

Pada Gambar 3 tersebut, diilustrasikan meskipun upaya penjaminan mutu sekolah harus dilakukan oleh pihak internal sekolah, sebagai bagian dari manajemen mutu, tetapi harus difasilitasi: didorong, didukung, didampingi dan disupervisi oleh institusi-institusi di luar sekolah yang memiliki Tupoksi maupun kewenangan untuk melakukan penjaminan mutu sekolah, yaitu: LPMP, Dinas Pendidikan, P4-TK dan Komite Sekolah sebagai mitra sekolah.

Hasil penelitian pada tahun pertama telah berhasil mempercepat kelulusan tiga mahasiswa S-2 Program Pascasarjana UNY, sehingga dapat memperpendek masa studi menjadi sekitar 22 bulan. Sementara itu, tiga mahasiswa S3 diharapkan dapat lulus pada tahun kedua, karena saat ini dua mahasiswa diantaranya sedang melaksanakan pengumpulan data. Hasil penelitian tiga mahasiswa S2 Program Pascasarjana UNY dalam rangka penyusunan tugas akhir Tesis, dapat dijelaskan sebagai berikut.

# **1. *FRIYATMI*: Karakteristik Instrumen Tes dan Sistem Seleksi Siswa Baru Rintisan SMA Bertaraf Internasional di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi penjaminan mutu pada aspek input pendidikan, yaitu dengan mengevaluasi sistem Seleksi Penerimaan Siswa Baru dan mengevaluasi karakteristik (kualitas) butir tes seleksi penerimaan siswa baru pada Rintisan SMA Bertaraf Internasional (RSMABI) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian ini termasuk penelitian evaluasi, yang dilakukan melalui metode deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di seluruh RSMABI di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyelenggarakan tes seleksi dalam penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2010/2011. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa: laporan pelaksanaan kegiatan seleksi, perangkat tes dan hasil tes seleksi penerimaan siswa baru, serta nilai rapor siswa pada semester 1, yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk digunakan untuk mendeskripsikan sistem seleksi penerimaan siswa baru, dan menganalisis kualitas butir soal secara kualitatif. Teknik analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk mengevaluasi kualitas butir tes seleksi dengan mendasarkan pendekatan teori klasik dan teori respon butir.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

- 1) Seleksi penerimaan siswa baru RSMABI di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk seleksi administrasi telah terlaksana 50%. Seleksi penerimaan siswa baru berdasarkan tes kemampuan akademik dan tes bahasa Inggris belum terlaksana dengan baik, karena butir soal tidak sesuai standar. Tes psikologi telah terlaksana dengan baik, namun membutuhkan biaya yang besar.
- 2) Kualitas butir soal tes seleksi penerimaan siswa baru pada RSMABI baik secara kualitatif maupun kuantitatif adalah sebagai berikut:
  - a. Kualitas butir tes seleksi secara kualitatif menunjukkan bahwa sebagian besar butir soal termasuk dalam kategori baik. Hasil telaah seluruh materi tes untuk aspek materi, bahasa, dan konstruksi telah terpenuhi lebih dari 85%.

- b. Hasil telaah butir soal SMAN 1 Kalasan secara kualitatif menunjukkan bahwa jumlah butir tes yang berkategori baik untuk bahasa Indonesia adalah sebanyak 76,7%, IPA 84%, matematika sebesar 87%, IPS sebesar 35%, dan tes bahasa Inggris sebesar 98%. Sementara itu, telaah butir soal seleksi SMAN 1 Wonosari secara kualitatif menunjukkan jumlah butir dengan kategori baik pada materi uji bahasa Indonesia adalah sebesar 95%, IPA 85%, matematika sebesar 100%, IPS 90%, dan tes bahasa Inggris sebesar 85%.
- 3) Analisis tes secara kuantitatif menunjukkan bahwa kualitas instrumen berdasarkan teori klasik ternyata hanya tes bahasa Inggris SMAN 1 Kalasan dan tes matematika SMAN 1 Wonosari yang merupakan instrumen yang reliabel. Semua butir tes memiliki rerata tingkat kesukaran sedang. Rerata daya pembeda butir tes yang tergolong baik hanya tes matematika dari kedua SMA tersebut, dan tes IPA yang digunakan oleh SMAN 1 Wonosari.
  - 4) Karakteristik butir soal berdasarkan teori respon butir memperlihatkan bahwa seluruh materi tes memiliki daya pembeda yang baik. Rerata tingkat kesukaran butir tes berkategori baik, meskipun tergolong mudah.
  - 5) Validitas prediktif seluruh tes seleksi secara bersama-sama di kedua sekolah tergolong tinggi, yang ditunjukkan oleh koefisien korelasi ganda sebesar 0,717 di SMAN 1 Kalasan, dan 0,707 di SMAN 1 Wonosari. Sumbangan komponen seleksi terhadap hasil belajar siswa SMAN 1 Kalasan adalah sebesar 52,4%, sedangkan SMAN 1 Wonosari adalah sebesar 50%. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa dari kelima jenis prediktor, maka nilai rapor dan nilai ujian nasional SMP memberikan peranan yang lebih besar dalam memprediksikan hasil belajar siswa dibandingkan skor tes seleksi.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka diajukan rekomendasi kebijakan sebagai berikut:

- 1) Kebijakan seleksi siswa baru RSMABI melalui tes seleksi hendaknya perlu dipertimbangkan kembali, karena berdasarkan bukti empiris pelaksanaan tes hanya mempunyai peranan yang rendah dalam memprediksi keberhasilan belajar siswa di SMA.
- 2) Seleksi siswa baru RSMABI di provinsi DIY akan lebih efektif dan efisien dengan melalui seleksi administrasi yang didasarkan pada nilai rapor dan nilai UN SMP

saja, karena meskipun pelaksanaan seleksi administrasi tersebut tidak membutuhkan biaya besar, namun justru mempunyai daya prediksi yang besar dalam memprediksikan keberhasilan belajar siswa di SMA.

**2. Ika Pranita Siregar: Analisis Hasil Ujian Nasional Kimia SMA di Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penjaminan mutu sekolah dalam aspek proses pembelajaran, yang dilakukan dengan mengidentifikasi: (1) daya serap materi Kimia pada Ujian Nasional (UN) SMA di Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan (2) pemanfaatan hasil daya serap materi Kimia tersebut dalam peningkatan kualitas pembelajaran.

Jenis penelitian adalah penelitian survey eksploratif yang menganalisis hasil daya serap materi Kimia pada UN SMA RSBI dan pemanfaatan hasil daya serap tersebut. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data hasil daya serap materi Kimia pada UN SMA RSBI 2009/2010 dan sumber informasi untuk pemanfaatan hasil daya serap tersebut adalah 30 guru Kimia dan 10 Kepala Sekolah SMA RSBI. Perbedaan rerata daya serap materi Kimia pada UN SMA RSBI antar kabupaten/kota dan perbedaan urutan kemampuan yang diuji yang memiliki persentase daya serap lima terendah SMA RSBI antar kabupaten/kota menggunakan analisis non parametrik dengan uji Kruskal-Wallis. Perbedaan rerata daya serap materi Kimia pada UN SMA RSBI dan non RSBI dianalisis dengan uji Mann-Whitney U. Pemanfaatan hasil daya serap dan kendalanya dianalisis dengan statistik deskriptif kuantitatif dan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pada analisis daya serap UN: a) persentase daya serap materi mata pelajaran Kimia berdasar hasil UN SMA RSBI di Provinsi DIY tahun 2009/2010 cukup tinggi yaitu 76,24% (soal paket A) dan 73,66% (soal paket B), b) persentase daya serap terendah yaitu 11,29% (soal paket A) dan 24,96% (soal paket B), c) persentase daya serap tertinggi yaitu 99,09% (soal paket A) dan 99,59% (soal paket B), d) tidak ada perbedaan secara signifikan rerata daya serap materi Kimia pada UN SMA RSBI antar kabupaten/kota baik pada soal paket A maupun B, e) ada perbedaan secara signifikan rerata daya serap materi Kimia pada



UN antar SMA RSBI dengan non RSBI baik pada soal paket A maupun B, dan f) tidak ada perbedaan secara signifikan urutan pokok bahasan yang daya serapnya lima terendah antar kabupaten/kota baik pada soal paket A maupun B. (2) pada pemanfaatan hasil daya serap menunjukkan bahwa sekolah dan guru SMA RSBI melakukan analisis dan pemanfaatan hasil daya serap UN cukup tinggi dan kendala dalam pemanfaatan hasil analisis daya serap adalah penerimaan informasi hasil UN yang tidak lengkap dan sering terlambat.

Hasil penelitian di atas memberikan implikasi bahwa:

- 1) Analisis daya serap ini memberikan gambaran bahwa rerata persentase daya serap materi Kimia pada UN SMA RSBI termasuk tinggi yaitu lebih besar dari 65%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak ada materi sulit pada soal UN Kimia. Implikasinya bagi pihak sekolah terutama Kepala Sekolah dan guru agar meningkatkan persentase daya serap materi Kimia pada UN tahun berikutnya dengan cara melakukan analisis daya serap tahun sebelumnya.
- 2) Perbedaan rerata persentase daya serap materi Kimia pada UN SMA RSBI antar kabupaten/kota memberikan gambaran bahwa perbedaan wilayah tidak mempengaruhi mutu SDM yang didasarkan pada indikator nilai UN. Implikasinya bagi pemerintah, sekolah, guru, dan siswa untuk tetap meningkatkan mutu SDM-nya walaupun wilayah berbeda dengan kecenderungan konteks dan input yang berbeda namun dapat menghasilkan *output* antar daerah/kabupaten yang tidak berbeda.
- 3) Perbedaan rerata persentase daya serap materi Kimia pada UN antar SMA RSBI dengan non RSBI memberikan gambaran bahwa konsep pengembangan SNP pada SMA RSBI tidak dapat membedakan ciri dan kualitas RSBI dengan non RSBI, selain itu dapat juga digambarkan bahwa nilai UN tidak dapat digunakan untuk membedakan SMA RSBI dan non RSBI. Implikasinya bagi pemerintah adalah melakukan evaluasi kembali terhadap konsep pengembangan RSBI yang ternyata hasilnya tidak berbeda dengan SNP.
- 4) Pemanfaatan hasil analisis daya serap meliputi penentuan materi dan metode pembelajaran berdasarkan hasil analisis daya serap. Selain itu juga dukungan, motivasi, dan monitoring Kepala Sekolah terhadap pemanfaatan hasil daya serap. Hasil evaluasi ini memberikan gambaran bahwa SMA RSBI sudah

memanfaatkan hasil analisis daya serap materi Kimia pada UN secara maksimal dalam memperbaiki proses pembelajaran berikutnya. Implikasinya bagi Kepala Sekolah, guru, dan siswa untuk lebih memanfaatkan hasil analisis daya serap sehingga proses pembelajaran dapat semakin baik yang nantinya akan menghasilkan kualitas lulusan yang semakin baik yaitu lulusan yang memiliki standar lebih tinggi daripada sekolah non RSBI.

**3. HARYANI: Penyetaraan Horisontal Perangkat Tes Ujicoba Ujian Nasional Matematika SMA Program IPA di SMAN Kota Yogyakarta Tahun Pelajaran 2009/2010.**

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi penjaminan mutu pada komponen *output* pendidikan, yaitu dengan mengevaluasi karakteristik atau kualitas butir tes yang digunakan pada ujicoba Ujian Nasional Matematika SMA program IPA tahun pelajaran 2009/2010.

Sumber data berasal dari dokumentasi lembar jawaban siswa kelas XII IPA di SMAN kota Yogyakarta yang mengikuti ujicoba Ujian Nasional Matematika IPA tahun pelajaran 2009/2010 untuk putaran 1, 2, dan 3, dengan jumlah sampel 1396. Evaluasi kualitas atau karakteristik butir tes dilakukan dengan program Iteman dan Bilog MG, sedang penyetaraan tes dilakukan dengan kurva karakteristik dari Haebera dengan desain tunggal. Analisis untuk kesetaraan meliputi: analisis varians untuk menguji kesamaan rata-rata, uji Tukey untuk uji pasangan, dan uji Levene untuk menguji homogenitas varians. Proses penyetaraan dilakukan dengan bantuan program Microsoft Excell 2007.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas tes yang digunakan pada ujicoba UN SMA IPA di SMAN kota Yogyakarta tahun pelajaran 2009/2010 adalah sebagai berikut:

- b. Hasil telaah kualitatif dapat disimpulkan bahwa tes putaran 1, 2, dan 3 yang digunakan pada ujicoba UN SMA IPA di SMAN kota Yogyakarta tahun pelajaran 2009/2010 dengan masing-masing putaran 40 item, pada aspek materi 99,2% berkategori baik karena memenuhi semua kriteria telaah dan 0,9% berkategori kurang baik karena pengecoh tidak homogen dan logis. Pada aspek konstruksi 96,7% berkategori baik karena memenuhi semua kriteria telaah dan 3,3% yang

berkategori kurang baik karena soal-soal tidak dirumuskan dengan jelas, sedang pada aspek bahasa 90% berkategori baik karena memenuhi semua kriteria telaah, 8,3% kurang baik karena tidak menggunakan bahasa yang komunikatif dan 1,7% butir tes berkategori tidak baik karena tidak menggunakan bahasa yang komunikatif dan EYD.

- c. Hasil analisis secara kuantitatif dengan pendekatan teori tes klasik, pada tes putaran pertama, 16 atau 40% berkategori baik, putaran kedua 26 atau 65% dan putaran ketiga 17 atau 16,25%. Selain itu, daya beda dan tingkat kesukaran tes putaran 1, 2, dan 3 berkategori baik. Daya beda pada putaran satu sebesar 0,398, putaran dua 0,377 dan putaran tiga 0,350, sedang rata-rata tingkat kesukaran tes putaran satu 0,398, putaran dua 0,623 dan putaran tiga 0,632. Reliabilitas tes putaran 1, 2, dan 3 berkategori baik. Reliabilitas putaran satu sebesar 0,750, putaran dua 0,845 dan putaran tiga 0,818. Jika dilihat distribusi respon, pengecoh pada tes putaran satu, dua dan putaran tiga 85,8% merupakan pengecoh efektif.
- d. Hasil analisis secara kuantitatif dengan pendekatan Teori Respons Butir, model 2 Parameter Logistik, pada tes putaran 1, sebanyak 17 atau 45% berkategori baik, rata-rata daya beda 0,513 dengan simpangan baku 0,134 dan rata-rata tingkat kesukaran 0,256 dengan simpangan baku 1,041. Pada tes putaran dua diperoleh 34 atau 85% berkategori baik, rata-rata daya beda 0,578 dengan simpangan baku 0,133 dan rata-rata tingkat kesukaran -0,700 dengan simpangan baku 0,905. Pada tes putaran tiga diperoleh 24 item atau 60% berkategori baik, rata-rata daya beda 0,584 dengan simpangan baku 0,137 dan rata-rata tingkat kesukaran -0,808 dengan simpangan baku 1,337.
- e. Secara bersama-sama tes putaran 1, 2, dan 3 tidak paralel karena mempunyai rata-rata skor dan varians yang sama. Tes putaran 1 dan putaran 2 tidak paralel dengan persamaan kesetaraan tes putaran satu (X) ke putaran dua (Y) adalah  $\theta_y = 1,5824\theta_x - 1,8653$ , demikian juga dengan tes putaran 1 dan putaran 3 juga tidak paralel dengan persamaan kesetaraan soal putaran satu (X) ke putaran tiga (Z) adalah  $\theta_z = 0,99046\theta_x - 1,2212$ .

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diambil implikasi sebagai berikut:

- 1) Secara kualitatif, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan agar dalam penyusunan soal perlu mempertimbangkan aspek bahasa, materi dan konstruksi sehingga terhindar dari kesalahan perangkat tes dalam menjalani fungsi ukurnya.
- 2) Hasil kuantitatif menunjukkan masih sedikitnya butir – butir yang berkategori baik, membawa implikasi perlu adanya perbaikan dalam penyusunan soal.
- 3) Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi guru-terkait dengan adanya informasi tentang materi – materi yang berkategori mudah, sedang dan sulit.
- 4) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rintisan pengembangan bank soal ujicoba Ujian Nasional Matematika IPA.
- 5) Hasil penelitian yang menunjukkan belum adanya kesetaraan pada soal- soal yang digunakan pada ujicoba Ujian Nasional, dapat sebagai pertimbangan bahwa dalam pembuatan soal ujicoba yang dilakukan secara bertahap perlu diperhatikan kesetaraan antar paket yang digunakan, sehingga perbaikan pembelajaran akan lebih efektif.

## **E. Hasil Penelitian Tahun Kedua**

Kegiatan yang dilakukan pada penelitian tema payung tahun kedua adalah mengembangkan panduan dan instrumen evaluasi penjaminan mutu sekolah. Draf panduan dan instrumen evaluasi penjaminan mutu sekolah yang telah dikembangkan tersebut selanjutnya divalidasi melalui *focus group discussion* (FGD), dengan mengundang para pakar dari: perguruan tinggi, asosiasi profesi, LPMP, P4-TK, dan juga para praktisi (Wakasek Urusan Penjaminan Mutu dan Pengawas Sekolah). Hasil penelitian tema payung tahun kedua dapat dideskripsikan sebagai berikut.

Pada penelitian tahun pertama telah dikembangkan model dan mekanisme atau prosedur Evaluasi Penjaminan Mutu Sekolah yang telah divalidasi melalui FGD, dan telah menghasilkan suatu model dan prosedur evaluasi penjaminan mutu sekolah sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 2 dan 3 di muka.

Pada Gambar 2 tersebut, penjaminan mutu dilakukan oleh pihak internal sekolah yang mencakup penjaminan mutu komponen input pendidikan, baik input siswa maupun input instrumental (input pengolah), penjaminan mutu komponen proses (manajemen sekolah, proses pembelajaran, dan pembentukan kultur sekolah sebagai bagian dari program peningkatan mutu sekolah), penjaminan mutu komponen output atau hasil pendidikan, baik yang terkait dengan output dalam aspek akademik maupun non-akademik, dan penjaminan mutu terhadap komponen outcomes pendidikan (khusus untuk SMK, mencakup: daya serap lulusan oleh lapangan kerja, masa tunggu untuk memperoleh pekerjaan), serta kriteria eksternal lainnya.

Pada penelitian tahun I yang telah dilaksanakan pada tahun 2011 tersebut, cakupan evaluasi terhadap komponen penjaminan mutu sekolah telah mencakup komponen-komponen: input siswa (yaitu evaluasi terhadap sistem seleksi penerimaan siswa baru di SMA RSBI), input guru (penilaian terhadap kinerja guru), input program (yaitu melalui model evaluasi diri dan akreditasi sekolah), komponen proses (yaitu melalui evaluasi serta pemanfaatan daya serap materi untuk perbaikan pembelajaran), dan komponen output (evaluasi terhadap hasil Ujian Nasional dan evaluasi kualitas soal yang digunakan untuk penilaian hasil belajar). Pada penelitian tahun kedua dan ketiga, model ini makin disempurnakan dengan mengkaji penjaminan mutu pada komponen-komponen yang lain, yang belum berhasil dikembangkan pada tahun I dan II.

Selain itu, model evaluasi terhadap pelaksanaan penjaminan mutu yang telah dilakukan oleh pihak internal sekolah ini juga dilengkapi dengan mekanisme atau prosedur pelaksanaan penjaminan mutu yang melibatkan institusi-institusi di luar sekolah yang memiliki Tupoksi maupun kewenangan untuk melakukan penjaminan mutu sekolah, yaitu: Dinas Pendidikan, P4-TK, LPMP dan Komite Sekolah sebagai mitra sekolah. Gambaran secara visual mengenai Mekanisme atau Prosedur Penjaminan Mutu Sekolah diilustrasikan pada Gambar 3 di atas.

Pada Gambar 3 tersebut, diilustrasikan meskipun upaya penjaminan mutu sekolah harus dilakukan oleh pihak internal sekolah, sebagai bagian dari manajemen mutu, tetapi harus difasilitasi: didorong, didukung, didampingi dan disupervisi oleh institusi-institusi di luar sekolah yang memiliki Tupoksi maupun kewenangan untuk

melakukan penjaminan mutu sekolah, yaitu: LPMP, Dinas Pendidikan, P4-TK dan Komite Sekolah sebagai mitra sekolah.

Pada penelitian tahun I yang telah dilakukan pada tahun 2011, cakupan evaluasi penjaminan mutu telah mencakup komponen-komponen: input siswa (sistem seleksi siswa baru), input guru (penilaian terhadap kinerja guru), input program (yaitu melalui model evaluasi diri dan akreditasi sekolah), komponen proses (yaitu melalui penerapan model asesmen pembelajaran), dan komponen output (evaluasi terhadap hasil Ujian Nasional dan evaluasi kualitas soal yang digunakan untuk penilaian hasil belajar).

Pada penelitian tahun kedua yang telah dilaksanakan pada tahun 2012, cakupan evaluasi penjaminan mutu makin diperluas yang mencakup komponen-komponen: proses (yaitu melalui pengembangan model evaluasi diri SMK Bertaraf Internasional, dan proses pendidikan karakter di sekolah), serta komponen outcomes (melalui evaluasi reflektif terhadap penerapan hasil pendidikan karakter pada kehidupan siswa sehari-hari).

## **1. Panduan Evaluasi Penjaminan Mutu Sekolah**

Dalam panduan evaluasi penjaminan mutu sekolah yang dikembangkan pada penelitian tahun kedua (yang telah dilaksanakan pada tahun 2012) ini, telah panduan yang mencakup: (a) latar belakang, (b) Komponen Penjaminan Mutu Sekolah, (c) Model Evaluasi Penjaminan Mutu Sekolah, (d) Mekanisme Evaluasi Penjaminan Mutu Sekolah, dan (e) Instrumen evaluasi penjaminan mutu sekolah.

### **a. Latar Belakang**

Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan, menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan yang dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

Upaya peningkatan mutu pendidikan tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan manajemen mutu pendidikan. Dalam manajemen mutu, semua fungsi manajemen yang dijalankan oleh para manajer pendidikan di sekolah (kepala sekolah) diarahkan untuk dapat memberikan kepuasan kepada para pelanggannya (*customer*), terutama kepada pelanggan eksternal, seperti: siswa, orangtua atau masyarakat pemakai lulusan. Dalam upaya memberikan kepuasan kepada pelanggan tersebut diperlukan suatu patokan atau standar tertentu sebagai kriteria, dan layanan pendidikan yang diberikan seharusnya sesuai atau jika mungkin dapat melampaui kriteria minimal tersebut. Dengan demikian, semua fungsi manajemen pendidikan diarahkan agar semua layanan pendidikan yang diberikan tersebut paling tidak memenuhi atau jika memungkinkan dapat melebihi harapan pelanggan atau *customer* yang tercermin dari kriteria minimal tersebut.

Oleh karena itu, dalam manajemen mutu pendidikan diperlukan suatu upaya pengelolaan mutu dalam bentuk penjaminan mutu (*quality assurance*), yang akan memberikan jaminan kepada pelanggan bahwa semua aspek yang terkait dengan layanan pendidikan yang diberikan oleh lembaga pendidikan tersebut dapat mencapai standar mutu tertentu, sehingga output yang dihasilkan oleh lembaga atau satuan pendidikan tersebut sesuai dengan yang dijanjikan.

#### **b. Komponen Penjaminan Mutu Sekolah**

Tom Vroeijenstijn (2002), mendefinisikan penjaminan mutu (QA) sebagai program untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi dan koreksi sebagai tindakan penyempurnaan, atau peningkatan mutu yang dilakukan secara kontinyu dan sistematis terhadap semua aspek pendidikan (sarana/prasarana, pengelolaan, kepemimpinan, maupun proses dan hasil pembelajaran) dalam rangka pencapaian standar yang telah ditetapkan.

Di negara bagian New South Wales, Australia, program penjaminan mutu pendidikan ini dilaksanakan melalui *Directorate of Quality Assurance, Department of School Education NSW*, yang diarahkan pada penjaminan mutu untuk tiga komponen sistemik pendidikan, yaitu: (1) komponen belajar mengajar, (2) kepemimpinan dan budaya sekolah, dan (3) pengembangan manajemen sekolah. Di Jerman, mekanisme evaluasi penjaminan mutu pendidikan dimulai dari evaluasi diri oleh internal sekolah.

Selanjutnya, terhadap hasil evaluasi diri tersebut dilakukan validasi. Setelah itu, dilakukan verifikasi yang meliputi penilaian terhadap aspek-aspek proses dan penilaian terhadap hasil.

Di Hongkong, pelaksanaan penjaminan mutu sekolah, yang dikenal dengan nama Kerangka Kerja Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (*School Education Quality Assurance Framework*), mencakup dua kegiatan utama, yaitu penilaian yang dilakukan melalui evaluasi diri sekolah (*School Self-Evaluation*) dan pengawasan atau inspeksi terhadap pelaksanaan penjaminan mutu (*QA Inspection*). Dalam rangka pelaksanaan evaluasi diri dan pengawasan terhadap penjaminan mutu sekolah, didasarkan pada indikator-indikator kinerja yang meliputi empat ranah sebagai berikut: (a) manajemen dan organisasi, (b) pembelajaran, (c) dukungan terhadap siswa dan pengembangan kultur sekolah, dan (d) prestasi belajar.

### **c. Model Evaluasi Penjaminan Mutu Sekolah**

Model penjaminan mutu yang dikembangkan dalam penelitian ini, mencakup penjaminan mutu internal dan penjaminan mutu eksternal. Penjaminan mutu internal dilakukan oleh pihak internal sekolah, yang merupakan tanggung jawab kepala sekolah beserta staf yang berwenang, yang terdiri dari pemantauan berkelanjutan, evaluasi oleh semua warga sekolah, evaluasi oleh lulusan maupun pengguna lulusan.

Sementara itu, penjaminan mutu eksternal umumnya dilakukan oleh pihak eksternal sekolah, berupa penilaian kinerja sekolah sebagai suatu entitas melalui akreditasi sekolah, penilaian prestasi akademik oleh pihak pemerintah, dalam bentuk Ujian Nasional, dan penilaian terhadap kinerja sekolah penerima *block grant* peningkatan mutu, ataupun penilaian oleh pihak-pihak eksternal sekolah lainnya.

### **d. Mekanisme Evaluasi Penjaminan Mutu Sekolah**

Dalam perspektif manajemen mutu, upaya penjaminan mutu suatu lembaga atau satuan pendidikan terutama harus dilakukan oleh pihak internal sekolah yang bersangkutan sebagai bagian dari proses manajemen mutu. Namun demikian, upaya pengawasan atau pengendalian terhadap pelaksanaan penjaminan mutu yang dilakukan oleh pihak internal sekolah tersebut dapat dilakukan juga oleh pihak eksternal sekolah. Salah satu mekanisme yang dapat ditempuh dalam rangka



penjaminan mutu sekolah atau satuan pendidikan yang dilakukan oleh pihak eksternal sekolah adalah melalui akreditasi sekolah, yang selama ini dilakukan Badan Akreditasi Sekolah (BAS), dan melalui pengujian eksternal, seperti: Ujian Nasional oleh pemerintah, maupun uji kompetensi bagi siswa SMK yang melibatkan penilai dari dunia usaha/industri.

Pada prinsipnya, upaya manajemen mutu dalam rangka penjaminan mutu tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan proses akreditasi suatu sekolah atau satuan pendidikan tertentu. Penjaminan mutu (*Quality Assurance*) adalah upaya pengelolaan mutu yang dilakukan oleh pihak internal sekolah, dalam rangka untuk memberikan jaminan bahwa semua aspek yang terkait dengan layanan pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga atau satuan pendidikan tertentu dapat mencapai suatu standar mutu tertentu. Sementara itu, akreditasi sekolah atau satuan pendidikan merupakan upaya untuk memberikan pengakuan terhadap suatu institusi pendidikan (satuan pendidikan) oleh suatu lembaga (BAS) yang bersifat eksternal yang menyatakan bahwa lembaga pendidikan tersebut dapat memberikan layanan pendidikan dengan standar kualitas tertentu sesuai dengan status akreditasi yang disandangnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penjaminan mutu sekolah tersebut dilakukan oleh pihak internal sekolah, sebagai bagian dari manajemen mutu sekolah, sedangkan pengawasan atau evaluasi terhadap pelaksanaan penjaminan mutu, yang salah satunya dilakukan dalam bentuk akreditasi, dapat dilakukan oleh pihak eksternal sekolah.

## **2. Instrumen Evaluasi Penjaminan Mutu Sekolah**

Instrumen evaluasi penjaminan mutu sekolah ini dikembangkan untuk mengumpulkan data yang terkait dengan upaya penjaminan mutu yang dilakukan oleh sekolah secara internal, sebagai bagian dari proses manajemen mutu. Instrumen evaluasi penjaminan mutu sekolah yang telah dikembangkan ini telah divalidasi melalui FGD, dengan melibatkan 9 pakar dari perguruan tinggi, LPMP, dan P4-TK, serta 9 pakar dari asosiasi profesi (HEPI, ADGVI, dan PGRI), pengawas (SMP, SMA, dan SMK) sebanyak 3 orang, dan Wakasek Urusan Penjaminan Mutu (Wakasek UPM), sebanyak 6 orang. Instrumen evaluasi penjaminan mutu sekolah terlampir.

Instrumen evaluasi penjaminan mutu sekolah yang dikembangkan ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data terkait dengan:

- 1) Keterlaksanaan program penjaminan mutu sekolah, yang mencakup semua komponen penjaminan mutu sekolah.
- 2) Ruang lingkup atau komponen penjaminan mutu, yang mencakup: input siswa, input pengolah, proses, output, dan outcomes.
- 3) Peran yang dilakukan oleh stakeholders dalam pelaksanaan penjaminan mutu sekolah secara internal.
- 4) Keberadaan program penjaminan mutu, yang telah direncanakan, dan dilaksanakan di sekolah.
- 5) Keberadaan Divisi/Pokja program penjaminan mutu sekolah.
- 6) Keberadaan standar (acuan) untuk masing-masing komponen penjaminan mutu.
- 7) Mekanisme atau prosedur penjaminan mutu internal sekolah.
- 8) Pelaksanaan evaluasi program penjaminan mutu internal sekolah.
- 9) Kendala-kendala yang dialami oleh sekolah dalam melaksanakan penjaminan mutu, dan
- 10) Saran dan harapan mengenai program penjaminan mutu sekolah.

### **3. Hasil Penelitian Anak Payung Tahun Kedua**

Hasil penelitian tahun kedua juga telah berhasil mempercepat kelulusan dua mahasiswa S-2 dan satu mahasiswa program Doktor, Program Pascasarjana UNY. Bagi mahasiswa S2, keterlibatannya dalam penelitian tema payung ini telah dapat memperpendek masa studi menjadi sekitar 23 bulan. Sedangkan satu mahasiswa S3 telah dapat lulus pada tahun kedua, dengan masa studi secara keseluruhan kurang dari 4 tahun. Sementara itu, bagi dua mahasiswa S3 yang lain saat ini mereka sedang melaksanakan pengumpulan data. Hasil penelitian dua mahasiswa S2 dan satu mahasiswa S3, Program Pascasarjana UNY dalam rangka penyusunan tugas akhir Tesis dan Disertasi, dapat dijelaskan sebagai berikut.

**a. NUCHRON: Model Evaluasi Diri Sekolah Menengah Kejuruan Bertaraf Internasional (SMK-SBI)**

Tujuan utama penelitian ini adalah: (1) mengembangkan komponen-komponen evaluasi diri yang dapat dijadikan indikator untuk mengevaluasi SMK-SBI, sebagai dasar pengembangan sekolah; (2) mengembangkan model evaluasi diri yang dapat mewadahi atau mencakup komponen-komponen untuk meningkatkan kinerja SMK-SBI; (3) menguji keefektifan model evaluasi diri yang dapat memberikan hasil evaluasi yang akurat dan informasi yang berharga untuk pengambilan keputusan, untuk perencanaan program SMK-SBI bagi pemangku kepentingan (*stake holder*).

Secara konseptual dan prosedural, model evaluasi diri yang dikembangkan pada penelitian ini mengacu pada tiga model, yakni: (1) Research and Development (R & D) yang dikembangkan Borg dan Gall; (2) Research and Development Stages (R & D) yang dikembangkan Krajewski dan Ritzman; dan (3) Research Development and Diffusion (RD & D) yang dikembangkan Havelock. Uji coba R & D dilakukan tiga tahap yakni: (1) uji coba pendahuluan diterapkan pada 10 orang subyek coba di SMKN 1 Bantul, SMKN 4 Yogyakarta, dan SMKN 5 Yogyakarta; (2) uji prototipe produk yang diterapkan pada 20 orang subjek coba di SMKN 1 Depok dan SMKN 1 Kalasan; (3) uji coba operasional yang diterapkan 30 subyek coba di SMKN 2 Pengasih, SMKN 2 Wonosari, dan SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Teknik pengumpulan data: angket, dokumentasi, observasi, dan wawancara. Validitas dan reliabilitas instrumen menggunakan penilaian para ahli (*expert judgment*), sedangkan keabsahan data kualitatif dilakukan dengan triangulasi antar sumber, tempat, dan metode. Analisis data kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif dan data kualitatif dengan model interaktif.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Model ED-SBI: (1) pengembangan komponen dan indikator evaluasi diri dilakukan melalui R&D, untuk menghasilkan komponen dan indikator kinerja sebagai inti (*core*) dari model ED-SBI dengan kajian konseptual, teoretik, dan empirik di lapangan melalui survai, FGD, dan teknik Delphi; (2) interaksi positif antar pakar pendidikan dan praktisi pendidikan dalam memberikan judgment komponen dan indikator kinerja sekolah yang terdiri dari sepuluh komponen dan tiga puluh sembilan indikator kinerja sekolah merupakan kesepakatan bersama, yang akan digunakan sebagai dasar pengembangan

instrumen ED-SBI; (3) model ED-SBI hasil pengembangan memiliki kepekaan, efektivitas, akuratsi, presisi terhadap obyek yang diteliti, dan dapat mengungkap data yang dibutuhkan; (4) model ED-SBI hasil pengembangan dapat memberikan informasi yang tepat bagi stakeholder, melalui instrumen yang digunakan dapat memberikan seluruh informasi yang berkaitan dengan implementasi komponen dan indikator kinerja sekolah; (5) tingkat koherensi instrumen ED-SBI ketika digunakan dapat memberikan informasi yang saling mendukung dan melengkapi antara data kuantitatif dan kualitatif; (6) kelebihan dibanding instrumen BAS Nas dan SNP signifikan, instrumen ED-SBI bersifat komprehensif, holistik, mudah dilakukan, efektif, mendukung persiapan akreditasi sekolah, dan penjaminan mutu sekolah.

Implikasi dari hasil temuan ini adalah bahwa untuk menetapkan kinerja sekolah sangat tergantung pada instrumen yang digunakan, apakah instrumen yang digunakan memiliki validitas dan reliabilitas tinggi. Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan dapat disimpulkan bahwa Model Evaluasi Diri SMK-SBI (ED-SBI):

1. Komponen dan indikator evaluasi diri kinerja sekolah merupakan inti (*core*) dari Model Evaluasi Diri SMK-SBI (ED-SBI). Hal ini disebabkan komponen dan indikator kinerja sekolah dikembangkan para pakar dan praktisi pendidikan berdasarkan kajian konseptual, kajian teoretik, dan pengalaman empirik di lapangan melalui survai, FGD, dan teknik Delphi.
2. Ada interaksi yang positif antar pakar pendidikan dan praktisi pendidikan dalam memberikan penilaian (*judgment*) komponen dan indikator kinerja sekolah. Proses pengembangan Model ED-SBI yang di dalamnya berisi 10 komponen dan 39 indikator kinerja sekolah merupakan kesepakatan bersama yang dikembangkan sebagai instrumen evaluasi diri SMK-SBI.
3. Model ED-SBI hasil pengembangan memiliki kepekaan yang tinggi terhadap obyek yang diteliti. Hal ini disebabkan dalam proses uji coba pendahuluan, utama, dan operasional di delapan SMK-SBI yang melibatkan 60 orang subjek coba dapat mengungkap data yang dibutuhkan.
4. Model ED-SBI hasil pengembangan dapat memberikan informasi yang tepat bagi *stakeholder* ketika digunakan untuk melihat kelebihan dan bermanfaat (*merit & worth*) peningkatan sekolah berkelanjutan. Empat jenis instrumen yang digunakan meliputi angket, dokumentasi, observasi, dan wawancara, dapat

memberikan seluruh informasi yang berkaitan dengan implementasi komponen dan indikator kinerja sekolah, termasuk yang dilakukan siswa, guru, kepala sekolah, dan komite sekolah.

5. Model ED-SBI ketika diimplementasikan untuk acuan menetapkan tingkat kinerja sekolah memiliki kecocokan (koherensi) dengan rancangan. Empat jenis instrumen yang digunakan untuk menggali data dapat memberikan informasi yang saling mendukung dan melengkapi antara data kuantitatif yang dianalisis dengan statistik deskriptif maupun data kualitatif yang dianalisis dengan metode interaktif.
6. Kelebihan ED-SBI hasil R&D dibandingkan dengan instrumen evaluasi diri yang sudah ada. Karena mempunyai karakteristik yakni: (a) komprehensif, karena komponen dan indikator mewakili hampir seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan; (b) holistik, karena dapat mengungkap fakta sesungguhnya apa yang terjadi di sekolah; (c) mudah dilakukan; (d) temuan ED-SBI dapat digunakan sebagai evaluasi diri sekolah; (e) efektif digunakan sekolah tanpa mengganggu proses pembelajaran yang ada; (f) mendukung persiapan akreditasi sekolah dan penjaminan mutu; serta (g) independen karena melibatkan komite sekolah.

**b. Wiwin Mistiani: Evaluasi Reflektif Kurikulum PAI SMP Dalam Kehidupan Siswa**

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan pengamalan nilai-nilai keagamaan yang terdapat dalam kurikulum PAI yang telah diamalkan oleh siswa SMP dalam kehidupannya, (2) mendeskripsikan perbedaan persentase jumlah siswa yang mengamalkan nilai-nilai keagamaan yang terdapat dalam kurikulum PAI antara SMP Islam dan SMP Umum, (3) mendeskripsikan efektifitas kurikulum PAI SMP tahun 2006 dalam membentuk akhlak siswa, dan (4) mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi siswa dalam mengamalkan nilai-nilai keagamaan yang terdapat dalam kurikulum PAI dalam kehidupannya.

Penelitian ini adalah penelitian evaluasi dengan menggunakan model reflektif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan campuran. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP di kabupaten Sleman. Sampel siswa dipilih menggunakan teknik *multistage* dan *proportional random sampling*, sedang jumlah siswa ditentukan

dengan menggunakan rumus Solvin. Data dikumpulkan dengan menggunakan angket, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan meliputi: (1) deskriptif kualitatif, (2) deskriptif kuantitatif, dan (3) uji beda dengan uji t tes.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) nilai-nilai keagamaan yang terdapat dalam kurikulum PAI yang terdiri dari nilai ibadah (taharah, shalat, puasa, zakat) dan akhlak (*tawaduk*, taat, *qanaah*, sabar, kerja keras, ulet, teliti, *zuhud*, *tawakal* dan adab makan/minum) telah di amalkan oleh siswa SMP dikabupaten Sleman. Nilai yang paling banyak diamalkan oleh siswa adalah nilai ibadah pada indikator pelaksanaan zakat, sedangkan yang paling sedikit adalah pelaksanaan shalat tepat pada waktunya, (2) tidak terdapat perbedaan persentase jumlah siswa yang mengamalkan nilai-nilai keagamaan antara SMP Islam dan SMP Umum/non Islam, namun jika dicermati secara terperinci pada pengamalan nilai-nilai tertentu persentase jumlah siswa SMP Islam lebih banyak mengamalkan nilai-nilai keagamaan dibandingkan siswa SMP Umum, (3) kurikulum PAI SMP tahun 2006 efektif dalam membentuk akhlak siswa, dan (4) kendala-kendala pengamalan nilai keagamaan yang terdapat dalam kurikulum PAI SMP dalam kehidupan siswa secara umum meliputi kurangnya kesadaran siswa untuk mengamalkan nilai-nilai keagamaan, kurangnya pemahaman siswa terhadap pelaksanaan nilai-nilai keagamaan, kurangnya motivasi terhadap pengamalan nilai di lingkungan keluarga, dan kurangnya dukungan sekolah dalam mengamalkan nilai keagamaan yang terdapat dalam kurikulum PAI.

### **c. *Selly Rahmawati* : Evaluasi Pendidikan Karakter di SMA Berciri Islam**

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi pendidikan karakter di SMA berciri Islam. Selain itu penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan hambatan implementasi pendidikan karakter di SMA berciri Islam.

Penelitian ini adalah penelitian *mix* kualitatif dan kuantitatif. Subjek penelitian terfokus pada siswa, guru, dan kepala sekolah SMA berciri Islam. SMA berciri Islam dalam penelitian ini difokuskan pada 3 SMA berciri islam yang berasal dari yayasan NU (SMA Ma'arif), Muhammadiyah (SMA Muhammadiyah 7), dan PIRI (SMA PIRI 2). Model evaluasi yang digunakan adalah model *Provus Discrepancy*. Penentuan subjek

penelitian dilakukan dengan teknik *purposive*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan angket. Validitas angket dilakukan dengan menggunakan validasi isi dan konstruk, sedangkan reliabilitas dengan menggunakan formula Cronbach's Alpha. Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan menggunakan *triangulasi teknik*. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan: *Pertama*, pendidikan karakter di SMA berciri Islam telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan pedoman pelaksanaan pendidikan karakter. Hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan pendidikan karakter di kelas, di luar kelas, dan pembudayaan karakternya. Pendidikan karakter dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas menggunakan pendekatan kontekstual dengan strategi pembelajaran berbasis masalah dan metode siswa aktif. Guru SMA berciri Islam juga telah melakukan penanaman nilai karakter dengan mengajarkan pemahaman tentang karakter, memotivasi agar berperilaku baik. Guru juga menjadi teladan bagi siswa dalam kedisiplinan dan mematuhi aturan. Pendidikan karakter di luar kelas juga telah dilaksanakan dengan baik yang terlihat dari usaha kepala sekolah dalam melakukan sosialisasi pendidikan karakter pada guru, orang tua siswa, dan komite sekolah. Selain itu, sekolah juga melakukan penanaman nilai-nilai karakter dengan memasukkannya dalam visi, misi, tujuan, dan aturan sekolah. Pembudayaan karakter di sekolah juga telah dilaksanakan dengan baik terlihat dari pengkondisian sekolah yang mendukung pendidikan karakter, sekolah yang menanamkan nilai-nilai religius, kedisiplinan, peduli lingkungan, peduli sosial, kejujuran, dan cinta tanah air dalam setiap kegiatan sekolah, dan sekolah juga telah melakukan kegiatan-kegiatan yang mengembangkan karakter. *Kedua*, hambatan implementasi pendidikan karakter di SMA berciri Islam adalah karena faktor siswa (jumlah siswa yang sedikit, karakteristik dan latar belakang siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu) dan faktor sekolah (minimnya pendanaan, lingkungan sekolah yang tidak kondusif, dan kurangnya pengetahuan sekolah dalam melakukan penilaian pendidikan karakter).

## **F. Kerangka Berpikir**

Penjaminan mutu (*Quality Assurance*) adalah upaya pengelolaan mutu yang dilakukan oleh pihak internal sekolah, dalam rangka untuk memberikan jaminan bahwa semua aspek yang terkait dengan layanan pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga atau satuan pendidikan tertentu dapat mencapai suatu standar mutu tertentu seperti yang telah dijanjikan. Pelaksanaan penjaminan mutu sekolah terutama harus dilakukan oleh pihak internal sekolah yang bersangkutan sebagai bagian dari proses manajemen mutu.

Ruang lingkup penjaminan mutu sekolah, meliputi penjaminan mutu terhadap komponen-komponen sistem pendidikan, yaitu: (1) input, baik input peserta didik, guru, tenaga kependidikan maupun sumber daya yang lain, (2) proses, baik proses manajemen sekolah (termasuk pengembangan kultur sekolah) maupun proses pembelajaran dan penilaian, (3) produk atau hasil, terutama penjaminan terhadap kualitas output yang dihasilkan oleh sekolah, dan penjaminan mutu sekolah sebagai suatu sistem secara keseluruhan, dan (4) *outcomes*, terutama penjaminan mutu mengenai relevansi kualitas lulusan dari suatu satuan pendidikan dengan kebutuhan.

Pengawasan atau evaluasi terhadap pelaksanaan penjaminan mutu sekolah pada umumnya dilakukan oleh pihak eksternal sekolah. Penilaian atau evaluasi terhadap kinerja sekolah sebagai suatu institusi salah satunya dilakukan dalam bentuk akreditasi, yang dilakukan oleh pihak eksternal sekolah, yaitu Badan Akreditasi Sekolah (BAS). Evaluasi terhadap pelaksanaan penjaminan mutu output atau hasil pendidikan dilakukan oleh pihak eksternal sekolah melalui penilaian hasil belajar peserta didik oleh pemerintah dalam bentuk Ujian Nasional, dan uji kompetensi terhadap lulusan SMK, yang melibatkan dunia usaha/dunia industri.

Demikian pula, evaluasi atau penilaian terhadap pelaksanaan penjaminan mutu input siswa dapat dilakukan oleh pihak eksternal sekolah dalam bentuk evaluasi terhadap sistem seleksi penerimaan peserta didik baru. Evaluasi terhadap pelaksanaan penjaminan mutu input guru dapat dilakukan melalui penilaian kinerja guru, dan evaluasi program pengembangan profesionalisme guru, sedangkan penilaian terhadap pelaksanaan penjaminan mutu proses dapat dilakukan melalui monitoring dan evaluasi proses manajemen sekolah, kualitas pembelajaran, dan penilaian pembelajaran, serta pengembangan kultur sekolah.



Dalam penelitian ini, evaluasi terhadap pelaksanaan penjaminan mutu sekolah dilakukan oleh pihak eksternal sekolah (tim peneliti) terhadap kinerja sekolah dalam melakukan penjaminan mutu, baik sebagai suatu entitas maupun penjaminan mutu pada masing-masing komponen sistem persekolahan, yaitu:

- a. Evaluasi terhadap pelaksanaan penjaminan mutu sekolah sebagai suatu entitas dilakukan melalui pengembangan model evaluasi diri SMK Bertaraf Internasional.
- b. Evaluasi terhadap pelaksanaan penjaminan mutu input siswa dilakukan melalui evaluasi terhadap sistem seleksi penerimaan peserta didik baru di SMA Bertaraf Internasional.
- c. Evaluasi terhadap pelaksanaan penjaminan mutu input guru dilakukan melalui evaluasi terhadap pelaksanaan penilaian kinerja profesional guru SMK, dan evaluasi keefektifan program pengembangan profesionalisme guru melalui kegiatan KKG pada program bermutu.
- d. Evaluasi terhadap penjaminan mutu proses pembelajaran dilakukan melalui evaluasi proses pembelajaran dan penilaian, serta evaluasi terhadap proses pendidikan karakter di sekolah. Selain itu, evaluasi penjaminan mutu proses juga dilakukan dengan melakukan kegiatan pengembangan model pembelajaran yang inovatif dalam rangka meningkatkan keefektifan pembelajaran.
- e. Evaluasi terhadap pelaksanaan penjaminan mutu *output* atau hasil pendidikan di sekolah dilakukan melalui evaluasi mengenai kualitas (karakteristik) soal uji coba Unas dan kajian mengenai pemanfaatan hasil Unas untuk perbaikan pembelajaran.
- f. Evaluasi terhadap pelaksanaan penjaminan mutu *outcomes* dapat dilihat dari pelaksanaan penjaminan mutu *outcomes* yang dilakukan dalam bentuk kajian terhadap relevansi mutu lulusan sekolah dengan kebutuhan. Selain itu, evaluasi penjaminan mutu terhadap outcomes juga dilakukan dalam bentuk studi kajian reflektif kurikulum Pendidikan Agama Islam yang mempunyai misi dalam pengembangan akhlak mulia dalam kehidupan siswa sehari-hari.

## **G. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir di atas, maka dapat diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah model yang sesuai untuk melakukan evaluasi penjaminan mutu yang dilakukan oleh sekolah?
2. Bagaimanakah mekanisme atau prosedur yang tepat dan implementatif untuk melakukan evaluasi penjaminan mutu yang dilakukan oleh sekolah?
3. Seperti apakah instrumen yang valid dan mudah digunakan untuk melakukan evaluasi penjaminan mutu yang dilakukan oleh sekolah?
4. Bagaimanakah model panduan yang sesuai dan mudah dipahami oleh para pelaksana penjaminan mutu di sekolah dalam melakukan evaluasi penjaminan mutu yang dilakukan oleh sekolah?

### **BAB III**

## **TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **A. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan model evaluasi penjaminan mutu sekolah yang valid dan implementatif. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan model evaluasi penjaminan mutu sekolah mencakup empat komponen, yaitu: struktur dan komponen model, prosedur atau mekanisme, instrumen, dan panduan evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu sekolah. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menghasilkan: (1) struktur dan komponen model, (2) prosedur atau mekanisme evaluasi, (3) instrumen, dan (4) panduan pelaksanaan evaluasi penjaminan mutu sekolah.

Secara spesifik, penelitian tahun ketiga adalah untuk melakukan desiminasi model evaluasi penjaminan mutu sekolah yang telah berhasil dikembangkan pada penelitian tahun pertama dan tahun kedua. Kegiatan desiminasi hasil penelitian ini dilakukan dengan: (a) pemetaan pelaksanaan penjaminan mutu yang dilakukan di sekolah-sekolah sasaran (SMA dan SMK di D.I. Yogyakarta), dan (2) penilaian ketepatan model, mekanisme dan instrumen evaluasi penjaminan mutu yang telah dikembangkan melalui uji pengguna.

### **B. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang dilaksanakan selama tiga tahun. Secara rinci, tahapan penelitian ini dan manfaat untuk setiap tahapan penelitian adalah sebagai berikut.

Penelitian tahun pertama, yang telah dilaksanakan pada tahun 2011 adalah untuk mengkaji model evaluasi penjaminan mutu sekolah yang sudah ada (*existing models*) atau mengkaji teori dan hasil penelitian relevan yang sudah ada, mengembangkan draf model (yang terdiri dari struktur dan komponen model), dan mengembangkan prosedur atau mekanisme evaluasi penjaminan mutu sekolah, menyelenggarakan FGD untuk membahas draf model dan prosedur atau mekanisme evaluasi penjaminan mutu, dan melakukan revisi draf model serta prosedur evaluasi penjaminan mutu sekolah. Pada penelitian tahun pertama, telah dihasilkan model dan prosedur atau mekanisme evaluasi penjaminan mutu sekolah yang telah

tervalidasi berdasarkan hasil FGD yang melibatkan 12 pakar dari perguruan tinggi dan LPMP, asosiasi profesi, yaitu: Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia (HEPI), Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI), dan ADGVI.

Penelitian tahun kedua, adalah untuk mengembangkan panduan penggunaan model dan instrumen evaluasi penjaminan mutu sekolah, menyelenggarakan FGD untuk membahas draf panduan dan instrumen, dan merevisi draf panduan serta instrumen evaluasi penjaminan mutu sekolah. Pada tahun kedua, peserta FGD adalah 9 pakar dari perguruan tinggi, LPMP, dan P4-TK, serta 9 pakar dari asosiasi profesi (HEPI, ADGVI, dan PGRI), pengawas (SMP, SMA, dan SMK) sebanyak 3 orang, dan Wakasek bidang Penjaminan Mutu (UPM), sebanyak 6 orang. Adapun materi yang didiskusikan adalah panduan penggunaan dan instrumen evaluasi penjaminan mutu sekolah.

Hasil yang telah dicapai pada penelitian tahun kedua adalah tersusunnya panduan dan instrumen evaluasi penjaminan mutu sekolah yang sudah tervalidasi berdasarkan hasil FGD dengan melibatkan 27 pakar, dari perguruan tinggi, LPMP, dan P4-TK, serta pakar dari asosiasi profesi (HEPI, ADGVI, dan PGRI), pengawas (SMP, SMA, dan SMK), dan Wakasek bidang Penjaminan Mutu (UPM) di SMA dan SMK. Dengan demikian, diharapkan panduan dan instrumen evaluasi penjaminan mutu sekolah yang telah disusun tersebut adalah valid dan sekaligus juga implementatif.

Penelitian tahun ketiga, adalah tahapan diseminasi model yang telah berhasil dikembangkan pada penelitian tahun pertama dan kedua. Kegiatan diseminasi hasil penelitian ini dilakukan dengan: (a) pemetaan atau evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu yang dilakukan di sekolah-sekolah sasaran (SMA dan SMK di D.I. Yogyakarta), dan (2) uji pengguna mengenai ketepatan model, mekanisme dan instrumen evaluasi penjaminan mutu yang telah dikembangkan pada penelitian tahun pertama dan kedua. Pada tahun ketiga, uji pengguna terhadap model dan instrumen evaluasi penjaminan mutu sekolah dilakukan dengan responden Wakasek Urusan Penjaminan Mutu atau ketua Pokja Penjaminan mutu di SMK dan SMA di D.I. Yogyakarta. Hasil yang diharapkan dari penelitian tahun ketiga adalah terwujudnya model dan perangkat implementasi model (yang meliputi: prosedur atau mekanisme, instrumen dan panduan) yang valid dan implementatif, serta dapat diterapkan oleh para praktisi di lapangan.

## **BAB IV**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian riset dan pengembangan (R & D), yang dilakukan selama tiga (3) tahun. Penelitian ini diawali dengan pengkajian pustaka dan hasil penelitian yang relevan, untuk mengembangkan draf model, prosedur, panduan dan instrumen evaluasi penjaminan mutu sekolah, pelaksanaan FGD dan uji coba, dan diakhiri dengan revisi serta desiminasi model. Secara lengkap, kegiatan penelitian selama tiga tahun ini dapat dilihat pada prosedur penelitian berikut.

#### **B. Prosedur Penelitian**

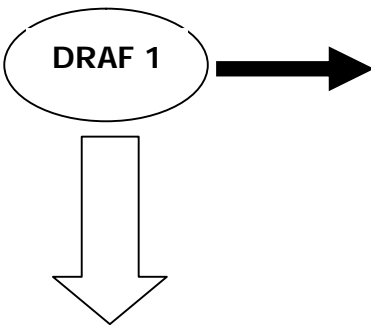
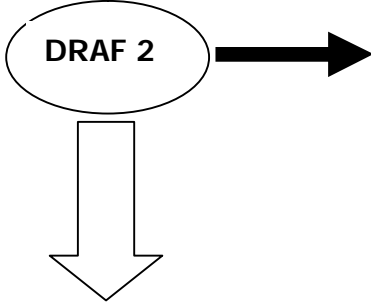
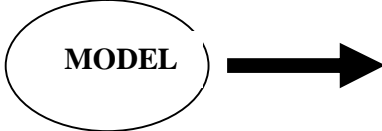
Penelitian tahun pertama yang telah dilaksanakan pada tahun 2011, adalah melakukan kajian teori dan hasil penelitian yang relevan, menyusun draf model dan mekanisme atau prosedur evaluasi penjaminan mutu sekolah, melakukan FGD untuk melakukan validasi draf model dan mekanisme, dan merevisi draf model serta prosedur evaluasi penjaminan mutu sekolah. Pada penelitian tahun kedua yang telah dilaksanakan pada tahun 2012, adalah mengembangkan panduan penggunaan model yang telah dikembangkan pada penelitian tahun pertama dan instrumen evaluasi penjaminan mutu sekolah, menyelenggarakan FGD untuk melakukan validasi terhadap draf panduan dan instrumen, dan merevisi draf panduan serta instrumen. Pada penelitian tahun ketiga, dilakukan diseminasi model evaluasi penjaminan mutu sekolah (yang mencakup prosedur, instrumen, dan panduan penggunaan model), menerapkan instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan penjaminan mutu yang dilakukan di sekolah, dan merevisi sehingga menjadi model evaluasi penjaminan mutu sekolah yang final. Secara figural, prosedur penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1 di halaman berikut.

#### **C. Subyek Penelitian**

Responden yang dilibatkan dalam FGD tahun pertama adalah 10 pakar dari perguruan tinggi dan LPMP, pakar dari berbagai asosiasi profesi pendidikan, yaitu HEPI, ISPI, dan ADGVI. Pada tahun kedua, peserta FGD adalah 9 pakar dari

perguruan tinggi, LPMP, dan P4-TK, serta 9 pakar dari asosiasi profesi (HEPI, ADGVI, dan PGRI), pengawas (SMP, SMA, dan SMK) sebanyak 3 orang, dan Wakasek bidang Penjaminan Mutu (UPM), sebanyak 6 orang. Sementara itu, pada penelitian tahun ketiga model didesiminasikan melalui uji pengguna, yang dilakukan melalui FGD dengan responden Wakasek Urusan Penjaminan Mutu (Wakasek UPM) dari 10 SMA dan 10 SMK di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, pada penelitian tahun ketiga ini juga dilakukan penggunaan instrumen evaluasi penjaminan mutu untuk melakukan evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu pada 20 sekolah sasaran.

**Tabel 1. Prosedur penelitian selama 3 tahun**

KEGIATAN	PRODUK
 <p><b>DRAF 1</b></p>	<p><b>Tahun ke I</b></p> <p>Mengkaji teori dan hasil penelitian yang relevan, kemudian menyusun draf model dan prosedur atau mekanisme evaluasi penjaminan mutu sekolah. Draft model dan prosedur ini divalidasi melalui FGD. Selanjutnya, draf model dan prosedur ini setelah direvisi diberi nama Model 1.</p>
 <p><b>DRAF 2</b></p>	<p><b>Tahun ke II</b></p> <p>Mengembangkan panduan penggunaan model, dan menyusun instrumen evaluasi penjaminan mutu sekolah, menyelenggarakan FGD untuk memvalidasi draf panduan dan instrumen, dan merevisi draf panduan serta instrumen. Gabungan antara panduan dan model 1 disebut dengan Model 2</p>
 <p><b>MODEL</b></p>	<p><b>Tahun ke III</b></p> <p>Diseminasi Model 2 (yang terdiri dari prosedur, instrumen, dan panduan) melalui uji pengguna, dan penerapan instrumen untuk melakukan evaluasi penjaminan mutu pada sekolah sasaran, serta merevisinya sehingga menjadi model evaluasi penjaminan mutu yang final.</p>

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data pada penelitian pada tahun pertama ini dilakukan melalui metode diskusi kelompok terfokus atau *Focus Group Discussion* (FGD). Pada saat FGD, para pakar diberi draf model dan mekanisme evaluasi penjaminan mutu sekolah, kemudian mereka diminta untuk mendiskusikan dengan dipandu oleh peneliti. Peserta FGD ini adalah 10 para pakar yang berasal dari perguruan tinggi dan LPMP, berbagai asosiasi profesi pendidikan, yaitu: HEPI, ISPI, dan ADGVI. Setelah direvisi, draf model dan prosedur atau mekanisme evaluasi penjaminan mutu sekolah tersebut diberi nama Model-1.

Pada penelitian tahun kedua, pengumpulan data dilakukan melalui FGD dengan melibatkan pakar dari perguruan tinggi, LPMP, dan P4-TK, pakar dari asosiasi profesi (HEPI, ADGVI, dan PGRI), dan para praktisi yang terdiri dari pengawas (SMA, dan SMK), dan Wakasek Urusan Penjaminan Mutu (Wakasek UPM). Pada saat FGD, para pakar dan praktisi tersebut diberi draf panduan dan instrumen evaluasi penjaminan mutu sekolah, kemudian mereka diminta untuk mendiskusikan dengan dipandu oleh peneliti. Setelah direvisi, model dan mekanisme evaluasi penjaminan mutu sekolah, yang telah dilengkapi dengan panduan dan instrumen evaluasi penjaminan mutu sekolah tersebut diberi nama Model-2.

Pada penelitian tahun ketiga, model didesiminasikan dengan melalui uji pengguna. Uji pengguna tersebut dilakukan melalui FGD dengan mengundang para praktisi penjaminan mutu di sekolah, yaitu Wakasek Urusan Penjaminan Mutu dari 10 SMA, Wakasek UPM dari 10 SMK di D.I. Yogyakarta. Selain itu, pada penelitian tahun ketiga ini juga dilakukan penerapan instrumen untuk memetakan (mengevaluasi) pelaksanaan penjaminan mutu yang dilakukan di 20 sekolah sasaran.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Teknik deskriptif kuantitatif digunakan untuk mendeskripsikan masukan dari responden yang hadir pada acara FGD, yang bersifat kuantitatif. Sementara itu, teknik deskriptif kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan kata, kalimat, dan atau substansi masukan dari responden yang bersifat kualitatif.

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian Tema Payung Tahun Pertama**

Penelitian hibah Pascasarjana (penelitian payung) ini akan dilakukan selama tiga tahun. Kegiatan yang dilakukan pada tahun pertama adalah mengkaji teori, dan penelitian yang relevan, serta hasil penelitian mahasiswa yang terlibat dalam penelitian ini (penelitian anak payung). Hasil kajian digunakan untuk menyusun draf model evaluasi penjaminan mutu sekolah yang mencakup struktur dan komponen, serta prosedur atau mekanisme evaluasi penjaminan mutu sekolah.

##### **1. Komponen dan Model Evaluasi Penjaminan Mutu**

Dalam perspektif manajemen mutu, upaya penjaminan mutu suatu lembaga atau satuan pendidikan tertentu terutama harus dilakukan oleh pihak internal sekolah yang bersangkutan sebagai bagian dari proses manajemen mutu. Namun demikian, upaya pengawasan atau pengendalian terhadap pelaksanaan penjaminan mutu yang dilakukan oleh pihak internal sekolah tersebut dapat dilakukan juga oleh pihak eksternal sekolah. Salah satu mekanisme yang dapat ditempuh dalam rangka penjaminan mutu sekolah atau satuan pendidikan yang dilakukan oleh pihak eksternal sekolah adalah melalui akreditasi sekolah, yang selama ini dilakukan Badan Akreditasi Sekolah (BAS), dan melalui penguji eksternal, seperti: Ujian Nasional oleh pemerintah, maupun Uji Kompetensi bagi siswa SMK.

Pada prinsipnya, upaya manajemen mutu dalam rangka penjaminan mutu tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan proses akreditasi suatu sekolah atau satuan pendidikan tertentu. Penjaminan mutu (*Quality Assurance*) adalah upaya pengelolaan mutu yang dilakukan oleh pihak internal sekolah, dalam rangka untuk memberikan jaminan bahwa semua aspek yang terkait dengan layanan pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga atau satuan pendidikan tertentu dapat mencapai suatu standar mutu tertentu. Sementara itu, akreditasi sekolah atau satuan pendidikan merupakan upaya untuk memberikan pengakuan terhadap suatu institusi pendidikan (satuan pendidikan) oleh suatu lembaga (BAS) yang bersifat eksternal



yang menyatakan bahwa lembaga pendidikan tersebut dapat memberikan layanan pendidikan dengan standar kualitas tertentu sesuai dengan status akreditasi yang disandangnya. Demikian pula, pengakuan pihak eksternal terhadap upaya penjaminan mutu yang dilakukan oleh pihak internal sekolah juga dapat ditempuh melalui pelibatan penguji eksternal, seperti: UN dan uji kompetensi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penjaminan mutu sekolah tersebut terutama harus dilakukan oleh pihak internal sekolah, sebagai bagian dari manajemen mutu sekolah, sedangkan pengawasan atau evaluasi terhadap pelaksanaan penjaminan mutu, dapat dilakukan oleh pihak eksternal sekolah dalam bentuk akreditasi sekolah, dan pengujian secara eksternal.

Sementara itu, Tom Vroeijenstijn (2002), menyatakan bahwa sistem penjaminan mutu mencakup penjaminan mutu internal dan penjaminan mutu eksternal. Penjaminan mutu internal dilakukan oleh pihak internal sekolah, yang merupakan tanggung jawab kepala sekolah beserta staf yang berwenang, yang terdiri dari pemantauan berkelanjutan, evaluasi diri oleh semua warga sekolah, evaluasi oleh lulusan maupun pengguna lulusan. Sedangkan penjaminan mutu eksternal umumnya dilakukan oleh pihak eksternal sekolah, berupa penilaian kinerja sekolah sebagai suatu entitas melalui akreditasi sekolah, penilaian prestasi akademik oleh pihak pemerintah, dalam bentuk Ujian Nasional, penilaian kompetensi lulusan SMK melalui uji kompetensi, dan penilaian terhadap kinerja sekolah penerima *block grant* peningkatan mutu, ataupun penilaian oleh pihak-pihak eksternal sekolah lainnya.

Pada Gambar 2 di muka, telah digambarkan bahwa penjaminan mutu yang dilakukan oleh pihak internal sekolah, telah mencakup penjaminan mutu komponen input pendidikan, baik input siswa maupun input instrumental (input pengolah), penjaminan mutu komponen proses (manajemen sekolah, proses pembelajaran, dan pembentukan kultur sekolah sebagai bagian dari program peningkatan mutu sekolah), penjaminan mutu komponen output atau hasil pendidikan, baik yang terkait dengan output dalam aspek akademik maupun non-akademik, dan penjaminan mutu terhadap komponen outcomes pendidikan (terutama untuk SMK), seperti: daya serap

lulusan oleh lapangan kerja, masa tunggu untuk memperoleh pekerjaan, serta kriteria eksternal lainnya.

Pada penelitian tahun I yang telah dilaksanakan pada tahun 2011, struktur model dan komponen penjaminan mutu sekolah, mencakup komponen: input siswa (yaitu sistem seleksi penerimaan peserta didik baru di SMA RSBI yang penelitiannya dilakukan oleh mahasiswa S2 PEP yang terlibat dalam penelitian ini), input guru (penilaian terhadap kinerja guru yang penelitiannya dilakukan oleh mahasiswa S3 PTK yang terlibat dalam penelitian ini), input program (yaitu melalui model evaluasi diri sekolah yang penelitiannya dilakukan oleh mahasiswa S3 PTK yang terlibat dalam penelitian hibah ini), komponen proses (yaitu melalui evaluasi serta pemanfaatan daya serap materi untuk perbaikan pembelajaran yang penelitiannya dilakukan oleh mahasiswa S2 PEP yang terlibat dalam penelitian ini), dan komponen *output* (evaluasi terhadap hasil Ujian Nasional dan evaluasi kualitas soal yang digunakan untuk penilaian hasil belajar yang penelitiannya dilakukan oleh mahasiswa S2 PEP yang terlibat dalam penelitian ini).

## **2. Prosedur/Mekanisme Penjaminan Mutu**

Selain struktur model dan komponen evaluasi penjaminan mutu sekolah, pada penelitian tahun pertama juga telah dikembangkan prosedur atau mekanisme evaluasi penjaminan mutu. Mekanisme atau prosedur penjaminan mutu yang dikembangkan ini melibatkan institusi-institusi di luar sekolah yang memiliki Tupoksi maupun kewenangan untuk melakukan penjaminan mutu sekolah, yaitu: LPMP, Dinas Pendidikan, P4-TK dan Komite Sekolah sebagai mitra sekolah.

Pada Gambar 3 di muka, telah diilustrasikan bahwa upaya penjaminan mutu sekolah harus dilakukan oleh pihak internal sekolah sebagai bagian dari manajemen mutu, namun mereka harus difasilitasi: didorong, didukung, didampingi dan disupervisi oleh institusi-institusi di luar sekolah yang memiliki Tupoksi maupun kewenangan untuk melakukan penjaminan mutu sekolah, yaitu: LPMP, Dinas Pendidikan, P4-TK dan Komite Sekolah sebagai mitra sekolah.

### **3. Hasil Penelitian Anak Payung Tahun I**

Hasil penelitian pada tahun pertama telah berhasil mempercepat kelulusan tiga mahasiswa S-2 Program Pascasarjana UNY, sehingga dapat memperpendek masa studi menjadi sekitar 22 bulan. Sementara itu, tiga mahasiswa S3 diharapkan dapat lulus pada tahun kedua, karena saat ini dua mahasiswa diantaranya sedang melaksanakan pengumpulan data. Hasil penelitian tiga mahasiswa S2 Program Pascasarjana UNY dalam rangka penyusunan tugas akhir Tesis, dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### **a. *FRIYATMI*: Karakteristik Instrumen Tes dan Sistem Seleksi Siswa Baru Rintisan SMA Bertaraf Internasional di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi penjaminan mutu pada aspek input pendidikan, yaitu dengan mengevaluasi sistem Seleksi Penerimaan Siswa Baru dan mengevaluasi karakteristik (kualitas) butir tes seleksi penerimaan siswa baru pada Rintisan SMA Bertaraf Internasional (RSMABI) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian ini termasuk penelitian evaluasi, yang dilakukan melalui metode deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di seluruh RSMABI di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyelenggarakan tes seleksi dalam penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2010/2011. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa: laporan pelaksanaan kegiatan seleksi, perangkat tes dan hasil tes seleksi penerimaan siswa baru, serta nilai rapor siswa pada semester 1, yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk digunakan untuk mendeskripsikan sistem seleksi penerimaan siswa baru, dan menganalisis kualitas butir soal secara kualitatif. Teknik analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk mengevaluasi kualitas butir tes seleksi dengan mendasarkan pendekatan teori klasik dan teori respon butir.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

- 1) Seleksi penerimaan siswa baru RSMABI di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk seleksi administrasi telah terlaksana 50%. Seleksi penerimaan siswa baru

berdasarkan tes kemampuan akademik dan tes bahasa Inggris belum terlaksana dengan baik, karena butir soal tidak sesuai standar. Tes psikologi telah terlaksana dengan baik, namun membutuhkan biaya yang besar.

- 2) Kualitas butir soal tes seleksi penerimaan siswa baru pada RSMABI baik secara kualitatif maupun kuantitatif adalah sebagai berikut:
  - a) Kualitas butir tes seleksi secara kualitatif menunjukkan bahwa sebagian besar butir soal termasuk dalam kategori baik. Hasil telaah seluruh materi tes untuk aspek materi, bahasa, dan konstruksi telah terpenuhi lebih dari 85%.
  - b) Hasil telaah butir soal SMAN 1 Kalasan secara kualitatif menunjukkan bahwa jumlah butir tes yang berkategori baik untuk bahasa Indonesia adalah sebanyak 76,7%, IPA 84%, matematika sebesar 87%, IPS sebesar 35%, dan tes bahasa Inggris sebesar 98%. Sementara itu, telaah butir soal seleksi SMAN 1 Wonosari secara kualitatif menunjukkan jumlah butir dengan kategori baik pada materi uji bahasa Indonesia adalah sebesar 95%, IPA 85%, matematika sebesar 100%, IPS 90%, dan tes bahasa Inggris sebesar 85%.
- 3) Analisis tes secara kuantitatif menunjukkan bahwa kualitas instrumen berdasarkan teori klasik ternyata hanya tes bahasa Inggris SMAN 1 Kalasan dan tes matematika SMAN 1 Wonosari yang merupakan instrumen yang reliabel. Semua butir tes memiliki rerata tingkat kesukaran sedang. Rerata daya pembeda butir tes yang tergolong baik hanya tes matematika dari kedua SMA tersebut, dan tes IPA yang digunakan oleh SMAN 1 Wonosari.
- 4) Karakteristik butir soal berdasarkan teori respon butir memperlihatkan bahwa seluruh materi tes memiliki daya pembeda yang baik. Rerata tingkat kesukaran butir tes berkategori baik, meskipun tergolong mudah.
- 5) Validitas prediktif seluruh tes seleksi secara bersama-sama di kedua sekolah tergolong tinggi, yang ditunjukkan oleh koefisien korelasi ganda sebesar 0,717 di SMAN 1 Kalasan, dan 0,707 di SMAN 1 Wonosari. Sumbangan komponen seleksi terhadap hasil belajar siswa SMAN 1 Kalasan adalah sebesar 52,4%, sedangkan SMAN 1 Wonosari adalah sebesar 50%. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa dari kelima jenis prediktor, maka nilai rapor dan nilai ujian nasional SMP

memberikan peranan yang lebih besar dalam memprediksikan hasil belajar siswa dibandingkan skor tes seleksi.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka diajukan rekomendasi kebijakan sebagai berikut:

- a. Kebijakan seleksi siswa baru RSMABI melalui tes seleksi hendaknya perlu dipertimbangkan kembali, karena berdasarkan bukti empiris pelaksanaan tes hanya mempunyai peranan yang rendah dalam memprediksi keberhasilan belajar siswa di SMA.
- b. Seleksi siswa baru RSMABI di provinsi DIY akan lebih efektif dan efisien dengan melalui seleksi administrasi yang didasarkan pada nilai rapor dan nilai UN SMP saja, karena meskipun pelaksanaan seleksi administrasi tersebut tidak membutuhkan biaya besar, namun justru mempunyai daya prediksi yang besar dalam memprediksikan keberhasilan belajar siswa di SMA.

**b. *Ika Pranita Siregar: Analisis Hasil Ujian Nasional Kimia SMA di Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.***

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penjaminan mutu sekolah dalam aspek proses pembelajaran, yang dilakukan dengan mengidentifikasi: (1) daya serap materi Kimia pada Ujian Nasional (UN) SMA di Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan (2) pemanfaatan hasil daya serap materi Kimia tersebut dalam peningkatan kualitas pembelajaran.

Jenis penelitian adalah penelitian survey eksploratif yang menganalisis hasil daya serap materi Kimia pada UN SMA RSBI dan pemanfaatan hasil daya serap tersebut. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data hasil daya serap materi Kimia pada UN SMA RSBI 2009/2010 dan sumber informasi untuk pemanfaatan hasil daya serap tersebut adalah 30 guru Kimia dan 10 Kepala Sekolah SMA RSBI. Perbedaan rerata daya serap materi Kimia pada UN SMA RSBI antar kabupaten/kota dan perbedaan urutan kemampuan yang diuji yang memiliki persentase daya serap lima terendah SMA RSBI antar kabupaten/kota menggunakan analisis non parametrik dengan uji Kruskal-Wallis. Perbedaan rerata daya serap materi Kimia pada UN SMA RSBI dan non RSBI dianalisis dengan uji Mann-Whitney

U. Pemanfaatan hasil daya serap dan kendalanya dianalisis dengan statistik deskriptif kuantitatif dan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pada analisis daya serap UN: a) persentase daya serap materi mata pelajaran Kimia berdasar hasil UN SMA RSBI di Provinsi DIY tahun 2009/2010 cukup tinggi yaitu 76,24% (soal paket A) dan 73,66% (soal paket B), b) persentase daya serap terendah yaitu 11,29% (soal paket A) dan 24,96% (soal paket B), c) persentase daya serap tertinggi yaitu 99,09% (soal paket A) dan 99,59% (soal paket B), d) tidak ada perbedaan secara signifikan rerata daya serap materi Kimia pada UN SMA RSBI antar kabupaten/kota baik pada soal paket A maupun B, e) ada perbedaan secara signifikan rerata daya serap materi Kimia pada UN antar SMA RSBI dengan non RSBI baik pada soal paket A maupun B, dan f) tidak ada perbedaan secara signifikan urutan pokok bahasan yang daya serapnya lima terendah antar kabupaten/kota baik pada soal paket A maupun B. (2) pada pemanfaatan hasil daya serap menunjukkan bahwa sekolah dan guru SMA RSBI melakukan analisis dan pemanfaatan hasil daya serap UN cukup tinggi dan kendala dalam pemanfaatan hasil analisis daya serap adalah penerimaan informasi hasil UN yang tidak lengkap dan sering terlambat.

Hasil penelitian di atas memberikan implikasi bahwa:

- 1) Analisis daya serap ini memberikan gambaran bahwa rerata persentase daya serap materi Kimia pada UN SMA RSBI termasuk tinggi yaitu lebih besar dari 65%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak ada materi sulit pada soal UN Kimia. Implikasinya bagi pihak sekolah terutama Kepala Sekolah dan guru agar meningkatkan persentase daya serap materi Kimia pada UN tahun berikutnya dengan cara melakukan analisis daya serap tahun sebelumnya.
- 2) Perbedaan rerata persentase daya serap materi Kimia pada UN SMA RSBI antar kabupaten/kota memberikan gambaran bahwa perbedaan wilayah tidak mempengaruhi mutu SDM yang didasarkan pada indikator nilai UN. Implikasinya bagi pemerintah, sekolah, guru, dan siswa untuk tetap meningkatkan mutu SDM-nya walaupun wilayah berbeda dengan kecenderungan konteks dan input yang berbeda namun dapat menghasilkan *output* antar daerah/kabupaten yang tidak berbeda.

- 3) Perbedaan rerata persentase daya serap materi Kimia pada UN antar SMA RSBI dengan non RSBI memberikan gambaran bahwa konsep pengembangan SNP pada SMA RSBI tidak dapat membedakan ciri dan kualitas RSBI dengan non RSBI, selain itu dapat juga digambarkan bahwa nilai UN tidak dapat digunakan untuk membedakan SMA RSBI dan non RSBI. Implikasinya bagi pemerintah adalah melakukan evaluasi kembali terhadap konsep pengembangan RSBI yang ternyata hasilnya tidak berbeda dengan SNP.
- 4) Pemanfaatan hasil analisis daya serap meliputi penentuan materi dan metode pembelajaran berdasarkan hasil analisis daya serap. Selain itu juga dukungan, motivasi, dan monitoring Kepala Sekolah terhadap pemanfaatan hasil daya serap. Hasil evaluasi ini memberikan gambaran bahwa SMA RSBI sudah memanfaatkan hasil analisis daya serap materi Kimia pada UN secara maksimal dalam memperbaiki proses pembelajaran berikutnya. Implikasinya bagi Kepala Sekolah, guru, dan siswa untuk lebih memanfaatkan hasil analisis daya serap sehingga proses pembelajaran dapat semakin baik yang nantinya akan menghasilkan kualitas lulusan yang semakin baik yaitu lulusan yang memiliki standar lebih tinggi daripada sekolah non RSBI.

**c. HARYANI: Penyetaraan Horisontal Perangkat Tes Ujicoba Ujian Nasional Matematika SMA Program IPA di SMAN Kota Yogyakarta Tahun Pelajaran 2009/2010.**

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi penjaminan mutu pada komponen *output* pendidikan, yaitu dengan mengevaluasi karakteristik atau kualitas butir tes yang digunakan pada ujicoba Ujian Nasional Matematika SMA program IPA tahun pelajaran 2009/2010.

Sumber data berasal dari dokumentasi lembar jawaban siswa kelas XII IPA di SMAN kota Yogyakarta yang mengikuti ujicoba Ujian Nasional Matematika IPA tahun pelajaran 2009/2010 untuk putaran 1, 2, dan 3, dengan jumlah sampel 1396. Evaluasi kualitas atau karakteristik butir tes dilakukan dengan program Iteman dan Bilog MG, sedang penyetaraan tes dilakukan dengan kurva karakteristik dari Haebera dengan desain tunggal. Analisis untuk kesetaraan meliputi: analisis varians untuk menguji kesamaan rata-rata, uji Tuckey untuk uji pasangan, dan uji Levene untuk

menguji homogenitas varians. Proses penyetaraan dilakukan dengan bantuan program Microsoft Excell 2007.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas tes yang digunakan pada ujicoba UN SMA IPA di SMAN kota Yogyakarta tahun pelajaran 2009/2010 adalah sebagai berikut:

- a) Hasil telaah kualitatif dapat disimpulkan bahwa tes putaran 1, 2, dan 3 yang digunakan pada ujicoba UN SMA IPA di SMAN kota Yogyakarta tahun pelajaran 2009/2010 dengan masing-masing putaran 40 item, pada aspek materi 99,2% berkategori baik karena memenuhi semua kriteria telaah dan 0,9% berkategori kurang baik karena pengecoh tidak homogen dan logis. Pada aspek konstruksi 96,7% berkategori baik karena memenuhi semua kriteria telaah dan 3,3% yang berkategori kurang baik karena soal-soal tidak dirumuskan dengan jelas, sedang pada aspek bahasa 90% berkategori baik karena memenuhi semua kriteria telaah, 8,3% kurang baik karena tidak menggunakan bahasa yang komunikatif dan 1,7% butir tes berkategori tidak baik karena tidak menggunakan bahasa yang komunikatif dan EYD.
- b) Hasil analisis secara kuantitatif dengan pendekatan teori tes klasik, pada tes putaran pertama, 16 atau 40% berkategori baik, putaran kedua 26 atau 65% dan putaran ketiga 17 atau 42,5%. Selain itu, daya beda dan tingkat kesukaran tes putaran 1, 2, dan 3 berkategori baik. Daya beda pada putaran satu sebesar 0,398, putaran dua 0,377 dan putaran tiga 0,350, sedang rata-rata tingkat kesukaran tes putaran satu 0,398, putaran dua 0,623 dan putaran tiga 0,632. Reliabilitas tes putaran 1, 2, dan 3 berkategori baik. Reliabilitas putaran satu sebesar 0,750, putaran dua 0,845 dan putaran tiga 0,818. Jika dilihat distribusi respon, pengecoh pada tes putaran satu, dua dan putaran tiga 85,8% merupakan pengecoh efektif.
- c) Hasil analisis secara kuantitatif dengan pendekatan Teori Respons Butir, model 2 Parameter Logistik, pada tes putaran 1, sebanyak 17 atau 42,5% berkategori baik, rata-rata daya beda 0,513 dengan simpangan baku 0,134 dan rata-rata tingkat kesukaran 0,256 dengan simpangan baku 1,041. Pada tes putaran dua diperoleh 34 atau 85% berkategori baik, rata-rata daya beda 0,578 dengan simpangan baku 0,133 dan rata-rata tingkat kesukaran - 0,700 dengan simpangan baku



0,905. Pada tes putaran tiga diperoleh 24 item atau 60% berkategori baik, rata-rata daya beda 0,584 dengan simpangan baku 0,137 dan rata-rata tingkat kesukaran - 0,808 dengan simpangan baku 1,337.

- d) Secara bersama-sama tes putaran 1, 2, dan 3 tidak paralel karena mempunyai rata-rata skor dan varians yang sama. Tes putaran 1 dan putaran 2 tidak paralel dengan persamaan kesetaraan tes putaran satu (X) ke putaran dua (Y) adalah  $\theta_y = 1,5824\theta_x - 1,8653$ , demikian juga dengan tes putaran 1 dan putaran 3 juga tidak paralel dengan persamaan kesetaraan soal putaran satu (X) ke putaran tiga (Z) adalah  $\theta_z = 0,99046\theta_x - 1,2212$ .

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diambil implikasi sebagai berikut:

- 6) Secara kualitatif, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan agar dalam penyusunan soal perlu mempertimbangkan aspek bahasa, materi dan konstruksi sehingga terhindar dari kesalahan perangkat tes dalam menjalani fungsi ukurnya.
- 7) Hasil kuantitatif menunjukkan masih sedikitnya butir – butir yang berkategori baik, membawa implikasi perlu adanya perbaikan dalam penyusunan soal.
- 8) Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi guru-terkait dengan adanya informasi tentang materi-materi yang berkategori mudah, sedang dan sulit.
- 9) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rintisan pengembangan bank soal ujicoba Ujian Nasional Matematika IPA.
- 10) Hasil penelitian yang menunjukkan belum adanya kesetaraan pada soal- soal yang digunakan pada ujicoba Ujian Nasional, dapat sebagai pertimbangan bahwa dalam pembuatan soal ujicoba yang dilakukan secara bertahap perlu diperhatikan kesetaraan antar paket yang digunakan, sehingga perbaikan pembelajaran akan lebih efektif.

## **B. Hasil Penelitian Tema Payung Tahun Kedua**

Kegiatan yang dilakukan pada penelitian tema payung tahun kedua adalah mengembangkan panduan dan instrumen evaluasi penjaminan mutu sekolah. Draf panduan dan instrumen evaluasi penjaminan mutu sekolah yang telah dikembangkan

tersebut selanjutnya divalidasi melalui *focus group discussion* (FGD), dengan mengundang para pakar dari: perguruan tinggi, asosiasi profesi, LPMP, P4-TK, dan juga para praktisi (Wakasek Urusan Penjaminan Mutu dan Pengawas Sekolah). Hasil penelitian tema payung tahun kedua dapat dideskripsikan sebagai berikut.

## **1. Panduan Evaluasi Penjaminan Mutu Sekolah**

Dalam panduan evaluasi penjaminan mutu sekolah yang dikembangkan pada penelitian tahun kedua (yang telah dilaksanakan pada tahun 2012) ini, telah panduan yang mencakup: (a) latar belakang, (b) Komponen Penjaminan Mutu Sekolah, (c) Model Evaluasi Penjaminan Mutu Sekolah, (d) Mekanisme Evaluasi Penjaminan Mutu Sekolah, dan (e) Instrumen evaluasi penjaminan mutu sekolah.

### **a. Latar Belakang**

Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan, menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan yang dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

Upaya peningkatan mutu pendidikan tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan manajemen mutu pendidikan. Dalam manajemen mutu, semua fungsi manajemen yang dijalankan oleh para manajer pendidikan di sekolah (kepala sekolah) diarahkan untuk dapat memberikan kepuasan kepada para pelanggannya (*customer*), terutama kepada pelanggan eksternal, seperti: siswa, orangtua atau masyarakat pemakai lulusan. Dalam upaya memberikan kepuasan kepada pelanggan tersebut diperlukan suatu patokan atau standar tertentu sebagai kriteria, dan layanan pendidikan yang diberikan seharusnya sesuai atau jika mungkin dapat melampaui kriteria minimal tersebut. Dengan demikian, semua fungsi manajemen pendidikan diarahkan agar semua layanan pendidikan yang diberikan tersebut paling tidak memenuhi atau jika memungkinkan dapat melebihi harapan pelanggan atau *customer* yang tercermin dari kriteria minimal tersebut.

Oleh karena itu, dalam manajemen mutu pendidikan diperlukan suatu upaya pengelolaan mutu dalam bentuk penjaminan mutu (*quality assurance*), yang akan memberikan jaminan kepada pelanggan bahwa semua aspek yang terkait dengan layanan pendidikan pendidikan yang diberikan oleh lembaga pendidikan tersebut dapat mencapai standar mutu tertentu, sehingga output yang dihasilkan oleh lembaga atau satuan pendidikan tersebut sesuai dengan yang dijanjikan.

#### **b. Komponen Penjaminan Mutu Sekolah**

Tom Vroeijenstijn (2002), mendefinisikan penjaminan mutu (QA) sebagai program untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi dan koreksi sebagai tindakan penyempurnaan, atau peningkatan mutu yang dilakukan secara kontinyu dan sistematis terhadap semua aspek pendidikan (sarana/prasarana, pengelolaan, kepemimpinan, maupun proses dan hasil pembelajaran) dalam rangka pencapaian standar yang telah ditetapkan.

Di negara bagian New South Wales, Australia, program penjaminan mutu pendidikan ini dilaksanakan melalui *Directorate of Quality Assurance, Department of School Education NSW*, yang diarahkan pada penjaminan mutu untuk tiga komponen sistemik pendidikan, yaitu: (1) komponen belajar mengajar, (2) kepemimpinan dan budaya sekolah, dan (3) pengembangan manajemen sekolah. Di Jerman, mekanisme evaluasi penjaminan mutu pendidikan dimulai dari evaluasi diri oleh internal sekolah. Selanjutnya, terhadap hasil evaluasi diri tersebut dilakukan validasi. Setelah itu, dilakukan verifikasi yang meliputi penilaian terhadap aspek-aspek proses dan penilaian terhadap hasil.

Di Hongkong, pelaksanaan penjaminan mutu sekolah, yang dikenal dengan nama Kerangka Kerja Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (*School Education Quality Assurance Framework*), mencakup dua kegiatan utama, yaitu penilaian yang dilakukan melalui evaluasi diri sekolah (*School Self-Evaluation*) dan pengawasan atau inspeksi terhadap pelaksanaan penjaminan mutu (*QA Inspection*). Dalam rangka pelaksanaan evaluasi diri dan pengawasan terhadap penjaminan mutu sekolah, didasarkan pada indikator-indikator kinerja yang meliputi empat ranah sebagai berikut: (a) manajemen dan organisasi, (b) pembelajaran, (c) dukungan terhadap siswa dan pengembangan kultur sekolah, dan (d) prestasi belajar.

### **c. Model Evaluasi Penjaminan Mutu Sekolah**

Model penjaminan mutu yang dikembangkan dalam penelitian ini, mencakup penjaminan mutu internal dan penjaminan mutu eksternal. Penjaminan mutu internal dilakukan oleh pihak internal sekolah, yang merupakan tanggung jawab kepala sekolah beserta staf yang berwenang, yang terdiri dari pemantauan berkelanjutan, evaluasi oleh semua warga sekolah, evaluasi oleh lulusan maupun pengguna lulusan.

Sementara itu, penjaminan mutu eksternal umumnya dilakukan oleh pihak eksternal sekolah, berupa penilaian kinerja sekolah sebagai suatu entitas melalui akreditasi sekolah, penilaian prestasi akademik oleh pihak pemerintah, dalam bentuk Ujian Nasional, dan penilaian terhadap kinerja sekolah penerima *block grant* peningkatan mutu, ataupun penilaian oleh pihak-pihak eksternal sekolah lainnya.

### **d. Mekanisme Evaluasi Penjaminan Mutu Sekolah**

Dalam perspektif manajemen mutu, upaya penjaminan mutu suatu lembaga atau satuan pendidikan terutama harus dilakukan oleh pihak internal sekolah yang bersangkutan sebagai bagian dari proses manajemen mutu. Namun demikian, upaya pengawasan atau pengendalian terhadap pelaksanaan penjaminan mutu yang dilakukan oleh pihak internal sekolah tersebut dapat dilakukan juga oleh pihak eksternal sekolah. Salah satu mekanisme yang dapat ditempuh dalam rangka penjaminan mutu sekolah atau satuan pendidikan yang dilakukan oleh pihak eksternal sekolah adalah melalui akreditasi sekolah, yang selama ini dilakukan Badan Akreditasi Sekolah (BAS), dan melalui penguji eksternal, seperti: Ujian Nasional oleh pemerintah, maupun uji kompetensi bagi siswa SMK yang melibatkan penilai dari dunia usaha/industri.

Pada prinsipnya, upaya manajemen mutu dalam rangka penjaminan mutu tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan proses akreditasi suatu sekolah atau satuan pendidikan tertentu. Penjaminan mutu (*Quality Assurance*) adalah upaya pengelolaan mutu yang dilakukan oleh pihak internal sekolah, dalam rangka untuk memberikan jaminan bahwa semua aspek yang terkait dengan layanan pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga atau satuan pendidikan tertentu dapat mencapai suatu standar mutu tertentu. Sementara itu, akreditasi sekolah atau satuan pendidikan merupakan upaya untuk memberikan pengakuan terhadap suatu institusi

pendidikan (satuan pendidikan) oleh suatu lembaga (BAS) yang bersifat eksternal yang menyatakan bahwa lembaga pendidikan tersebut dapat memberikan layanan pendidikan dengan standar kualitas tertentu sesuai dengan status akreditasi yang disandangnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penjaminan mutu sekolah tersebut dilakukan oleh pihak internal sekolah, sebagai bagian dari manajemen mutu sekolah, sedangkan pengawasan atau evaluasi terhadap pelaksanaan penjaminan mutu, yang salah satunya dilakukan dalam bentuk akreditasi, dapat dilakukan oleh pihak eksternal sekolah.

## **2. Instrumen Evaluasi Penjaminan Mutu Sekolah**

Instrumen evaluasi penjaminan mutu sekolah ini dikembangkan untuk mengumpulkan data yang terkait dengan upaya penjaminan mutu yang dilakukan oleh sekolah secara internal, sebagai bagian dari proses manajemen mutu. Instrumen evaluasi penjaminan mutu sekolah yang telah dikembangkan ini telah divalidasi melalui FGD, dengan melibatkan 9 pakar dari perguruan tinggi, LPMP, dan P4-TK, serta 9 pakar dari asosiasi profesi (HEPI, ADGVI, dan PGRI), pengawas (SMP, SMA, dan SMK) sebanyak 3 orang, dan Wakasek Urusan Penjaminan Mutu (Wakasek UPM), sebanyak 6 orang. Instrumen evaluasi penjaminan mutu sekolah terlampir.

Instrumen evaluasi penjaminan mutu sekolah yang dikembangkan ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data terkait dengan:

- 1) Keterlaksanaan program penjaminan mutu sekolah, yang mencakup semua komponen penjaminan mutu sekolah.
- 2) Ruang lingkup atau komponen penjaminan mutu, yang mencakup: input siswa, input pengolah, proses, output, dan outcomes.
- 3) Peran yang dilakukan oleh stakeholders dalam pelaksanaan penjaminan mutu sekolah secara internal.
- 4) Keberadaan program penjaminan mutu, yang telah direncanakan, dan dilaksanakan di sekolah.
- 5) Keberadaan Divisi/Pokja program penjaminan mutu sekolah.
- 6) Keberadaan standar (acuan) untuk masing-masing komponen penjaminan mutu.
- 7) Mekanisme atau prosedur penjaminan mutu internal sekolah.

- 8) Pelaksanaan evaluasi program penjaminan mutu internal sekolah.
- 9) Kendala-kendala yang dialami oleh sekolah dalam melaksanakan penjaminan mutu, dan
- 10) Saran dan harapan mengenai program penjaminan mutu sekolah.

### **C. Hasil Penelitian Anak Payung Tahun Kedua**

Hasil penelitian pada tahun kedua juga telah berhasil mempercepat kelulusan dua mahasiswa S-2 dan satu mahasiswa program Doktor, Program Pascasarjana UNY. Bagi mahasiswa S2, keterlibatannya dalam penelitian tema payung ini telah dapat memperpendek masa studi menjadi sekitar 23 bulan. Sedangkan satu mahasiswa S3 telah dapat lulus pada tahun kedua, dengan masa studi secara keseluruhan kurang dari 4 tahun. Sementara itu, bagi dua mahasiswa S3 yang lain saat ini mereka sedang melaksanakan pengumpulan data. Hasil penelitian dua mahasiswa S2 dan satu mahasiswa S3, Program Pascasarjana UNY dalam rangka penyusunan tugas akhir Tesis dan Disertasi, dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### **1. *NUCHRON*: Model Evaluasi Diri Sekolah Menengah Kejuruan Bertaraf Internasional (SMK-SBI)**

Tujuan utama penelitian ini adalah: (1) mengembangkan komponen-komponen evaluasi diri yang dapat dijadikan indikator untuk mengevaluasi SMK-SBI, sebagai dasar pengembangan sekolah; (2) mengembangkan model evaluasi diri yang dapat mewadahi atau mencakup komponen-komponen untuk meningkatkan kinerja SMK-SBI; (3) menguji keefektifan model evaluasi diri yang dapat memberikan hasil evaluasi yang akurat dan informasi yang berharga untuk pengambilan keputusan, untuk perencanaan program SMK-SBI bagi pemangku kepentingan (*stake holder*).

Secara konseptual dan prosedural, model evaluasi diri yang dikembangkan pada penelitian ini mengacu pada tiga model, yakni: (1) Research and Development (R & D) yang dikembangkan Borg dan Gall; (2) Research and Development Stages (R & D) yang dikembangkan Krajewski dan Ritzman; dan (3) Research Development and Diffusion (RD & D) yang dikembangkan Havelock. Uji coba R & D dilakukan tiga tahap yakni: (1) uji coba pendahuluan diterapkan pada 10 orang subyek coba di SMKN 1 Bantul, SMKN 4 Yogyakarta, dan SMKN 5 Yogyakarta; (2) uji prototipe

produk yang diterapkan pada 20 orang subjek coba di SMKN 1 Depok dan SMKN 1 Kalasan; (3) uji coba operasional yang diterapkan 30 subyek coba di SMKN 2 Pengasih, SMKN 2 Wonosari, dan SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Teknik pengumpulan data: angket, dokumentasi, observasi, dan wawancara. Validitas dan reliabilitas instrumen menggunakan penilaian para ahli (*expert judgment*), sedangkan keabsahan data kualitatif dilakukan dengan triangulasi antar sumber, tempat, dan metode. Analisis data kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif dan data kualitatif dengan model interaktif.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Model ED-SBI: (1) pengembangan komponen dan indikator evaluasi diri dilakukan melalui R&D, untuk menghasilkan komponen dan indikator kinerja sebagai inti (*core*) dari model ED-SBI dengan kajian konseptual, teoretik, dan empirik di lapangan melalui survai, FGD, dan teknik Delphi; (2) interaksi positif antar pakar pendidikan dan praktisi pendidikan dalam memberikan *judgment* komponen dan indikator kinerja sekolah yang terdiri dari sepuluh komponen dan tiga puluh sembilan indikator kinerja sekolah merupakan kesepakatan bersama, yang akan digunakan sebagai dasar pengembangan instrumen ED-SBI; (3) model ED-SBI hasil pengembangan memiliki kepekaan, efektivitas, akuratsi, presisi terhadap obyek yang diteliti, dan dapat mengungkap data yang dibutuhkan; (4) model ED-SBI hasil pengembangan dapat memberikan informasi yang tepat bagi stakeholder, melalui instrumen yang digunakan dapat memberikan seluruh informasi yang berkaitan dengan implementasi komponen dan indikator kinerja sekolah; (5) tingkat koherensi instrumen ED-SBI ketika digunakan dapat memberikan informasi yang saling mendukung dan melengkapi antara data kuantitatif dan kualitatif; (6) kelebihan dibanding instrumen BAS Nas dan SNP signifikan, instrumen ED-SBI bersifat komprehensif, holistik, mudah dilakukan, efektif, mendukung persiapan akreditasi sekolah, dan penjaminan mutu sekolah.

Implikasi dari hasil temuan ini adalah bahwa untuk menetapkan kinerja sekolah sangat tergantung pada instrumen yang digunakan, apakah instrumen yang digunakan memiliki validitas dan reliabilitas tinggi. Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan dapat disimpulkan bahwa Model Evaluasi Diri SMK-SBI (ED-SBI):

- 1) Komponen dan indikator evaluasi diri kinerja sekolah merupakan inti (*core*) dari Model Evaluasi Diri SMK-SBI (ED-SBI). Hal ini disebabkan komponen dan indikator

kinerja sekolah dikembangkan para pakar dan praktisi pendidikan berdasarkan kajian konseptual, kajian teoretik, dan pengalaman empirik di lapangan melalui survai, FGD, dan teknik Delphi.

- 2) Ada interaksi yang positif antar pakar pendidikan dan praktisi pendidikan dalam memberikan penilaian (*judgment*) komponen dan indikator kinerja sekolah. Proses pengembangan Model ED-SBI yang di dalamnya berisi 10 komponen dan 39 indikator kinerja sekolah merupakan kesepakatan bersama yang dikembangkan sebagai instrumen evaluasi diri SMK-SBI.
- 3) Model ED-SBI hasil pengembangan memiliki kepekaan yang tinggi terhadap obyek yang diteliti. Hal ini disebabkan dalam proses uji coba pendahuluan, utama, dan operasional di delapan SMK-SBI yang melibatkan 60 orang subjek coba dapat mengungkap data yang dibutuhkan.
- 4) Model ED-SBI hasil pengembangan dapat memberikan informasi yang tepat bagi *stakeholder* ketika digunakan untuk melihat kelebihan dan bermanfaat (*merit & worth*) peningkatan sekolah berkelanjutan. Empat jenis instrumen yang digunakan meliputi angket, dokumentasi, observasi, dan wawancara, dapat memberikan seluruh informasi yang berkaitan dengan implementasi komponen dan indikator kinerja sekolah, termasuk yang dilakukan siswa, guru, kepala sekolah, dan komite sekolah.
- 5) Model ED-SBI ketika diimplementasikan untuk acuan menetapkan tingkat kinerja sekolah memiliki kecocokan (koherensi) dengan rancangan. Empat jenis instrumen yang digunakan untuk menggali data dapat memberikan informasi yang saling mendukung dan melengkapi antara data kuantitatif yang dianalisis dengan statistik deskriptif maupun data kualitatif yang dianalisis dengan metode interaktif.
- 6) Kelebihan ED-SBI hasil R&D dibandingkan dengan instrumen evaluasi diri yang sudah ada. Karena mempunyai karakteristik yakni: (a) komprehensif, karena komponen dan indikator mewakili hampir seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan; (b) holistik, karena dapat mengungkap fakta sesungguhnya apa yang terjadi di sekolah; (c) mudah dilakukan; (d) temuan ED-SBI dapat digunakan sebagai evaluasi diri sekolah; (e) efektif digunakan sekolah tanpa mengganggu proses pembelajaran yang ada; (f) mendukung persiapan



akreditasi sekolah dan penjaminan mutu; serta (g) independen karena melibatkan komite sekolah.

## **2. *Wiwin Mistiani*: Evaluasi Reflektif Kurikulum PAI SMP Dalam Kehidupan Siswa**

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan pengamalan nilai-nilai keagamaan yang terdapat dalam kurikulum PAI yang telah diamalkan oleh siswa SMP dalam kehidupannya, (2) mendeskripsikan perbedaan persentase jumlah siswa yang mengamalkan nilai-nilai keagamaan yang terdapat dalam kurikulum PAI antara SMP Islam dan SMP Umum, (3) mendeskripsikan efektifitas kurikulum PAI SMP tahun 2006 dalam membentuk akhlak siswa, dan (4) mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi siswa dalam mengamalkan nilai-nilai keagamaan yang terdapat dalam kurikulum PAI dalam kehidupannya.

Penelitian ini adalah penelitian evaluasi dengan menggunakan model reflektif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan campuran. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP di kabupaten Sleman. Sampel siswa dipilih menggunakan teknik *multistage* dan *proportional random sampling*, sedang jumlah siswa ditentukan dengan menggunakan rumus Solvin. Data dikumpulkan dengan menggunakan angket, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan meliputi: (1) deskriptif kualitatif, (2) deskriptif kuantitatif, dan (3) uji beda dengan uji t tes.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) nilai-nilai keagamaan yang terdapat dalam kurikulum PAI yang terdiri dari nilai ibadah (taharah, shalat, puasa, zakat) dan akhlak (*tawaduk*, taat, *qanaah*, sabar, kerja keras, ulet, teliti, *zuhud*, *tawakal* dan adab makan/minum) telah di amalkan oleh siswa SMP kabupaten Sleman. Nilai yang paling banyak diamalkan oleh siswa adalah nilai ibadah pada indikator pelaksanaan zakat, sedangkan yang paling sedikit adalah pelaksanaan shalat tepat pada waktunya, (2) tidak terdapat perbedaan persentase jumlah siswa yang mengamalkan nilai-nilai keagamaan antara SMP Islam dan SMP Umum/non Islam, namun jika dicermati secara terperinci pada pengamalan nilai-nilai tertentu persentase jumlah siswa SMP Islam lebih banyak mengamalkan nilai-nilai keagamaan dibandingkan siswa SMP Umum, (3) kurikulum PAI SMP tahun 2006 efektif dalam

membentuk akhlak siswa, dan (4) kendala-kendala pengamalan nilai keagamaan yang terdapat dalam kurikulum PAI SMP dalam kehidupan siswa secara umum meliputi kurangnya kesadaran siswa untuk mengamalkan nilai-nilai keagamaan, kurangnya pemahaman siswa terhadap pelaksanaan nilai-nilai keagamaan, kurangnya motivasi terhadap pengamalan nilai di lingkungan keluarga, dan kurangnya dukungan sekolah dalam mengamalkan nilai keagamaan yang terdapat dalam kurikulum PAI.

### **3. Selly Rahmawati : Evaluasi Pendidikan Karakter di SMA Berciri Islam**

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi pendidikan karakter di SMA berciri Islam. Selain itu penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan hambatan implementasi pendidikan karakter di SMA berciri Islam.

Penelitian ini adalah penelitian *mix* kualitatif dan kuantitatif. Subjek penelitian terfokus pada siswa, guru, dan kepala sekolah SMA berciri Islam. SMA berciri Islam dalam penelitian ini difokuskan pada 3 SMA berciri islam yang berasal dari yayasan NU (SMA Ma'arif), Muhammadiyah (SMA Muhammadiyah 7), dan PIRI (SMA PIRI 2). Model evaluasi yang digunakan adalah model *Provus Discrepancy*. Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan teknik *purposive*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan angket. Validitas angket dilakukan dengan menggunakan validasi isi dan konstruk, sedangkan reliabilitas dengan menggunakan formula Cronbach's Alpha. Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan menggunakan *triangulasi teknik*. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan: *Pertama*, pendidikan karakter di SMA berciri Islam telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan pedoman pelaksanaan pendidikan karakter. Hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan pendidikan karakter di kelas, di luar kelas, dan pembudayaan karakternya. Pendidikan karakter dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas menggunakan pendekatan kontekstual dengan strategi pembelajaran berbasis masalah dan metode siswa aktif. Guru SMA berciri Islam juga telah melakukan penanaman nilai karakter dengan mengajarkan pemahaman tentang karakter, memotivasi agar berperilaku baik. Guru juga menjadi

teladan bagi siswa dalam kedisiplinan dan mematuhi aturan. Pendidikan karakter di luar kelas juga telah dilaksanakan dengan baik yang terlihat dari usaha kepala sekolah dalam melakukan sosialisasi pendidikan karakter pada guru, orang tua siswa, dan komite sekolah. Selain itu, sekolah juga melakukan penanaman nilai-nilai karakter dengan memasukkannya dalam visi, misi, tujuan, dan aturan sekolah. Pembudayaan karakter di sekolah juga telah dilaksanakan dengan baik terlihat dari pengkondisian sekolah yang mendukung pendidikan karakter, sekolah yang menanamkan nilai-nilai religius, kedisiplinan, peduli lingkungan, peduli sosial, kejujuran, dan cinta tanah air dalam setiap kegiatan sekolah, dan sekolah juga telah melakukan kegiatan-kegiatan yang mengembangkan karakter. *Kedua*, hambatan implementasi pendidikan karakter di SMA berciri Islam adalah karena faktor siswa (jumlah siswa yang sedikit, karakteristik dan latarbelakang siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu) dan faktor sekolah (minimnya pendanaan, lingkungan sekolah yang tidak kondusif, dan kurangnya pengetahuan sekolah dalam melakukan penilaian pendidikan karakter).

#### **D. Hasil Penelitian Tahun Ketiga**

Penelitian tahun ketiga adalah tahapan desiminasi model, yang dilakukan melalui uji pengguna. Uji pengguna tersebut dilakukan melalui FGD dengan mengundang para praktisi penjaminan mutu di sekolah, yaitu Wakasek Urusan Penjaminan Mutu dari 10 SMA, Wakasek UPM dari 10 SMK di D.I. Yogyakarta. Selain itu, pada penelitian tahun ketiga ini juga dilakukan penerapan instrumen untuk memetakan (mengevaluasi) pelaksanaan penjaminan mutu yang dilakukan di 20 sekolah sasaran.

##### **1. Hasil Penelitian Tema Payung tahun Ketiga**

Hasil penelitian tema payung tahun ketiga menunjukkan sebagai berikut.

- d. Model, mekanisme atau prosedur, panduan, dan instrumen evaluasi penjaminan mutu sekolah yang telah dikembangkan valid, praktis, dan mudah dipahami oleh para pelaksana penjaminan mutu di sekolah, sehingga dapat digunakan sebagai perangkat dalam melakukan evaluasi penjaminan mutu sekolah.

- e. Ruang lingkup penjaminan mutu yang dilakukan di sekolah sasaran, telah mencakup komponen input (baik input peserta didik, kurikulum, pendidik, sarana dan prasarana), komponen proses (mutu manajemen sekolah, proses pembelajaran, dan kultur sekolah), komponen output baik akademik maupun non akademik, dan komponen outcomes, khususnya untuk SMK (yang mencakup: relevansi dengan kebutuhan, masa tunggu lulusan dan karir lulusan).
- f. Pada sekolah-sekolah eks RSBI (SMA dan SMK Eks RSBI), penjaminan mutu telah dilakukan dengan baik, terencana, dan terukur. Namun demikian, setelah tidak lagi menyandang status sebagai RSBI, maka terjadi penurunan intensitas dalam pelaksanaan penjaminan mutu.
- g. Dalam peningkatan mutu input peserta didik, sekolah juga tidak sepenuhnya mengacu pada standar mutu input untuk sekolah-sekolah RSBI, tetapi harus mengacu pada kebijakan Dinas Pendidikan, dan karena adanya berbagai keterbatasan.
- h. Pada sebagian besar (>80 %) SMA dan SMK Eks RSBI, penjaminan mutu tidak mengalami perubahan setelah sekolah yang bersangkutan tidak lagi berstatus sebagai RSBI. Setelah tidak lagi menyandang status sebagai RSBI, sekolah-sekolah tersebut tetap melakukan penjaminan mutu sekolah dengan mengacu pada standar ISO, dan
- i. Peran stakeholders eksternal (seperti: LPMP, P4-TK, dan Dinas Pendidikan) dalam melakukan penjaminan mutu sangat kurang. Demikian pula, sekolah juga belum melibatkan Perguruan Tinggi yang ada di daerah untuk ikut melakukan penjaminan mutu sekolah.

## **2. Hasil Penelitian Tema Anak Payung tahun Ketiga**

- a. Hasil penelitian Budi Santoso (2013), mengenai Pengembangan model Pembelajaran 2in1 dalam meningkatkan prestasi belajar Menggambar Autocad, menunjukkan bahwa: (1) model pembelajaran 2in1 yang merupakan adopsi dan modifikasi model Dick and Carry (1996) telah mampu menghasilkan model pembelajaran yang layak; (2) model pembelajaran 2in1 efektif dalam meningkatkan prestasi belajar Autocad siswa; (3) tingkat keefektifan model pembelajaran 2in1 dalam meningkatkan prestasi belajar Autocad siswa dalam

kategori sedang, dengan indeks gain score sebesar  $t = 0,403$ . Demikian pula, hasil uji statistik  $t$  menunjukkan bahwa model pembelajaran 2in1 telah mampu meningkatkan prestasi belajar Autocad secara signifikan.

- b. Hasil penelitian Wartoni (2013) menunjukkan bahwa: (1) kondisi (KKG) sebagai wadah dalam meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme guru dikategorikan baik, (2) kondisi sarana dan prasarana KKG dikategorikan baik dan mendukung proses pelaksanaan kegiatan KKG, (3) kondisi organisasi dikategorikan baik dan program telah berjalan dengan baik sesuai dengan tujuannya, (4) peran kelompok kerja guru (KKG) dalam meningkatkan dan mengembangkan profesional guru dikategorikan baik, dan (5) kegiatan KKG terbukti mampu meningkatkan kompetensi guru dan hasil belajar siswa meningkat.

## **E. Pembahasan**

Evaluasi pendidikan dapat dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal, dan ruang lingkup penjaminan mutu sekolah akan mencakup komponen-komponen sistem pendidikan, yang meliputi: input, proses, produk atau output, dan outcomes. Evaluasi terhadap pelaksanaan penjaminan mutu input siswa telah dilakukan oleh pihak eksternal sekolah dalam bentuk evaluasi terhadap sistem seleksi penerimaan peserta didik baru. Evaluasi terhadap pelaksanaan penjaminan mutu input guru dilakukan melalui evaluasi terhadap pelaksanaan penilaian kinerja profesional guru, dan Evaluasi Keefektifan Kelompok Kerja Guru di tingkat Sekolah Dasar (KKG) pada program bermutu dalam mengembangkan profesionalisme guru.

Evaluasi terhadap penjaminan mutu proses pembelajaran dilakukan melalui: (1) evaluasi proses pembelajaran dan penilaian, (2) evaluasi terhadap proses pendidikan karakter di sekolah, dan (3) pengembangan model pembelajaran yang inovatif dalam rangka meningkatkan keefektifan pembelajaran. Evaluasi terhadap pelaksanaan penjaminan mutu *output* atau hasil pendidikan di sekolah dilakukan melalui evaluasi mengenai kualitas (karakteristik) soal uji coba Unas dan kajian mengenai pemanfaatan hasil Unas untuk perbaikan pembelajaran.

Sementara itu, evaluasi terhadap pelaksanaan penjaminan mutu *outcomes* dapat dilakukan dalam bentuk kajian terhadap relevansi mutu lulusan sekolah dengan kebutuhan. Selain itu, evaluasi penjaminan mutu terhadap *outcomes* juga dilakukan dalam bentuk studi kajian reflektif kurikulum Pendidikan Agama Islam yang mempunyai misi dalam pengembangan akhlak mulia dalam kehidupan siswa sehari-hari.

Sebagaimana telah dikemukakan di muka, bahwa penelitian yang diusulkan ini termasuk penelitian riset dan pengembangan (R & D), yang telah dilakukan selama tiga (3) tahun. Pada penelitian tahun pertama, telah dihasilkan struktur dan komponen model evaluasi penjaminan mutu sekolah, serta prosedur atau mekanisme evaluasi penjaminan mutu sekolah, yang telah tervalidasi berdasarkan FGD dengan mengundang para pakar dari perguruan tinggi dan LPMP, asosiasi profesi, yaitu Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia (HEPI), Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI), dan ADGVI. Pada penelitian tahun kedua, yang telah dilaksanakan pada tahun 2012, telah dihasilkan panduan penggunaan model dan instrumen evaluasi penjaminan mutu sekolah, yang telah tervalidasi berdasarkan FGD dengan mengundang para pakar dan praktisi, dari perguruan tinggi, LPMP, dan P4-TK, serta pakar dari asosiasi profesi (HEPI, ADGVI, dan PGRI), pengawas (SMA, dan SMK), dan Wakasek Urusan Penjaminan Mutu (UPM) sebanyak 6 orang.

Sementara itu, pada penelitian tahun ketiga yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 ini, telah dilakukan diseminasi model melalui uji pengguna, yang mencakup prosedur dan panduan pelaksanaan penjaminan mutu. Uji pengguna tersebut dilakukan melalui FGD dengan mengundang responden: Wakasek Urusan Penjaminan Mutu dari 10 SMA, Wakasek UPM dari 10 SMK di D.I. Yogyakarta. Selain itu, pada penelitian tahun ketiga ini juga telah dilakukan penerapan instrumen evaluasi penjaminan mutu sekolah guna memetakan (mengevaluasi) pelaksanaan penjaminan mutu yang dilakukan pada sekolah sasaran.

Hasil penelitian tahun ketiga menunjukkan bahwa model, mekanisme atau prosedur, panduan, dan instrumen evaluasi penjaminan mutu sekolah yang telah dikembangkan valid, praktis, dan mudah dipahami oleh para pelaksana penjaminan

mutu di sekolah, sehingga dapat digunakan sebagai perangkat dalam melakukan evaluasi penjaminan mutu sekolah.

Hasil evaluasi penjaminan mutu yang dilakukan oleh 20 sekolah sasaran, menunjukkan bahwa ruang lingkup penjaminan mutu yang dilakukan di sekolah sasaran, telah mencakup komponen input (baik input peserta didik, kurikulum, pendidik, sarana dan prasarana), komponen proses (mutu manajemen sekolah, proses pembelajaran, dan kultur sekolah), komponen output baik akademik maupun non akademik, dan komponen outcomes, khususnya untuk SMK (yang mencakup: relevansi dengan kebutuhan, masa tunggu lulusan dan karir lulusan).

Pada sekolah-sekolah eks RSBI (SMA dan SMK Eks RSBI), penjaminan mutu telah dilakukan dengan baik, terencana, dan terukur. Namun demikian, setelah tidak lagi menyandang status sebagai RSBI, maka terjadi penurunan intensitas dalam pelaksanaan penjaminan mutu. Dalam peningkatan mutu input peserta didik, sekolah juga tidak sepenuhnya mengacu pada standar mutu input untuk sekolah-sekolah RSBI, tetapi harus mengacu pada kebijakan Dinas Pendidikan, dan karena adanya berbagai keterbatasan.

Demikian pula, pada sebagian besar (>80 %) SMA dan SMK Eks RSBI, penjaminan mutu tidak mengalami perubahan setelah sekolah yang bersangkutan tidak lagi berstatus sebagai RSBI. Setelah tidak lagi menyandang status sebagai RSBI, sekolah-sekolah tersebut tetap melakukan penjaminan mutu sekolah dengan mengacu pada standar ISO. Namun demikian, hasil evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu menunjukkan bahwa peran stakeholders eksternal (seperti: LPMP, P4-TK, dan Dinas Pendidikan) dalam melakukan penjaminan mutu sangat kurang. Demikian pula, sekolah juga belum melibatkan Perguruan Tinggi yang ada di daerah untuk ikut melakukan penjaminan mutu sekolah.

Dalam penelitian ini, evaluasi terhadap pelaksanaan penjaminan mutu sekolah dilakukan oleh pihak eksternal sekolah (tim peneliti) terhadap kinerja sekolah dalam melaksanakan penjaminan mutu, baik penjaminan mutu sekolah sebagai suatu entitas maupun kinerja sekolah dalam penjaminan mutu pada masing-masing komponen sistem persekolahan. Dalam penelitian ini, informasi yang diperoleh melalui penelitian anak payung merupakan bagian dari hasil penelitian payung. Hasil

penelitian anak payung berperan melakukan kajian terhadap penjaminan mutu pada masing-masing komponen model, yaitu: komponen input, proses, output atau produk, dan komponen dampak (outcomes), yaitu:

- 1) Evaluasi terhadap pelaksanaan penjaminan mutu sekolah sebagai suatu entitas dilakukan melalui pengembangan model evaluasi diri SMK Bertaraf Internasional.
- 2) Evaluasi terhadap pelaksanaan penjaminan mutu input siswa dilakukan melalui evaluasi terhadap sistem seleksi penerimaan peserta didik baru di SMA Bertaraf Internasional.
- 3) Evaluasi terhadap pelaksanaan penjaminan mutu input guru dilakukan melalui evaluasi terhadap pelaksanaan penilaian kinerja profesional guru SMK, dan Evaluasi Keefektifan Kelompok Kerja Guru di tingkat Sekolah Dasar (KKG) pada program bermutu.
- 4) Evaluasi terhadap penjaminan mutu proses pembelajaran dilakukan melalui: (1) evaluasi proses pembelajaran dan penilaian, (2) evaluasi terhadap proses pendidikan karakter di sekolah, dan (3) pengembangan model pembelajaran yang inovatif untuk meningkatkan keefektifan pembelajaran.
- 5) Evaluasi terhadap pelaksanaan penjaminan mutu *output* atau hasil pendidikan di sekolah dilakukan melalui evaluasi mengenai kualitas (karakteristik) soal uji coba Unas dan kajian mengenai pemanfaatan hasil Unas untuk perbaikan pembelajaran.
- 6) Evaluasi terhadap pelaksanaan penjaminan mutu *outcomes* dapat dilihat dari pelaksanaan penjaminan mutu *outcomes* yang dilakukan dalam bentuk kajian terhadap relevansi mutu lulusan sekolah dengan kebutuhan. Selain itu, evaluasi penjaminan mutu terhadap outcomes juga dilakukan dalam bentuk studi kajian reflektif kurikulum Pendidikan Agama Islam yang mempunyai misi dalam pengembangan akhlak mulia dalam kehidupan siswa sehari-hari.



## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan selama tiga tahun, yaitu tahun 2011 – 2013, dapat disimpulkan bahwa:

1. Model, mekanisme atau prosedur, panduan, dan instrumen evaluasi penjaminan mutu sekolah yang telah dikembangkan dalam penelitian ini telah dinyatakan valid, praktis, dan mudah dipahami, baik oleh para pakar dari Perguruan Tinggi, Asosiasi Profesi, P4-TK, LPMP, maupun para pelaksana penjaminan mutu di sekolah, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dan perangkat dalam melakukan evaluasi penjaminan mutu sekolah.
2. Hasil penelitian pada tahun pertama telah berhasil mempercepat kelulusan tiga mahasiswa S-2 Program Pascasarjana UNY, sehingga dapat memperpendek masa studi menjadi sekitar 22 bulan. Sementara itu, tiga mahasiswa S3 yang terlibat dalam penelitian ini diharapkan dapat lulus pada tahun kedua, karena saat ini dua mahasiswa diantaranya sedang melaksanakan pengumpulan data.
3. Hasil penelitian tahun kedua juga telah berhasil mempercepat kelulusan dua mahasiswa S-2 dan satu mahasiswa program Doktor, Program Pascasarjana UNY. Bagi mahasiswa S2, keterlibatannya dalam penelitian tema payung ini telah dapat memperpendek masa studi menjadi sekitar 23 bulan. Sedangkan satu mahasiswa S3 telah dapat lulus pada tahun kedua, dengan masa studi secara keseluruhan kurang dari 4 tahun. Sementara itu, bagi dua mahasiswa S3 yang lain saat ini mereka sedang melaksanakan pengumpulan data.
4. Hasil penelitian pada tahun ketiga telah berhasil mempercepat kelulusan dua mahasiswa S-2 Program Pascasarjana UNY, sehingga dapat memperpendek masa studi menjadi sekitar 23 bulan. Sementara itu, satu mahasiswa S3 yang terlibat dalam penelitian ini saat ini sedang menunggu penjadwalan untuk melaksanakan ujian hasil disertasinya (ujian tertutup), sedangkan satu mahasiswa S3 lainnya saat ini sedang melaksanakan pengumpulan data penelitian disertasinya.
5. Hasil evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu yang dilakukan pada 20 sekolah sasaran (10 SMK dan 10 SMA) di D.I. Yogyakarta, menunjukkan: (1) ruang

lingkup penjaminan mutu yang dilakukan di 20 sekolah sasaran (SMA dan SMK), telah mencakup semua komponen dalam sistem pendidikan, yaitu: komponen input, komponen proses, komponen output, dan khusus untuk juga telah mencakup komponen outcomes; (2) pada sekolah-sekolah eks RSBI (SMA dan SMK Eks RSBI), penjaminan mutu telah dilakukan dengan baik, terencana, dan terukur. Namun demikian, setelah tidak lagi menyandang status sebagai RSBI, maka terjadi penurunan intensitas dalam pelaksanaan penjaminan mutu; (3) dalam rangka penjaminan mutu input peserta didik, sekolah tidak sepenuhnya dapat melaksanakan dengan baik, karena adanya berbagai keterbatasan dan adanya kewajiban untuk mengacu pada kebijakan Dinas Pendidikan setempat, dan (4) peran stakeholders eksternal (seperti: LPMP, P4-TK, dan Dinas Pendidikan) dalam melakukan penjaminan mutu di SMA dan SMK adalah sangat kurang. Demikian pula, sekolah juga belum melibatkan Perguruan Tinggi yang ada di daerah untuk ikut melakukan penjaminan mutu sekolah.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan penjaminan mutu yang dilakukan oleh pihak internal sekolah cenderung belum dilaksanakan secara terencana dan efektif. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi, supervisi, dan pendampingan dari pihak eksternal sekolah (stakeholders) terhadap pelaksanaan penjaminan mutu yang dilakukan oleh pihak internal sekolah.
2. Peran pihak-pihak sebagai pemberi fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu yang dilakukan oleh sekolah masih sangat kurang dan cenderung tidak jelas. Untuk itu, diperlukan sosialisasi tentang mekanisme dan peran pihak-pihak eksternal dalam penjaminan mutu sekolah. Upaya ini akan dapat berjalan efektif jika didukung adanya intervensi dari pihak-pihak yang berwenang (terutama Dinas Pendidikan di daerah, dan Direktorat terkait), dengan melibatkan secara intensif pihak-pihak yang berkompeten, seperti: komite sekolah, LPMP, P4-TK, dan pihak perguruan tinggi.

3. Peran pihak-pihak eksternal sekolah sebagai pemberi fasilitasi dalam pelaksanaan penjaminan mutu yang dilakukan oleh sekolah masih sangat kurang dan cenderung tidak jelas. Untuk itu, diperlukan adanya reorientasi tentang tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dari pihak-pihak yang berwenang dalam melakukan penjaminan mutu pendidikan di daerah, seperti: LPMP dan P4-TK.

### **C. Hasil Penelitian yang dicapai pada tahun ke-1:**

Hasil penelitian pada tahun pertama telah berhasil mempercepat kelulusan tiga mahasiswa S-2 Program Pascasarjana UNY, sehingga dapat memperpendek masa studi menjadi sekitar 22 bulan. Sementara itu, tiga mahasiswa S3 diharapkan akan lulus pada tahun kedua. Hasil penelitian tiga mahasiswa S2 Program Pascasarjana UNY dalam rangka penyusunan tugas akhir Tesis dan hasil penelitian tema payung, dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Hasil penelitian tema payung tahun pertama menunjukkan bahwa: (1) model evaluasi penjaminan mutu sekolah yang telah dikembangkan valid untuk dijadikan acuan sebagai model evaluasi penjaminan mutu sekolah, (2) penjaminan mutu sekolah seharusnya dilakukan untuk semua komponen sistem pendidikan, yang meliputi: komponen input peserta didik, input sumber daya guru, dan input sumber daya lainnya, komponen proses, baik proses manajemen sekolah, pembelajaran, maupun pembentukan kultur sekolah, komponen output atau hasil pendidikan, dan komponen outcomes, (3) mekanisme evaluasi penjaminan mutu sekolah yang telah dikembangkan cukup jelas menggambarkan prosedur pelaksanaan evaluasi terhadap program penjaminan mutu sekolah.
2. Pelaksanaan penjaminan mutu input siswa dilakukan melalui pelaksanaan seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB), yang untuk SMA RSBI telah mengacu pada ketentuan yang berlaku, yaitu peraturan menteri Pendidikan Nasional. Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi dari peraturan menteri tersebut masih sangat variatif sesuai kondisi dan kemampuan sekolah masing-masing. Yang lebih memprihatinkan adalah bahwa pelaksanaan program PPDB tersebut belum dilakukan evaluasi mengenai efektivitasnya dalam menjaring calon-calon peserta didik SMA RSBI yang berkualitas.

3. Pelaksanaan penjaminan mutu komponen penilaian pendidikan sebagaimana hasil penelitian Ika Pranita Siregar (2011), menunjukkan bahwa sebagian besar SMA RSBI belum memanfaatkan informasi hasil penilaian (daya serap) untuk melakukan perbaikan pembelajaran. Hal ini tentu saja belum sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian, bahwa hasil penilaian seharusnya dapat dimanfaatkan yang salah satunya adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran.
4. Pelaksanaan penjaminan mutu output pendidikan di sekolah, salah satunya dapat dilakukan dengan mengevaluasi kualitas soal yang digunakan untuk uji coba Ujian Nasional. Hasil penelitian Hariyani (2011), menunjukkan bahwa kualitas soal buatan guru yang digunakan untuk uji coba UN perlu dievaluasi secara terus-menerus untuk menjamin terpenuhinya kualitas soal yang valid dan reliabel.

#### **D. Hasil Penelitian yang dicapai pada tahun ke-2:**

Hasil penelitian pada tahun kedua telah berhasil mempercepat kelulusan dua mahasiswa S-2 Program Pascasarjana UNY, sehingga dapat memperpendek masa studi menjadi sekitar 23 bulan. Selain itu, penelitian pada tahun kedua juga telah berhasil mempercepat kelulusan satu mahasiswa S3, sehingga dapat memperpendek masa studi menjadi kurang dari 4 tahun. Hasil penelitian dua mahasiswa S2 dan satu mahasiswa S-3 Program Pascasarjana UNY dalam rangka penyusunan tugas akhir Tesis dan Disertasi, serta hasil penelitian tema payung tahun kedua, dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Hasil penelitian Nuchron (2012), menunjukkan bahwa: (1) Model Evaluasi Diri SMK Bertaraf Internasional (SMK-BI) yang telah dikembangkan memiliki kepekaan, efektivitas, akurasi, dan presisi terhadap obyek yang diteliti, dan dapat mengungkap data yang dibutuhkan; (2) model ED-SMKBI mempunyai karakteristik yang unggul yakni: komprehensif, dapat mengungkap fakta sesungguhnya apa yang terjadi di sekolah, mudah digunakan, temuan ED-SMKBI dapat digunakan sebagai evaluasi diri sekolah, efektif digunakan sekolah tanpa mengganggu proses pembelajaran yang ada, dan mendukung persiapan akreditasi sekolah dan penjaminan mutu; dan (3) implikasi dari hasil temuan ini adalah bahwa untuk menetapkan kinerja sekolah sangat tergantung pada kualitas instrumen yang digunakan, oleh karena itu instrumen yang digunakan dalam

melakukan evaluasi diri dalam rangka penjaminan mutu sekolah harus memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi.

2. Hasil penelitian Wiwin Mistiani (2012), menunjukkan bahwa: (1) kurikulum PAI SMP tahun 2006 telah mampu mendorong siswa untuk mengamalkan ajaran agamanya sesuai dengan agama yang dianutnya, dan (2) kurikulum PAI SMP tahun 2006 efektif dalam membentuk akhlak mulia siswa. Adapun kendala-kendala dalam pengamalan nilai keagamaan terutama berkaitan dengan: kurangnya kesadaran dan motivasi siswa di lingkungan keluarga, dan kurangnya dukungan sekolah.
3. Hasil penelitian Selly Rahmawati (2012), menunjukkan bahwa: (1) pendidikan karakter di SMA berciri Islam telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan pedoman pelaksanaan pendidikan karakter, dan (2) hambatan implementasi pendidikan karakter di SMA berciri Islam terutama disebabkan oleh: kurangnya pengkondisian lingkungan sekolah, dan kurangnya pengetahuan sekolah dalam melakukan penilaian pendidikan karakter.
4. Hasil penelitian tema payung tahun kedua menunjukkan bahwa: (1) panduan evaluasi penjaminan mutu sekolah yang telah dikembangkan adalah praktis untuk dijadikan panduan dalam pelaksanaan evaluasi penjaminan mutu sekolah, (2) instrumen evaluasi penjaminan mutu sekolah yang telah di-kembangkan adalah valid dan praktis untuk dijadikan instrumen dalam pelaksanaan evaluasi penjaminan mutu sekolah, (3) pada sekolah-sekolah non RSBI, penjaminan mutu sekolah belum dilakukan secara terprogram, dan belum dilakukan oleh gugus tugas (Pokja) secara khusus, dan (4) penjaminan mutu sekolah yang dilakukan secara internal oleh pihak sekolah belum dilakukan evaluasi secara baik, sehingga sulit diketahui tingkat keberhasilan maupun kendalanya.

#### **E. Hasil Penelitian yang dicapai pada tahun ke-3:**

Hasil penelitian pada tahun ketiga telah berhasil mempercepat kelulusan dua mahasiswa S-2 Program Pascasarjana UNY, sehingga dapat memperpendek masa studi menjadi sekitar 23 bulan. Selain itu, penelitian pada tahun ketiga juga telah berhasil mempercepat kelulusan satu mahasiswa S3, yang saat ini tengah menunggu penjadwalan untuk melakukan ujian hasil (ujian tertutup) disertasinya. Hasil penelitian

dua mahasiswa S2 Program Pascasarjana UNY dalam rangka penyusunan tugas akhir Tesis, serta hasil penelitian tema payung tahun ketiga, dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Hasil penelitian tema payung tahun ketiga menunjukkan bahwa: (1) model, mekanisme atau prosedur, panduan, dan instrumen evaluasi penjaminan mutu sekolah yang telah dikembangkan valid, praktis, dan mudah dipahami oleh para pelaksana penjaminan mutu di sekolah, sehingga dapat digunakan sebagai perangkat dalam melakukan evaluasi penjaminan mutu sekolah, (2) ruang lingkup penjaminan mutu yang dilakukan di sekolah sasaran, telah mencakup komponen input (baik input peserta didik, kurikulum, pendidik, sarana dan prasarana), komponen proses (mutu manajemen sekolah, proses pembelajaran, dan kultur sekolah), komponen output baik akademik maupun non akademik, dan komponen outcomes, khususnya untuk SMK (yang mencakup: relevansi dengan kebutuhan, masa tunggu lulusan dan karir lulusan), (3) pada sekolah-sekolah eks RSBI (SMA dan SMK Eks RSBI), penjaminan mutu telah dilakukan dengan baik, terencana, dan terukur. Namun demikian, setelah tidak lagi menyandang status sebagai RSBI, maka terjadi penurunan intensitas dalam pelaksanaan penjaminan mutu, (4) dalam peningkatan mutu input peserta didik, sekolah juga tidak sepenuhnya mengacu pada standar mutu input untuk sekolah-sekolah RSBI, tetapi harus mengacu pada kebijakan Dinas Pendidikan, dan karena adanya berbagai keterbatasan, (5) pada sebagian besar (>80 %) SMA dan SMK Eks RSBI, penjaminan mutu tidak mengalami perubahan setelah sekolah yang bersangkutan tidak lagi berstatus sebagai RSBI. Setelah tidak lagi menyandang status sebagai RSBI, sekolah-sekolah tersebut tetap melakukan penjaminan mutu sekolah dengan mengacu pada standar ISO, dan (6) peran stakeholders eksternal (seperti: LPMP, P4-TK, dan Dinas Pendidikan) dalam melakukan penjaminan mutu sangat kurang. Demikian pula, sekolah juga belum melibatkan Perguruan Tinggi yang ada di daerah untuk ikut melakukan penjaminan mutu sekolah.
2. Hasil penelitian Budi Santoso (2013), mengenai Pengembangan model Pembelajaran 2in1 dalam meningkatkan prestasi belajar Menggambar Autocad, menunjukkan bahwa: (1) model pembelajaran 2in1 yang merupakan adopsi dan modifikasi model Dick and Carry (1996) telah mampu menghasilkan model pembelajaran yang layak; (2) model pembelajaran 2in1 efektif dalam meningkatkan prestasi belajar Autocad siswa; (3) tingkat keefektifan model

pembelajaran 2in1 dalam meningkatkan prestasi belajar Autocad siswa dalam kategori sedang, dengan indeks gain score sebesar  $\langle e \rangle = 0,403$ . Demikian pula, hasil uji statistik t menunjukkan bahwa model pembelajaran 2in1 telah mampu meningkatkan prestasi belajar Autocad secara signifikan.

3. Hasil penelitian Wartoni (2013) menunjukkan bahwa: (1) kondisi (KKG) sebagai wadah dalam meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme guru dikategorikan baik, (2) kondisi sarana dan prasarana KKG dikategorikan baik dan mendukung proses pelaksanaan kegiatan KKG, (3) kondisi organisasi dikategorikan baik dan program telah berjalan dengan baik sesuai dengan tujuannya, (4) peran kelompok kerja guru (KKG) dalam meningkatkan dan mengembangkan profesional guru dikategorikan baik, dan (5) kegiatan KKG terbukti mampu meningkatkan kompetensi guru dan hasil belajar siswa meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Moh. (2002). Sistem Penjaminan Mutu Sekolah. *Laporan Penelitian*. Bandung: UPI.
- Budi Santoso (2013). Pengembangan Model Pembelajaran *2in1* untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Mata Pelajaran AutoCad Siswa Kelas X Kompetensi Keahlian Gambar Bangunan SMK Muhammadiyah Pakem. *Tesis*. Yogyakarta: Program Pascasarjana UNY
- Burhanuddin Tola & Furqon (2007). Pengembangan model penilaian sekolah efektif. Artikel diambil tanggal 2 Februari 2008 dari <http://www.Skripsi-tesis.com>.
- Direktorat PLP (2002). Akreditasi Sekolah: Konsep dan Pelaksanaannya. *Materi Pelatihan Terpadu untuk Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota*.
- Frazier, C.M. (2002). Quality Control and Quality Assurance Issues. *Report to American Council on Education Presidents' Task Force on Teacher Education*.
- Friyatmi (2011). Karakteristik Instrumen Tes dan Sistem Seleksi Siswa Baru Rintisan SMA Bertaraf Internasional di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Tesis*. Yogyakarta: Program Pascasarjana UNY.
- Haryani (2011). Penyetaraan Horisontal Perangkat Tes Ujicoba Ujian Nasional Matematika SMA Program IPA di SMAN Kota Yogyakarta Tahun Pelajaran 2009/2010. *Tesis*. Yogyakarta: Program Pascasarjana UNY.
- Ika Pranita Siregar (2011). Analisis Hasil Ujian Nasional Kimia SMA di Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Tesis*. Yogyakarta: Program Pascasarjana UNY.
- Kepmendiknas Nomor 087/U/2002, tentang Akreditasi Sekolah.*
- Lowrie, Jr. and Roy, W. (2000). *School Accreditation*. Association of Christian Schools International, Colorado Springs, USA.
- Nuchron (2012). Model Evaluasi Diri Sekolah Menengah Kejuruan Bertaraf Internasional (SMK-SBI). *Disertasi*. Yogyakarta: Program Pascasarjana UNY.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah.*
- Quality Assurance Assessment. Australian Government. (2003). *A Discussion Paper. Performance Reporting and Quality Assurance Assessment for the Third Control Period July 1, 2003 to June 30, 2006*. <http://www.qpmg-com>.



- Preedy, M. (Ed.) (1993). *Managing the effective school*. London: Open University.
- Riddell, S. & S. Brown (Eds.) (1991). *School effectiveness research: messages for school improvement*. London: Routledge.
- Scheerens, J. (1992). *Effective schooling*. London: Cassell.
- Selly Rahmawati (2012). Evaluasi Pendidikan Karakter di SMA Berciri Islam. *Tesis*. Yogyakarta: Program Pascasarjana UNY.
- Suyata (1998). Perbaikan mutu pendidikan, transformasi sekolah dan implikasi kebijakan. *Pidato Dies Disampaikan Pada Upacara Dies Natalis XXXIV IKIP Yogyakarta, tanggal 3 Mei 1998*.
- Ton Vroeijenstijn (2002). "Quality Assurance in Europe: Background and The State of Arts", *Makalah disampaikan pada seminar "On Quality Assurance in Higher Education", Yogyakarta July 18 -19, 2002*.
- Townsend, T. (Ed.) (1994). *Effective schooling for the community. core-plus education*. London: Routledge.
- UGM (2002). Jaminan Mutu Pendidikan Tinggi. *Makalah Disampaikan Pada seminar "On Quality Assurance in Higher Education", Yogyakarta July 18 -19, 2002*.
- Umaedi (2000). Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. *Makalah Disampaikan pada Konvensi Pendidikan Nasional, Tanggal 19 – 22 September 2000*.
- Umar, S. (2000). Ujian Akhir Sebagai Subsistem Pendidikan Dalam Rangka Pengendalian Mutu. *Makalah Disampaikan pada Seminar Ujian Akhir Nasional, Tanggal 29 Agustus 2000*.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Wartoni (2013). Evaluasi Keefektifan Kelompok Kerja Guru (KKG) pada Program BERMUTU (*Better Education through Reformed Management and Universal Teacher Upgrading*) di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. *Tesis*. Yogyakarta: Program Pascasarjana UNY.
- Wiwin Mistiani (2012). Evaluasi Reflektif Kurikulum Pendidikan Agama Islam SMP Dalam Kehidupan Siswa. *Tesis*. Yogyakarta: Program Pascasarjana UNY.

# **PANDUAN EVALUASI PENJAMINAN MUTU SEKOLAH**



**Peneliti:**

**Prof. Soenarto, Ph. D.  
Prof. Dr. Badrun Kartowagiran  
Dr. Amat Jaedun, M.Pd.**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
2013**

## **A. Latar Belakang**

Dalam era global seperti saat ini, pendidikan yang bermutu merupakan suatu keharusan. Oleh karena itu, upaya peningkatan mutu pendidikan merupakan hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Sehubungan dengan penjaminan mutu, pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, menyatakan bahwa penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan perlu dilakukan dalam tiga program terintegrasi yaitu evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Ketiga program tersebut merupakan bentuk penjaminan mutu pendidikan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat agar dapat memperoleh layanan dan hasil pendidikan yang sesuai dengan yang dijanjikan oleh penyelenggara pendidikan.

Selain itu, dalam pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dinyatakan bahwa setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan yang dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

Betapa pentingnya penjaminan mutu bagi sekolah atau satuan pendidikan, dan sudah banyak sekolah yang mencoba melakukan penjaminan mutu. Namun sayangnya, sampai saat ini belum ada model evaluasi penjaminan mutu sekolah. Oleh karenanya, penelitian ini akan mengembangkan suatu model evaluasi penjaminan mutu sekolah.

Dalam panduan evaluasi penjaminan mutu yang disusun ini, mencakup: (1) Pengertian atau konsep tentang penjaminan mutu sekolah, (2) Komponen penjaminan mutu sekolah, (3) Model Evaluasi Penjaminan Mutu Sekolah, (4) Mekanisme atau Prosedur Evaluasi Penjaminan Mutu Sekolah, dan dilengkapi dengan (5) Instrumen Evaluasi Penjaminan Mutu Sekolah.

## **B. Pengertian Penjaminan Mutu Sekolah**

Upaya peningkatan mutu pendidikan tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan manajemen mutu pendidikan. Dalam manajemen mutu, semua fungsi manajemen yang dijalankan oleh para manajer pendidikan di sekolah (kepala sekolah) diarahkan untuk dapat memberikan kepuasan kepada para pelanggannya (*customer*), terutama kepada pelanggan eksternal, seperti: siswa, orangtua atau masyarakat pemakai lulusan. Dalam upaya memberikan kepuasan kepada pelanggan tersebut diperlukan suatu patokan atau standar tertentu sebagai kriteria, dan layanan pendidikan yang diberikan seharusnya sesuai atau jika mungkin dapat melampaui kriteria minimal tersebut. Dengan demikian, semua fungsi manajemen pendidikan diarahkan agar semua layanan pendidikan yang diberikan tersebut paling tidak memenuhi atau jika memungkinkan dapat melebihi harapan pelanggan atau *customer* yang tercermin dari kriteria minimal tersebut.

Oleh karena itu, dalam manajemen mutu pendidikan diperlukan suatu upaya pengelolaan mutu dalam bentuk penjaminan mutu (*quality assurance*), yang akan memberikan jaminan kepada pelanggan bahwa semua aspek yang terkait dengan layanan pendidikan yang diberikan oleh lembaga pendidikan tersebut dapat mencapai standar mutu tertentu, sehingga output yang dihasilkan oleh lembaga atau satuan pendidikan tersebut sesuai dengan yang dijanjikan. Konsep yang terkait dengan manajemen mutu ini dikenal dengan Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*).

## **C. Komponen Penjaminan Mutu Sekolah**

Tom Vroeijenstijn (2002) mendefinisikan penjaminan mutu (QA) dengan "*Continuous attention to reality for improvement and enhancement*" dengan tiga pertanyaan dasar, yaitu: (1) *Are we doing the right things?*, (2) *In the right way?*, dan (3) *Achieve the right goals?*.

Dengan mengacu pada pendapat tersebut, maka penjaminan mutu pendidikan adalah program untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi dan koreksi sebagai tindakan penyempurnaan, atau peningkatan mutu yang dilakukan secara kontinyu dan sistematis terhadap semua aspek pendidikan (sarana/prasarana,

pengelolaan, kepemimpinan, maupun proses pembelajaran dan hasil) dalam rangka pencapaian standar yang telah ditetapkan.

Di negara bagian New South Wales, Australia, program penjaminan mutu pendidikan ini dilaksanakan melalui *Directorate of Quality Assurance, Department of School Education NSW*, yang diarahkan pada penjaminan mutu untuk tiga komponen sistemik pendidikan, yaitu: (1) Komponen belajar mengajar, (2) Kepemimpinan dan budaya sekolah, dan (3) Pengembangan manajemen sekolah.

Di Amerika Serikat, penjaminan mutu guru diukur berdasarkan kriteria: (1) *judging basic skills*, (2) *knowledge*, dan (3) *performance*. *Judging basic skills*, menyangkut kualitas dan konfirmasi mengenai keterampilan dasar guru, *knowledge* menyangkut pengetahuan umum dan kemampuan isi materi, sedangkan *performance* berkaitan dengan penampilan guru dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, seorang guru yang baik adalah mereka yang memiliki keterampilan dasar sebagai guru, menguasai materi yang akan diajarkan dengan baik, dan mampu menyampaikan isi materi dalam proses pembelajaran dengan baik dan memikat (Frazier, 2002).

Demikian pula di Jerman, penilaian penjaminan mutu pendidikan juga sudah berkembang dengan baik. Mekanisme penilaian penjaminan mutu dimulai dari evaluasi diri oleh internal sekolah. Selanjutnya, terhadap hasil evaluasi diri tersebut dilakukan validasi. Setelah itu, dilakukan verifikasi yang meliputi penilaian terhadap aspek-aspek proses dan penilaian terhadap hasil.

Di Hongkong, pelaksanaan penjaminan mutu sekolah, yang dikenal dengan nama Kerangka Kerja Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (*School Education Quality Assurance Framework*), mencakup dua kegiatan utama, yaitu penilaian yang dilakukan melalui evaluasi diri sekolah (*School Self-Evaluation*) dan pengawasan atau inspeksi terhadap pelaksanaan penjaminan mutu (*QA Inspection*). Dalam rangka pelaksanaan evaluasi diri dan inspeksi penjaminan mutu tersebut telah dikembangkan indikator-indikator kinerja yang mengacu pada tujuan sekolah. Adapun indikator-indikator kinerja yang dijadikan acuan dalam penilaian yang dilakukan dalam proses penjaminan mutu tersebut meliputi empat ranah sebagai berikut: (a) Manajemen dan organisasi, (b) Pembelajaran, (c) Dukungan terhadap siswa dan pengembangan etos sekolah, dan (d) Prestasi belajar.

#### **D. Model Evaluasi Penjaminan Mutu**

Model penjaminan mutu yang dikembangkan dalam penelitian ini, mencakup penjaminan mutu internal dan penjaminan mutu eksternal. Penjaminan mutu internal dilakukan oleh pihak internal sekolah, yang merupakan tanggung jawab kepala sekolah beserta staf yang berwenang, yang terdiri dari pemantauan berkelanjutan, evaluasi oleh semua warga sekolah, evaluasi oleh lulusan maupun pengguna lulusan.

Sedangkan penjaminan mutu eksternal umumnya dilakukan oleh pihak eksternal sekolah, berupa penilaian kinerja sekolah sebagai suatu entitas melalui akreditasi sekolah, penilaian prestasi akademik oleh pihak pemerintah, dalam bentuk Ujian Nasional, dan penilaian terhadap kinerja sekolah penerima *block grant* peningkatan mutu, ataupun penilaian oleh pihak-pihak eksternal sekolah lainnya.

##### **1. Penjaminan Mutu Internal**

Penjaminan mutu sekolah secara internal dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut.

###### **a) Pemantauan Berkelanjutan**

Pemantauan berkelanjutan terhadap pelaksanaan kegiatan akademik menjadi tanggungjawab pimpinan sekolah secara keseluruhan, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Wakil Kepala Sekolah atau staf UPM yang ditunjuk. Dengan adanya pemantauan berkelanjutan ini, maka setiap saat dapat dilakukan pengecekan apakah pelaksanaan kegiatan akademik atau program sekolah sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga tindakan perbaikan dapat segera direncanakan dan dilaksanakan.

###### **b) Evaluasi oleh Warga Sekolah, Lulusan dan Pengguna Lulusan**

Dalam sistem penjaminan mutu internal, semua warga sekolah, termasuk siswa, juga dapat dilibatkan dalam pemantauan berkelanjutan terhadap kegiatan akademik. Pemantauan dan evaluasi oleh guru dan tenaga kependidikan dapat dijangkau melalui rapat kerja rutin, sedangkan evaluasi oleh siswa dapat berupa umpan balik yang dapat dijangkau melalui pengisian kuesioner untuk menilai kinerja pembelajaran yang dilakukan oleh guru maupun kondisi iklim akademik di sekolah.

Evaluasi dari lulusan dan pengguna lulusan juga dapat dilakukan melalui kuesioner yang dikirimkan secara berkala kepada lulusan/alumni dan pengguna lulusan. Mekanisme untuk memperoleh informasi dari lulusan dan penggunaan lulusan ini disebut sebagai studi penelusuran lulusan (*tracer study*).

### **c) Evaluasi Diri**

Kemampuan melakukan evaluasi diri merupakan indikator kematangan dari suatu institusi sekolah. Evaluasi diri merupakan suatu kegiatan yang sangat penting sehingga dianggap sebagai salah satu kegiatan utama dalam sektor sekolah. Evaluasi diri oleh sekolah bukan hanya suatu proses yang harus dilakukan pada saat-saat khusus, misalnya dalam rangka menghadapi akreditasi ataupun untuk mengajukan proposal untuk memperoleh hibah tertentu. Seyogyanya, kegiatan evaluasi diri menjadi suatu kegiatan yang dilaksanakan secara rutin dalam rangka melakukan penjaminan mutu internal.

### **d) Audit Akademik Internal**

Audit akademik internal meliputi kegiatan pengumpulan informasi secara sistematis dan verifikasi untuk menilai apakah keseluruhan kegiatan akademik berjalan sebagaimana mestinya untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Untuk melakukan audit akademik internal tersebut, kepala sekolah dapat membentuk tim khusus sebagai tim audit.

## **2) Penjaminan Mutu Eksternal**

Penjaminan mutu secara eksternal dilakukan untuk meningkatkan “keyakinan” bahwa lulusan yang dihasilkan oleh suatu institusi sekolah telah memenuhi standar atau baku mutu tertentu. Penjaminan mutu secara eksternal dapat dilakukan dengan mekanisme berikut.

### **a) Mutu Sekolah secara Kolektif**

Penjaminan mutu eksternal terhadap kinerja sekolah sebagai entitas dilakukan melalui penilaian kinerja sekolah sebagai suatu entitas melalui akreditasi sekolah, yang dilakukan oleh badan yang memiliki otoritas, yaitu Badan Akreditasi Sekolah (BAS).

### **b) Penguji Eksternal (*External Examiner*)**

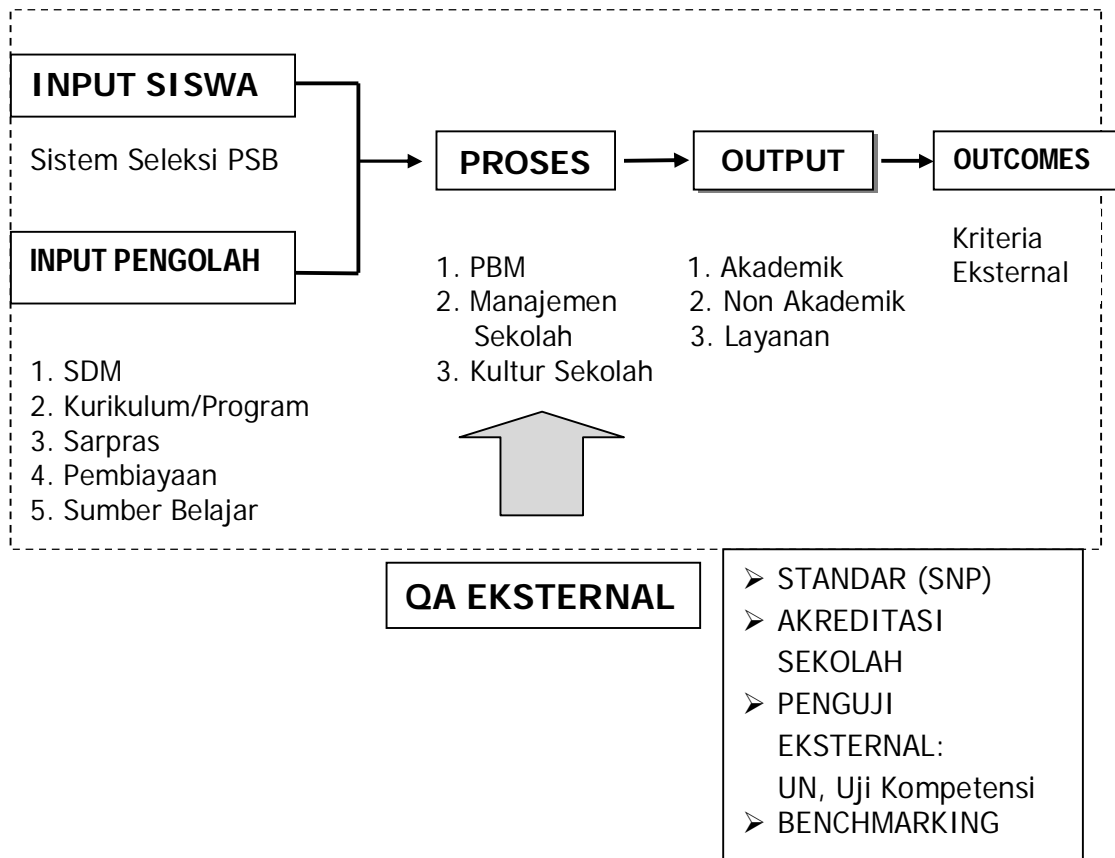
Penjaminan mutu eksternal juga dapat dilakukan melalui penilaian prestasi akademik oleh pihak pemerintah, yaitu dalam bentuk Ujian Nasional, dan penilaian terhadap kinerja sekolah penerima *block grant* peningkatan mutu oleh tim Monev, ataupun penilaian oleh pihak-pihak eksternal sekolah lainnya.

## **E. Mekanisme/Prosedur Evaluasi Penjaminan Mutu Sekolah**

Dalam perspektif manajemen mutu, upaya penjaminan mutu suatu lembaga atau satuan pendidikan terutama harus dilakukan oleh pihak internal sekolah yang bersangkutan sebagai bagian dari proses manajemen mutu. Namun demikian, upaya pengawasan atau pengendalian terhadap pelaksanaan penjaminan mutu yang dilakukan oleh pihak internal sekolah tersebut dapat dilakukan juga oleh pihak eksternal sekolah. Salah satu mekanisme yang dapat ditempuh dalam rangka penjaminan mutu sekolah atau satuan pendidikan yang dilakukan oleh pihak eksternal sekolah adalah melalui akreditasi sekolah, yang selama ini dilakukan Badan Akreditasi Sekolah (BAS), dan melalui penguji eksternal, seperti: Ujian Nasional oleh pemerintah, maupun uji kompetensi bagi siswa SMK yang melibatkan penilai dari dunia usaha/industri.

Pada prinsipnya, upaya manajemen mutu dalam rangka penjaminan mutu tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan proses akreditasi suatu sekolah atau satuan pendidikan tertentu. Penjaminan mutu (*Quality Assurance*) adalah upaya pengelolaan mutu yang dilakukan oleh pihak internal sekolah, dalam rangka untuk memberikan jaminan bahwa semua aspek yang terkait dengan layanan pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga atau satuan pendidikan tertentu dapat mencapai suatu standar mutu tertentu. Sementara itu, akreditasi sekolah atau satuan pendidikan merupakan upaya untuk memberikan pengakuan terhadap suatu institusi pendidikan (satuan pendidikan) oleh suatu lembaga (BAS) yang bersifat eksternal yang menyatakan bahwa lembaga pendidikan tersebut dapat memberikan layanan pendidikan dengan standar kualitas tertentu sesuai dengan status akreditasi yang disandangnya. Gambaran mengenai model dan mekanisme atau prosedur Evaluasi Penjaminan Mutu Sekolah yang telah disusun adalah sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 1 dan 2.



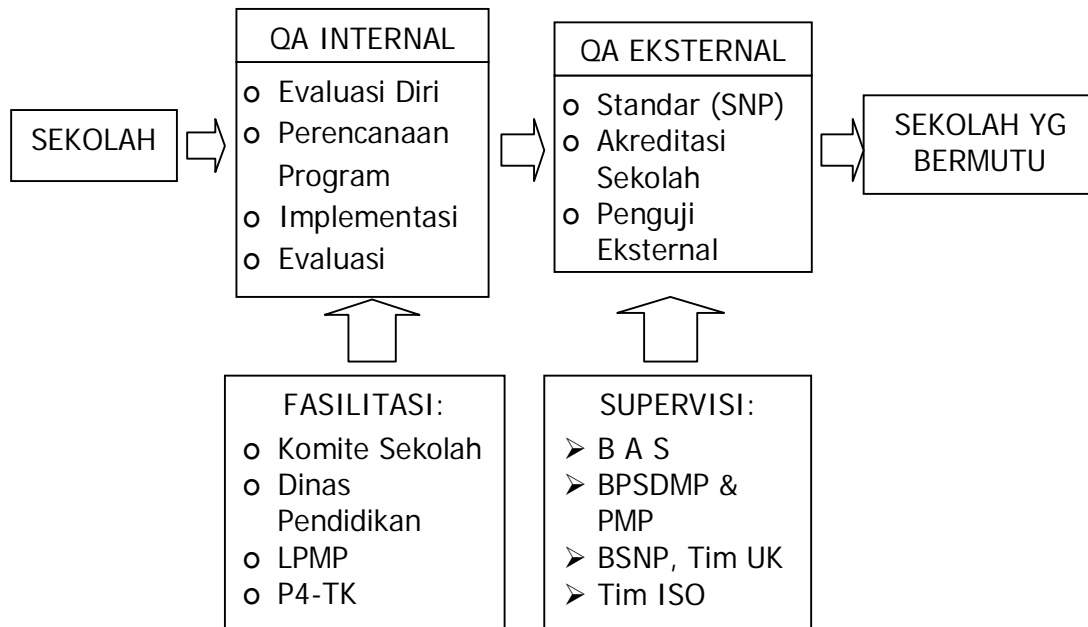


**Gambar 1. Model Evaluasi Penjaminan Mutu Sekolah**

Pada Gambar 1 tersebut, penjaminan mutu dilakukan oleh pihak internal sekolah mencakup penjaminan mutu komponen input pendidikan, baik input siswa maupun input instrumental (input pengolah), penjaminan mutu komponen proses (manajemen sekolah, proses pembelajaran, dan pembentukan kultur sekolah sebagai bagian dari program peningkatan mutu sekolah), penjaminan mutu komponen output atau hasil pendidikan, baik yang terkait dengan output dalam aspek akademik maupun non-akademik, dan penjaminan mutu terhadap komponen outcomes pendidikan (khusus untuk SMK, mencakup: daya serap lulusan oleh lapangan kerja, masa tunggu untuk memperoleh pekerjaan), serta kriteria eksternal lainnya.

Selain itu, model evaluasi terhadap pelaksanaan penjaminan mutu yang telah dilakukan oleh pihak internal sekolah ini juga dilengkapi dengan mekanisme atau prosedur pelaksanaan penjaminan mutu yang melibatkan institusi-institusi di luar

sekolah yang memiliki Tupoksi maupun kewenangan untuk melakukan penjaminan mutu sekolah, yaitu: LPMP, Dinas Pendidikan, P4-TK dan Komite Sekolah sebagai mitra sekolah. Gambaran secara visual mengenai Mekanisme atau Prosedur Penjaminan Mutu Sekolah diilustrasikan pada Gambar 2.



**Gambar 2. MEKANISME EVALUASI PENJAMINAN MUTU SEKOLAH**

Pada Gambar 2 tersebut, diilustrasikan meskipun upaya penjaminan mutu sekolah harus dilakukan oleh pihak internal sekolah, sebagai bagian dari manajemen mutu, tetapi harus difasilitasi: didorong, didukung, didampingi dan disupervisi oleh institusi-institusi di luar sekolah yang memiliki Tupoksi maupun kewenangan untuk melakukan penjaminan mutu sekolah, yaitu: LPMP, Dinas Pendidikan, P4-TK dan Komite Sekolah sebagai mitra sekolah.

#### **F. Instrumen Evaluasi Penjaminan Mutu Sekolah**

Instrumen evaluasi penjaminan mutu sekolah ini dikembangkan untuk mengumpulkan data yang terkait dengan upaya penjaminan mutu yang dilakukan oleh sekolah secara internal, sebagai bagian dari proses manajemen mutu.

Instrumen evaluasi penjaminan mutu sekolah ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data terkait dengan:

- 1) Keterlaksanaan program penjaminan mutu sekolah, yang mencakup semua komponen penjaminan mutu sekolah.
- 2) Ruang lingkup atau komponen penjaminan mutu, yang mencakup: input siswa, input pengolah, proses, output, dan outcomes.
- 3) Peran yang dilakukan oleh stakeholders dalam pelaksanaan penjaminan mutu sekolah secara internal.
- 4) Keberadaan program penjaminan mutu, yang telah direncanakan, dan dilaksanakan di sekolah.
- 5) Keberadaan Divisi/Pokja program penjaminan mutu sekolah.
- 6) Keberadaan standar (acuan) untuk masing-masing komponen penjaminan mutu.
- 7) Mekanisme atau prosedur penjaminan mutu internal sekolah.
- 8) Pelaksanaan evaluasi program penjaminan mutu internal sekolah.
- 9) Kendala-kendala yang dialami oleh sekolah dalam melaksanakan penjaminan mutu, dan
- 10) Saran dan harapan mengenai program penjaminan mutu sekolah.

## **G. Penutup**

Panduan evaluasi penjaminan mutu sekolah ini dikembangkan sebagai salah satu model alternatif yang dapat diacu oleh sekolah dalam rangka melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penjaminan mutu yang wajib dilakukan oleh sekolah sebagai bagian dari proses manajemen mutu.

Adapun penetapan komponen yang akan diprioritaskan dalam rangka penjaminan mutu di sekolah sepenuhnya merupakan kewenangan sekolah, untuk disesuaikan dengan kondisi dan daya dukung yang dimiliki sekolah.

Semoga panduan singkat ini akan dapat memberikan manfaat bagi para praktisi dan semua pihak yang peduli dengan kegiatan penjaminan mutu sekolah.